

**PENGORGANISASIAN KOMUNITAS WARIA BERBASIS HAK ASASI MANUSIA  
DI PERKUMPULAN KELUARGA BERENCANA INDONESIA (PKBI)  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Pendidikan  
Universitas Negeri Yogyakarta  
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan



Oleh  
Sri Mulyani  
NIM 09102244001

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH  
JURUSAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
AGUSTUS 2013**

## **PERSETUJUAN**

Skripsi yang berjudul “Pengorganisasian Komunitas Waria Berbasis Hak Asasi Manusia di Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Daerah Istimewa Yogyakarta” yang disusun oleh Sri Mulyani, NIM 09102244001 ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diujikan.



## **SURAT PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Tanda tangan dosen penguji yang tertera dalam halaman pengesahan adalah asli. Jika tidak asli, saya siap menerima sanksi ditunda yudisium pada periode berikutnya.

Yogyakarta, Agustus 2013

Yang Menyatakan,



Sri Mulyani  
NIM 09102244001

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "PENGORGANISASIAN KOMUNITAS WARIA BERBASIS HAK ASASI MANUSIA DI PERKUMPULAN KELUARGA BERENCANA INDONESIA (PKBI) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA" yang disusun oleh Sri Mulyani, NIM 09102244001 ini telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 02 Agustus 2013 dan dinyatakan lulus.

Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
S.W Septiarti, M. Si.	Ketua Penguji		19-8-2013
Hiryanto, M. Si.	Sekretaris Penguji		19-8-2013
Prof. Dr. Farida Hanum, M. Si.	Penguji Utama		16-8-2013
A.L Setya Rohadi, M. Kes	Penguji Pendamping		19-8-2013

Yogyakarta, 23 AUG 2013

Fakultas Ilmu Pendidikan  
Universitas Negeri Yogyakarta

Dekan,



Dr. Haryanto, M. Pd.  
NIP. 19600902 198702 1 0018

## **MOTTO**

- ❖ Pintu kebahagiaan terbesar adalah doa kedua orang tua. Berusahalah mendapatkan doa itu dengan berbakti kepada mereka berdua agar doa mereka menjadi benteng yang kuat yang menjagamu dari semua yang tidak kamu sukai. (Dr. Aidh Al-Qarni)

## **PERSEMBAHAN**

Atas karunia Allah SWT aku persembahkan karya tulis  
kepada:

1. Almamaterku Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memerikan ilmu dan pengetahuan yang begitu besar.
2. Agama, Nusa dan Bangsa
3. Ayah dan Ibu tercinta yang telah mencurahkan segenap kasih sayangnya serta doa yang tak pernah lupa ia sisipkan sehingga penulis berhasil menyusun karya ini. Terimakasih atas pengorbanan yang telah diberikan.

**PENGORGANISASIAN KOMUNITAS WARIA BERBASIS HAK ASASI MANUSIA  
DI PERKUMPULAN KELUARGA BERENCANA INDONESIA (PKBI)  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Oleh  
Sri Mulyani  
NIM 09102244001

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: 1) Pelaksanaan pengorganisasian komunitas waria berbasis hak asasi manusia di Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Daerah Istimewa Yogyakarta dan 2) Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pengorganisasian di Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini adalah koordinator dan relawan divisi pengorganisasian komunitas waria, ketua komunitas waria Yogyakarta, waria, dan pengelola PKBI DIY. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, metode wawancara dan metode dokumentasi. Peneliti merupakan instrument utama dalam melakukan penelitian yang dibantu oleh pedoman observasi, pedoman wawancara dan pedoman dokumentasi. Teknik yang digunakan dalam analisis data adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Triangkulasi yang dilakukan untuk menjelaskan keabsahan data dengan menggunakan triangkulasi sumber dan metode.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) pengorganisasian komunitas waria berbasis hak asasi manusia di Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan dalam bentuk outreach (penjangkauan), assisting (pendampingan), pertemuan rutin CBO (Community Based Organization), pertemuan rutin dengan IWAYO (Ikatan Waria Yogyakarta). PKBI DIY bekerjasama dengan IWAYO sebagai mitra strategis yang didalamnya terdapat 10 komunitas seluruh Yogyakarta dengan anggota 200 orang waria. 2) faktor pendukung dalam pelaksanaan pengorganisasian komunitas waria, yaitu: (a) adanya dukungan dari masyarakat luas (b) tim yang solid dari pihak pengorganisir, (c) hubungan yang baik antara pengorganisir dengan waria. Faktor penghambatnya, yaitu: (a) kurangnya sumber daya manusia dari pihak pengorganisir, (b) kurangnya antusias waria dalam mengikuti setiap kegiatan, (c) sebagian waria membutuhkan waktu lama agar bisa mandiri.

Kata kunci: *pengorganisasian, komunitas, waria*

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kependidikan di Universitas Negeri Yogyakarta.

Penulis menyadari dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari adanya bantuan berbagai pihak. Dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, terimakasih telah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu di Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, yang telah memberikan fasilitas dan sarana sehingga studi saya berjalan dengan lancar.
3. Ketua Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, yang telah memberikan fasilitas untuk kelancaran pembuatan skripsi ini.
4. Ibu S.W Septiarti, M. Si. selaku dosen pembimbing I dan Bapak A.L Setya Rohadi, M. Kes selaku dosen pembimbing II, yang telah berkenan membimbing dan menguji serta memberikan masukan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Penndidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan.
6. Pengelola PKBI DIY dan IWAYO atas izin dan bantuan untuk penelitian.
7. Bapak Shogi, Ibu Juwariah, Adikku Sri Mulyanto atas doa, perhatian, kasih sayang, dan segala dukungannya.

8. Kakek dan Nenekku (mbah Durahman dan mbah Wagirah) di Purworejo yang telah memberikan dukungan, semangat dan doa yang tiada henti untukku.
9. Lima Sekawan (Bunda Rina, Neng Aulia, Mbak Linda dan Yanti) tak lupa buat Mas Wi buat keceriaan, kebersamaan dan semangat dari kalian.
10. Teman-teman seperjuangan PLS Reguler maupun Non Reguler 2009.
11. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang peduli terhadap pendidikan terutama Pendidikan Luar Sekolah dan bagi para pembaca umumnya. Amin.

Yogyakarta, Agustus 2013

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
SURAT PERNYATAAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	8
C. Pembatasan Masalah .....	9
D. Rumusan Masalah .....	9
E. Tujuan Penelitian .....	9
F. Manfaat Penelitian .....	10
G. Penjelasan Istilah.....	11
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Kajian Pustaka.....	13
1. Kajian Tentang Pengorganisasian .....	13
a. Pengertian dan Makna Pengorganisasian Komunitas .....	13
b. Prinsip dan Model Pengorganisasian.....	15
c. Tahap-tahap Pengorganisasian Komunitas .....	18
d. Pelaksanaan Pengorganisasian .....	22

2. Kajian Tentang Komunitas Waria.....	25
a. Pengertian Komunitas dan Waria .....	25
b. Motivasi Menjadi Waria.....	27
c. Hubungan Waria dengan Masyarakat.....	28
3. Kajian Tentang Hak Asasi Manusia.....	31
a. Pengertian Hak Asasi Manusia.....	31
b. Jenis Hak Asasi Manusia.....	32
c. Hak dan Kewajiban Waria Sebagai Warga Negara .....	34
4. Kajian Tentang Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia ....	36
B. Kerangka Berfikir .....	38
C. Pertanyaan Penelitian .....	41

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan Penelitian.....	42
B. Waktu dan Tempat Penelitian.....	43
C. Sumber Data Penelitian .....	44
D. Teknik Pengumpulan Data .....	44
a. Wawancara.....	45
b. Observasi .....	46
c. Dokumentasi .....	47
E. Instrumen Penelitian .....	49
F. Teknik Analisis Data.....	50
G. Teknik Keabsahan Data.....	52

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian .....	54
1. Deskripsi PKBI DIY .....	54
a. Lokasi dan keadaan PKBI DIY .....	54
b. Sejarah berdirinya PKBI DIY.....	55
c. Visi dan misi PKBI DIY .....	56
d. Fasilitas PKBI DIY.....	57
e. Tenaga Pengurus PKBI DIY.....	59
f. Program PKBI DIY .....	60

g. Struktur organisasi PKBI DIY .....	65
h. Jaringan Kerjasama.....	65
i. Pendanaan.....	66
j. Ikatan Waria Yogyakarta (IWAYO) .....	66
<b>2. Data Hasil Penelitian dan Pembahasan .....</b>	<b>66</b>
a. Pengorganisasian komunitas waria berbasis hak asasi manusia di Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) DIY .....	66
b. Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pengorganisasian komunitas waria berbasis hak asasi manusia di Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) DIY .....	89
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	93
B. Saran .....	94
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>96</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>98</b>

## **DAFTAR TABEL**

	Halaman
Tabel 1. Teknik Pengumpulan Data.....	48
Tabel 2. Fasilitas yang ada di Youth Centre PKBI DIY .....	58
Tabel 3. Tenaga Staff dan Karyawan di Youth Centre PKBI .....	59
Tabel 4. Pertemuan CO dengan MS bulan Juni 2013 .....	70
Tabel 5. Pertemuan CBO bulan Juni 2013.....	81
Tabel 6. Pedoman Observasi.....	99

## **DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
Gambar 1. Kerangka Berfikir.....	38
Gambar 2. PKBI DIY Badran .....	54
Gambar 3. Youth Center PKBI DIY .....	55
Gambar 4. Gazebo Yuth Centre PKBI DIY .....	58
Gambar 5. Jenis Pelayanan di Klinik Adhiwarga .....	64
Gambar 6. Warung makan yang dikelola WARKOP .....	73
Gambar 7. Peneliti dengan anggota WARKOP .....	73
Gambar 8. Ketua IWAYO koordinasi dengan DINSOS.....	77
Gambar 9. Pertemuan IWAYO dengan pengurus kampung .....	80
Gambar 10. Aksi waria dengan masyarakat.....	83
Gambar 11. Pertemuan rutin IWAYO .....	84
Gambar 12. Baksos dengan masyarakat sekitar kali code. ....	86
Gambar 13. Pengorganisaian Komunitas Waria di PKBI DIY .....	88

## **DAFTAR LAMPIRAN**

	Halaman
Lampiran 1. Pedoman Observasi .....	99
Lampiran 2. Pedoman Dokumentasi.....	101
Lampiran 3. Pedoman Wawancara .....	102
Lampiran 4. Catatan Lapangan .....	112
Lampiran 5. Analisis Data.....	130
Lampiran 6. Clipping Report .....	136
Lampiran 7. Nama MS Waria Dijangkau per Januari 2013.....	137
Lampiran 8. Struktur Organisasi .....	142
Lampiran 9. Laporan TRIWULAN IWAYO.....	143

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Waria merupakan salah satu contoh kaum transseksual yaitu *male-to-female transsexual* atau orang yang terlahir lelaki namun sejak kecil merasa dirinya perempuan sehingga mereka hidup layaknya perempuan. Transeksualitas berarti memiliki tubuh yang salah terhadap gender yang dimiliki. Menurut Kartini Kartono (1989 : 24) Transeksualisme adalah gejala memiliki seksualitas yang berlawanan dengan struktur fisiknya. Terdapat dua macam transeksual, yakni transeksual perempuan ke laki-laki (*female-to-male transsexual*), memiliki tubuh perempuan dan *mind* laki-laki, dan transeksual laki-laki ke perempuan (*male-to-female transsexual*), memiliki tubuh laki-laki dan *mind* perempuan.

Pada umumnya tubuh laki-laki "berisi" seorang laki-laki pula, dan sebuah tubuh perempuan "berisi" seorang perempuan pula. Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran agama Islam secara tegas mengatakan bahwa manusia diciptakan berpasangan, yaitu pasangan manusia adalah laki-laki dan perempuan (Q.S Al.Hujurat; 13). Tidak demikian halnya bagi kaum transeksual. Kehadiran mereka sebagai kelompok ketiga dalam struktur kehidupan manusia tentunya menjadi "tidak diakui". Secara eksplisit Al-Qur'an tidak pernah menyebut jenis kelamin diluar pria dan wanita. Norma kebudayaan pun hanya mengakui dua jenis kelamin yaitu diluar pria dan wanita. Jenis kelamin itu sendiri mengacu kepada keadaan fisik alat reproduksi manusia. Kelly (Koeswinarno, 2005: 15) berpendapat bahwa

mengenai jenis kelamin dapat mengakibatkan masyarakat menilai tentang perilaku manusia dimana pria harus berperilaku sebagai pria (berperilaku maskulin) dan wanita harus berperilaku sebagai wanita (berperilaku feminin). Kaum transeksual merupakan kaum minoritas dalam masyarakat. Namun demikian, jumlah kaum transeksual semakin hari semakin banyak, terutama dikota-kota besar. Yogyakarta merupakan salah satu kota besar yang memiliki komunitas transeksual khususnya waria. Jumlahnya sekarang mencapai 10 komunitas waria yang tergabung dalam sebuah wadah yang disebut Ikatan Waria Yogyakarta atau IWAYO (PKBI, 2013). Transeksual khususnya waria berbeda dengan homoseksual dan lesbian (perilaku seksual yang ditujukan pada pasangan sejenis) atau *transvestisme* (suka menggunakan pakaian lawan jenis dengan tujuan pemenuhan kebutuhan seksual). Walaupun hal tersebut juga merupakan bagian dari suatu kelaianan seksual.

Sebagai contoh pengakuan dari seorang waria bernama Sandra:

“Nama asli saya B.T.G Chondro, saya tidak bisa menipu perasaan diri saya sendiri, karena saya merasa bahwa jiwa saya ini adalah perempuan. Jadi sulit jika saya harus bersikap dan berperilaku seperti laki-laki sebagaimana dikehendaki orang tua. Mungkin ini sudah takdir dan saya harus menerimanya dengan ikhlas”. (Etty Padmiati dan Sri Salmah, 2011: 77).

Fenomena kaum waria merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat ditolak eksistensinya dimasyarakat. Mereka memang ada ditengah kehidupan ini, dan dapat dijumpai di tempat-tempat tertentu, terlebih dikota, secara mandiri ataupun kelompok. Selama ini mereka sudah bertahan hidup dan menjadi kultur yang tidak bisa dihilangkan seiring dengan perkembangan jaman. Perspektif HAM menyatakan identitas dan orientasi seksual adalah suatu pilihan. Setiap

orang mempunyai hak dasar untuk menentukan pilihannya. Namun, pilihan tersebut harus dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak melanggar hak orang lain yang mempunyai pilihan berbeda. Oleh sebab itu, keberadaan waria harus diakui selayaknya manusia yang lain (laki-laki dan perempuan), tentunya dengan segala hak dan kewajibannya yang setara juga dengan mereka. Seorang waria adalah manusia juga. Mereka hanya ingin diakui dan dihargai didalam kehidupan bermasyarakat, dan bisa bersosialisasi seperti masyarakat pada umumnya.

Sebagai kaum minoritas yang memiliki populasi yang relatif kecil jika dibandingkan jumlah populasi masyarakat Indonesia yaitu berjumlah 350 orang menurut data Dinas Sosial DIY dan sekarang meningkat menjadi 10 komunitas dengan anggota lebih dari 350 orang namun hanya 200 waria yang saat ini menjadi anggota IWAYO, kaum transeksual senantiasa menjadi perhatian banyak orang. Perhatian tersebut dimanifestasikan lebih banyak sekedar memperhatikan. Ada yang menganggapnya sebagai tontonan, penyebar penyakit, pendosa atau yang lebih ekstrim lagi, dianggap sebagai kaum yang dilaknat. Kaum transeksual juga sering dihadapkan pada berbagai masalah seperti penolakan keluarga, kurang diterima atau bahkan tidak diterima secara sosial, dianggap lelucon, hingga kekerasan baik verbal maupun nonverbal. Penolakan terhadap kaum transeksual tersebut berasal dari keluarga, lingkungan masyarakat tempat tinggal mereka hingga pemerintah. Masyarakat itu merupakan hakim yang paling keras dan kejam terhadap tingkah laku para anggotanya dan cenderung tidak mentolerir tingkah laku yang menyimpang dari norma umum anggautanya (Kartini Kartono, 1989: 24). Dari beberapa masalah yang sering dihadapi oleh kaum transeksual

tersebut, lahirlah diskriminasi terhadap transeksual dan ruang gerak mereka pun dibatasi.

Kaum transeksual di bagian dunia manapun umumnya didiskriminasi dan tidak diakui hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial maupun budaya oleh negara. Dede Oetomo (dalam Kompas, 16-9-2004) menyatakan hak-hak biologis waria selalu dianggap patologis, anomali, atau abnormal. Tempat-tempat pertemuan mereka untuk sosial *gathering* selalu diidentifikasi sebagai tempat maksiat. Padahal sebagai bagian masyarakat mereka punya hak dan kewajiban yang sama di bidang hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya sebagai warga negara.

Kurangnya kepedulian pemerintah terhadap waria semakin jelas terlihat contohnya saja saat terjadi penyerangan dari kelompok masyarakat terhadap mereka yang menghadiri Konferensi Internasional untuk Perkumpulan Gay dan Lesbian di tingkat Asia (*Conference of the International Lesbian and Gay Association – Asia*) yang diselenggarakan di Surabaya pada 25 – 28 Maret 2010 (<http://arihaz99.wordpress.com/2010/04/30/fpi-serang-warria-dalam-pelatihan-hukum-dan-ham/>). Sejumlah saksi mata mendapati bahwa dalam kasus tersebut tidak ada sama sekali tindakan dari polisi untuk mengamankan para peserta dari tindakan kekerasan. Selain itu selama konferensi berlangsung, sejumlah kelompok mendatangi dan menutup kantor GAYA Nusantara dan itu terjadi sampai dengan 21 April 2010. Tidak ada tindakan atau upaya perlindungan apapun yang diberikan oleh aparat ketika anggota masyarakat bertindak sewenang-wenang memaksakan kehendak mereka untuk menghentikan kegiatan dan menutup kantor. Selain itu, dibulan April 2010 terjadi penyerangan kembali terhadap

komunitas Waria di Depok dalam sebuah pelatihan yang diselenggarakan oleh Komnas HAM. Penyerangan tersebut dilakukan oleh Front Pembela Islam (yang lebih dikenal dengan FPI). Dalam penyerangan tersebut diketahui bahwa tidak ada satupun aparat keamanan yang melakukan tindakan perlindungan terhadap para korban yang terdiri dari penyelenggara dan peserta pelatihan. Karena kasus tersebut penyelenggara terpaksa memindahkan kegiatan ke kantor Komnas HAM. Sebulan kemudian ancaman juga terjadi dalam seminar mengenai HIV / AIDS di Bandung pada 11 Mei 2010 yang menyebabkan seminar tersebut kembali harus dipindahkan. Kejadian tersebut tidak akan terjadi jika pemerintah lebih memperhatikan hak-hak yang dimiliki oleh waria sebagai warga negara.

Sejak tahun 1999 sebenarnya kaum waria di Indonesia telah mendapat jaminan perlindungan dengan disahkannya UU No 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 3 ayat (2) undang-undang tersebut menyebutkan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum” dan ayat (3) berbunyi , ”Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi”. Bahkan Pasal 5 ayat (3) menyebut,”...berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya”. Berdasar aturan ini, kelompok waria oleh Komnas HAM kini ditempatkan sebagai kelompok minoritas dalam Subkomisi Perlindungan Kelompok Khusus. Tidak hanya UU No 39/1999 tetapi juga Undang-undang Dasar 1945 yang didalamnya terkandung pasal tentang hak dan kewajiban seseorang sebagai warga negara.

Namun sekalipun UUD 1945 dan UU No 39/1999 menjadi dasar hukum yang kuat bagi waria untuk memperoleh perlakuan yang adil dari negara, kenyataan di lapangan selama ini waria belum diperlakukan sebagaimana warga negara ‘normal’ lainnya. Aksesibilitas terhadap pelayanan publik dasar bagi waria belum diberikan secara adil oleh pemerintah Indonesia. Dari catatan yang dikumpulkan oleh para aktivis Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender Indonesia (LGBT) diketahui bahwa di antara peraturan-peraturan daerah (Perda) yang jelas-jelas tidak melindungi atau justru mengkriminalisasi LGBT I antara lain adalah:

1. Perda Provinsi Sumatera Selatan No. 13 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Maksiat di Provinsi Sumatera Selatan. Perda ini mengkriminalisasikan kelompok LGBTI dengan mengkategorikan kelompok LGBTI sebagai bagian dari perbuatan pelacuran.
2. Perda Kota Palembang No. 2 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Pelacuran. Perda ini mengkriminalisasikan kelompok LGBTI dengan mengkategorikan kelompok LGBTI sebagai bagian dari perbuatan pelacuran. Pemda Kota Palembang tampaknya tidak mengerti mengenai perbedaan pelacuran dengan orientasi seksual dan asas hukum yang berlaku di Indonesia.
3. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Peraturan ini hanya menyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan oleh dua orang heteroseksual.
4. Perda DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Tibum). Perda ini mengkriminalisasikan pekerjaan-pekerjaan informal yang dilakukan oleh masyarakat miskin kota. Sehingga kelompok LGBTI di Jakarta yang mempunyai pekerjaan informal yang dikriminalisasikan oleh perda itu akan mengalami dampak langsung dari diberlakukannya perda Tibum ini.
5. UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan PP No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006. Kedua peraturan itu hanya mengakui identitas transseksual (waria yang telah berhasil melakukan upaya perubahan kelamin) yang jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan transgender (waria yang belum, sedang atau tidak melakukan upaya perubahan kelamin).
6. Kebijakan Departemen Sosial melalui Dinas Pembinaan Mental dan Kesehatan Sosial (Bintalkesos) DKI Jakarta yang memasukan kelompok waria ke dalam kategori penyandang cacat. Meskipun kebijakan tersebut tidak tertulis, melainkan suatu kesalahan teknis yang akhirnya menjadi

suatu kebiasaan. Dinas Bintalkesos DKI Jakarta memasukkan waria ke dalam kewenangan Sub Dinas Penyantunan Penyandang Cacat (Sudin PPC).

Komunitas waria adalah salah satu fakta sosial yang ada dimanapun di dunia. Sebagai manusia waria ingin agar jati dirinya diakui, butuh pekerjaan untuk menopang hidupnya, butuh berinteraksi dengan sesamanya dalam suatu aktivitas sosial maupun budaya, dan kebutuhan-kebutuhan manusia pada umumnya. Sebagai manusia biasa mereka membutuhkan perlakuan dan pelayanan dari negara yang sama dengan warga negara lainnya. Dalam konteks waria, yang diperlukan sebenarnya adalah bagaimana masyarakat mampu memandang dan mengakui keberadaan waria sebagai manusia yang mempunyai hak-hak yang sama : hak untuk merdeka, hak dalam beragama, hak dalam pendidikan, dalam politik, bahkan hak dalam mendapatkan penghargaan dalam ruang sosial serta hak yang sama sebagai warga negara.

Salah satu lembaga sosial yang membantu para waria selain memperhatikan kesehatan reproduksi mereka, lembaga ini juga membantu memperjuangkan hak-hak mereka sebagai warga negara yang kurang diperhatikan oleh pemerintah. Lembaga ini membantu mereka mendapatkan hak-hak mereka sebagai warga negara dan membantu mengembalikan harkat dan martabat mereka sebagai manusia. Lembaga ini berperan sebagai fasilitator bagi mereka yang membutuhkan bantuan hukum dan juga mendampingi dan mengorganisasi berbagai komunitas. Lembaga sosial yang dimaksud adalah Perkumpulan Keluarga Berecana Indonesia (PKBI) DIY. Untuk menangani isu-isu tentang kesehatan reproduksi remaja dan memperjuangkan hak-hak yang seharusnya

didapatkan oleh setiap manusia, PKBI DIY memiliki beberapa program salah satunya yaitu program pendampingan. Program pendampingan bertujuan memperjuangkan hak-hak individu maupun komunitas yang didampingi untuk mendapatkan hak mereka yang kurang diperhatikan oleh pemerintah. Pendampingan dan pengorganisasian dijalankan dengan cara mencari dan menemukan individu maupun komunitas yang membutuhkan bantuan, kemudian memberdayakan dan mengorganisasi mereka baik secara individual maupun komunal.

Dari berbagai permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai Pengorganisasian Komunitas Waria Berbasis Hak Asasi Manusia di Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Waria sering mendapat perlakuan yang berbeda dan bersifat negatif baik dimata masyarakat maupun dimata hukum.
2. Kaum waria rawan kekerasan, ketidakadilan hukum, dan penyakit seks menular.
3. Kurangnya kepedulian pemerintah terhadap waria.
4. Kurangnya perlindungan hukum yang didapatkan oleh waria.
5. Pelanggaran HAM khususnya hak sebagai warga negara kerap terjadi pada mayoritas kaum waria

6. Ketidakadilan dimata hukum berawal dari minimnya pengetahuan tentang hukum yang dimiliki oleh para waria.
7. Kurang terinformasinya organisasi waria secara luas.

### **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan diatas tidak semuanya dikaji dalam penelitian ini. Mengingat banyak keterbatasan waktu, dana dan kemampuan peneliti, agar lebih mendalam maka penelitian ini hanya dibatasi pada masalah pengorganisasian komunitas waria berbasis hak asasi manusia di Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya pada hak-hak sebagai warga negara.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah disebutkan diatas, rumusan masalah yang diangkat melalui penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengorganisasian komunitas waria berbasis hak asasi manusia di Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Daerah Istimewa Yogyakarta ?
2. Apakah faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pengorganisasian komunitas waria di Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Daerah Istimewa Yogyakarta ?

### **E. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Pengorganisasian komunitas waria berbasis hak asasi manusia di Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pengorganisasian komunitas waria berbasis hak asasi manusia di Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Daerah Istimewa Yogyakarta.

## F. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti
  - a. Membantu untuk memahami dan mengerti pengorganisasian komunitas waria berbasis hak asasi manusia di Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Daerah Istimewa Yogyakarta.
  - b. Memperoleh pengalaman nyata tentang situasi dan kondisi lapangan yang nantinya akan menjadi bidang penelitian.
  - c. Menerapkan ilmu yang sudah didapatkan dibangku perkuliahan.
2. Bagi Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Daerah Istimewa Yogyakarta
  - a. Sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pengorganisasian bagi komunitas waria khususnya dan komunitas yang lain secara keseluruhan.
  - b. Sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan langkah pengorganisasian selanjutnya.
  - c. Memberikan masukan dalam pelaksanaan pengorganisasian yang akan di selenggarakan.
3. Bagi Divisi Pengorganisasian Komunitas Waria
  - a. Mengetahui kelemahan dan kekuatan dalam proses pengorganisasian komunitas waria

- b. Sebagai bahan masukan untuk mencari model pelaksanaan pengorganisasian yang lebih baik.

## G. Penjelasan Istilah

Untuk lebih memperjelas istilah yang digunakan dalam penelitian ini dan menghindari adanya kemungkinan kesalahan yang terjadi maka perlu adanya pembatasan atau definisi operasionalnya sebagai berikut:

1. Pengorganisasian Komunitas adalah pengembangan yang mengutamakan pembangunan kesadaran kritis dan penggalian potensi pengetahuan lokal masyarakat. Pengorganisasian masyarakat mengutamakan pengembangan masyarakat berdasarkan dialog atau musyawarah yang demokratis. Usulan komunitas merupakan sumber utama gagasan yang harus ditindaklanjuti secara kritis, sehingga partisipasi masyarakat dalam merencanakan, membuat keputusan dan melaksanakan program merupakan tonggak yang sangat penting.
2. Waria adalah *male-to-female transsexual* (MFT) yaitu transseksual dari lelaki ke perempuan yakni orang yang terlahir lelaki namun sejak kecil merasa dirinya perempuan sehingga mereka hidup layaknya perempuan. Mereka inilah yang umum dikenal dengan sebutan waria (wanita-pria). Sebaliknya *female-to-male transsexual* (FMT) adalah transseksual dari perempuan ke lelaki yaitu orang yang terlahir perempuan tetapi merasa dirinya lelaki sehingga mereka hidup sebagai laki-laki.
3. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan

anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

4. Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) adalah sebuah lembaga non pemerintah yang berdiri atas dasar kepedulian terhadap kesehatan ibu dan anak. Selain itu Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia adalah sebuah wadah pengembangan program untuk remaja dan pasangan suami istri, serta menjangkau komunitas seperti waria, gay, pembantu rumah tangga, pekerja seks, buruh gendong, tukang becak.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Pustaka**

##### **1. Kajian Tentang Pengorganisasian**

###### **a. Pengertian dan Makna Pengorganisasian Komunitas**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengorganisasian adalah sesuatu yang digambarkan sebagai sesuatu yang tersentralisasi dan berisi tugas-tugas yang sangat terspesialisasikan. Pengertian pengorganisasian masyarakat dapat ditemukan dalam tulisan Dave Beckwith dan Cristina Lopez (1997), yang dikutip oleh Wicaksono & Darusman (2001), Community Development (CD) dapat didefinisikan sebagai:

“Proses membangun kekuatan dengan melibatkan konstituen sebanyak mungkin melalui proses menemukan ancaman yang ada secara bersama-sama, menemukan penyelesaian-penyelesaian yang diinginkan terhadap ancaman-ancaman yang ada; menemukan orang dan struktur, birokrasi, perangkat yang ada agar proses penyelesaian yang dipilih menjadi mungkin dilakukan, menyusun sasaran yang harus dicapai; dan membangun sebuah institusi yang secara demokratis diawasi oleh seluruh konstituen sehingga mampu mengembangkan kapasitas untuk menangani ancaman dan menampung semua keinginan dan kekuatan konstituen yang ada”.

Jadi pengorganisasian masyarakat bukan sekedar memobilisasi massa untuk suatu kepentingan, tetapi suatu proses pergaulan/pertemanan/persahabatan dengan suatu komunitas atau masyarakat yang lebih menitik-beratkan pada inisiatif masa kritis untuk

mengambil tindakan-tindakan secara sadar dalam mencapai perubahan yang lebih baik. Pengertian lain tentang pengorganisasian adalah keseluruhan pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas, tugas, kewenangan dan tanggung jawab sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kegiatan kesatuan yang telah ditetapkan (Siagian, 1983 dalam Juniati).

Pengorganisasian masyarakat adalah suatu proses ketika suatu komunitas tertentu mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhannya serta mengembangkan keyakinannya untuk berusaha memenuhi kebutuhan itu termasuk menentukan prioritas dari kebutuhan tersebut yang disesuaikan dengan sumber daya yang tersedia dan dengan usaha gotong royong (Sasongko. A, 1996)

Pengorganisasian masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat dapat mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan dan menentukan prioritas dari kebutuhan-kebutuhan tersebut, dan mengembangkan keyakinan untuk berusaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan sesuai dengan skala prioritas berdasarkan atas sumber-sumber yang ada dalam masyarakat sendiri maupun yang berasal dari luar dengan usaha secara gotong royong (Ross Murray, 2000)

Berdasarkan dari beberapa pengertian tentang pengorganisasian maka dapat disimpulkan bahwa pengertian pengorganisasian komunitas adalah upaya atau proses yang tersentralisasi dan didalamnya memiliki unsur-unsur yang saling berkaitan satu sama lain dan memiliki tugas

masing-masing yang dapat digerakkan sebagai suatu kegiatan untuk membangun kesadaran kritis komunitas yang ada didalamnya, mengidentifikasi kebutuhan, menentukan prioritas kebutuhan serta melakukan tindakan untuk pemenuhan kebutuhan secara gotong royong.

**b. Prinsip dan Model Pengorganisasian**

Dalam menjalankan aktivitas pengorganisasian, prinsip yang harus dipegang dan dijadikan pedoman dalam berfikir dan berbuat bagi seorang pengorganisasi komunitas/masyarakat adalah:

1. Membangun pertemanan/persahabatan dengan komunitas atau masyarakat
2. Bersedia belajar dari kehidupan komunitas yang bersangkutan
3. Membangun komunitas atau masyarakat dengan berangkat dari apa yang ada atau dimiliki komunita tersebut
4. Tidak berkeinginan untuk menjadi pemimpin dan “tetua” dari komunita tersebut
5. Mempercayai bahwa komunitas memiliki potensi dan kemampuan untuk membangun dirinya sendiri hingga tuntas.

Prinsip-prinsip dasar dalam pengorganisasian komunitas/masyarakat adalah berpihak dan mementingkan komunitas; pendekatan holistik, tidak kasuistik, bersikap independen dan mengembangkan rasa empati, adanya pertanggungjawaban pada rakyat, ada proses saling belajar, kesetaraan, anti kekerasan, mendorong komunitas untuk

berinisiatif, musyawarah sebagai media komunikasi pengambilan keputusan dan menghindari intervensi, berwawasan ekosistem, dan praxis.

Pengorganisasian komunitas/masyarakat adalah pengembangan yang mengutamakan pembangunan kesadaran kritis dan penggalian potensi pengetahuan lokal komunitas/masyarakat. Pengorganisasian komunitas/masyarakat mengutamakan pengembangan komunitas/masyarakat berdasarkan dialog atau musyawarah yang demokratis. Usulan komunitas merupakan sumber utama gagasan yang harus ditindak lanjuti secara kritis, sehingga partisipasi masyarakat dalam merencanakan, membuat keputusan dan melaksanakan program merupakan tonggak yang sangat penting.

Pengorganisasian komunitas/masyarakat bergerak dengan cara menggalang masyarakat kedalam suatu organisasi yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Suara dan kepentingan masyarakat lebih utama dari pada kepentingan kaum elit. Pengorganisasian komunitas/ masyarakat juga memaklumi arti penting pembangunan sarana-sarana fisik yang dapat menunjang kemajuan masyarakat, namun titik tekan pembangunan itu ialah pengembangan kesadaran masyarakat sehingga mampu mengelola potensi sumber daya mereka.

Secara umum metode yang dipergunakan dalam pengorganisasian masyarakat adalah penumbuhan kesadaran kritis, partisipasi aktif, pendidikan berkelanjutan, pembentukan dan penguatan pengorganisasian

masyarakat. Semua itu bertujuan untuk melakukan transformasi sistem sosial yang dipandang menghisap masyarakat dan menindas (represif). Tujuan pokok pengorganisasian masyarakat adalah membentuk suatu tatanan masyarakat yang beradab dan berperi kemanusiaan (*civil society*) yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis, adil, terbuka, berkesejahteraan ekonomis, politik dan budaya.

Ada tiga model yang dipergunakan dalam pengorganisasian komunitas, yaitu sebagai berikut :

1. *Locality Development*. Model ini lebih menekankan pada peran serta seluruh masyarakat untuk mandiri. Prinsipnya adalah keterlibatan langsung masyarakat, melayani sendiri, membantu diri sendiri dalam penyelesaian masalah, dan mengembangkan keterampilan individual/kelompok dalam proses pemecahan masalah. Peran perawat komunitas dalam model ini adalah sebagai pendukung, fasilitator, dan pendidik (guru).
2. *Social Planning*. Model ini lebih menekankan pada perencanaan para ahli dan menggunakan birokrasi. Keputusan komunitas didasarkan pada fakta / data yang dikumpulkan, dibuat keputusan secara rasional. Penekanan pada penyelesaian masalah bukan proses pengambilan keputusan harus cepat dan berorientasi pada tujuan / hasil. Model ini menggunakan pendekatan langsung (perintah) dalam rangka untuk megubah masyarakat, dengan penekanan pada perencanaan. Peran perawat dalam model ini adalah sebagai fasilitator, pengumpulan

fakta/data, serta menganalisis dan melaksanakan program implementasi.

3. *Social Action*. Model ini lebih fokus pada korban. Fokus pada model ini adalah mengubah komunitas pada risasi /pemusatan isu yang ada di komunitas dengan menggunakan konflik/konfrontasi antara penduduk dan pengambilan keputusan/kebijakan. Penekanan pada proses atau tujuan. Fokus utamanya mentransfer kekuatan pada tingkat kelompok. Peran perawat sebagai aktivis, penggerak dan negosiator.

### c. Tahap – tahap Pengorganisasian Komunitas

Menurut Wicaksono dan Darusman (2001) strategi dan pendekatan pengorganisasian masyarakat menggunakan pendekatan proses yang partisipatif, pendampingan yang intensif dan berkelanjutan, pengembangan media komunikasi yang murah, mudah, dan bisa dimanfaatkan; penguatan simpul belajar untuk mengembangkan masyarakat sipil yang dinamis; dan mengutamakan potensi masyarakat setempat. Sementara kriteria dalam proses pengorganisasian masyarakat meliputi berakar pada sosio kultural; perencanaan, pelaksanaan dan monitoring bersama dengan masyarakat secara partisipatif; adanya penghormatan/ pengakuan hak-hak dan martabat orang kampung; fungsi dan manfaat Sumber Daya Alam (SDA) yang berkelanjutan; mengutamakan prakarsa masyarakat untuk transformasi; dan yang upaya bertahap dan konsisten.

Tahapan kegiatan dalam proses pengorganisasian masyarakat dapat meliputi melebur dengan masyarakat. *Outreach* adalah kegiatan memberikan pelayanan kepada penduduk yang mungkin tidak memiliki akses ke layanan tersebut. Sebuah komponen kunci dari jangkauan adalah bahwa kelompok pengorganisir tidak diam, tapi mobile, dengan kata lain mereka bertemu orang-orang membutuhkan layanan outreach di lokasi di mana mereka yang membutuhkan berada. Selain memberikan layanan, jangkauan memiliki peran pendidikan yaitu meningkatkan kesadaran pelayanan yang ada. Outreach sering dimaksudkan untuk mengisi kesenjangan dalam layanan yang disediakan oleh mainstream (sering, pemerintah) jasa, dan sering dilakukan oleh non-profit , organisasi non-pemerintah; (informasi awal, membangun kontak person, menjalin pertemanan, memberitahukan kedatangan, terlibat sebagai pendengar, terlibat aktif dalam diskusi, ikut bekerja bersama-sama, monitoring dan evaluasi); penyidikan sosial (survey : data primer dan sekunder, analisis sosial, dokumentasi, publikasi, monitoring dan evaluasi); merancang kegiatan awal (mengumpulkan isu, musyawarah bersama, indentifikasi masalah dan potensi, menentukan agenda bersama, dokumentasi proses, monitoring dan evaluasi); implementasi kegiatan (sesuai dengan kesepakatan hasil musyawarah pada tahap sebelumnya) contoh kegiatan: dialog, pelatihan, unjuk rasa, negosiasi, dll.; pembentukan organisasi rakyat; monitoring dan evaluasi; dan refleksi-aksi.

Pengorganisasian masyarakat ini juga termasuk sebagai proses pekerjaan sosial. Menurut W.A Friedlender melalui Agus Suradika (2005: 37) pekerjaan sosial adalah suatu pelayanan professional yang didasarkan pada ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam hubungan kemanusiaan, guna membantu seseorang atau kelompok untuk mencapai kepuasan dan kebebasan pribadi maupun sosial. Sedangkan menurut Hewit Stroup menyebutkan bahwa pekerjaan sosial adalah seni dan ilmu pengetahuan yang dengan menggunakan berbagai sumber membantu individu, kelompok dan masyarakat agar mereka mampu menolong diri mereka sendiri (Agus Suradika dan Bambang, 2005: 37).

Dalam bukunya yang berjudul *Social Work Practice*, Model dan Method, Allan Pincus dan Anne Minahan (1973), mengemukakan bahwa pekerjaan menitik beratkan pada permasalahan interaksi manusia dengan lingkungan sosialnya sehingga mereka mampu malaksanakan tugas-tugas kehidupan mengurangi ketegangan, serta mewujudkan aspirasi dan nilai-nilai mereka. Fokus dari pekerjaan sosial menurut Pincus dan Minahan sebagaimana tersebut diatas adalah interaksi orang dengan lingkungan sosial sehingga orang mampu menyelesaikan tugas kehidupan mereka, mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi, serta mewujudkan aspirasi dari nilai-nilai mereka.

Jadi dapat disimpulkan pekerjaan sosial adalah suatu pelayanan sosial untuk membantu seseorang atau kelompok agar mampu memberdayakan dan mengembangkan diri sendiri maupun orang lain.

Pendampingan juga dapat digolongkan dalam pekerjaan sosial karena pendampingan adalah sebuah pemberian layanan kepada seseorang/kelompok dalam upaya pemberdayaan dan kesejahteraan.

Dalam bukunya Agus Suradika (2005: 39) Fungsi Pekerjaan Sosial antara lain yaitu:

1. Kuratif/rehabilitatif

Individu, kelompok dan masyarakat yang mengalami gangguan dan hambatan dalam menjalankan fungsi sosialnya.

2. Promotif/development

Ditujukan pada individu, kelompok dan masyarakat dalam rangka peningkatan taraf hidup (standart of living).

3. Proventif

Guna mencegah agar fungsi sosialnya tidak terganggu.

4. Supportif

Pelayanan yang diberikan untuk membantu usaha dalam bidang lain.

Menurut Wahyudin Sumpeno (2009: 3) kegiatan pendampingan dan pengorganisasian dilakukan dalam upaya mendorong partisipasi dan kemandirian masyarakat. Menurut Wahyudin Sumpeno dalam bukunya Menjadi Fasilitator Genius, secara khusus fungsi fasilitasi dalam aspek kegiatan sebagai berikut:

1. Menggali potensi dan kebutuhan

Melakukan proses analisis awal terhadap situasi dan kondisi masyarakat melalui observasi dan pengumpulan data.

## 2. Memecahkan masalah

Memberikan kemudahan belajar kepada masyarakat untuk meningkatkan kapasitas berfikir dan menghadapi perubahan serta kemampuan untuk memecahkan masalah.

## 3. Memosisikan peran dan tindakan

Masyarakat membutuhkan instruksi dan arahan tapi pendamping tetap memberikan peran kepada masyarakat untuk mengambil keputusan.

## 4. Kemandirian dan pengambilan keputusan

Masyarakat diberi ruang yang cukup untuk menentukan pilihan sejumlah alternatif dan menetapkan visi misinya kedepan (Wahyudin Sumpeno, 2009: 6-11).

Kegiatan pendampingan pada komunitas manapun bertalian erat dengan praktik pengorganisasian untuk menggalang sumber daya dan potensi rakyat dengan tujuan memperkuat atau memberdayakan sehingga mereka berkembang menjadi masyarakat yang sanggup mempertahankan dan membela harkat dan harga dirinya demi keadilan dan hak-hak asasi yang fundamental.

## d. Pelaksanaan Pengorganisasian

Dalam melakukan pengorganisasian masyarakat (Community Organizing) selalu berjalan berkesinambungan dengan pengembangan masyarakat (Community Development). Dalam pemberdayaan masyarakat 2 hal yang saling berkaitan yakni CD (*Community Development*) dan CO (*Community Organizing*).

a. Community Development (CD)

Pengembangan komunitas atau CD adalah pengembangan yang lebih mengutamakan sifat fisikal masyarakat. CD mengutamakan pembangunan dan perbaikan sarana-sarana sosial ekonomi masyarakat. Contohnya, pelatihan mengenai gizi, penyuluhan KB, pembangunan WC, jalan raya, bantuan hibah, bantuan peralatan sekolah, bantuan jaminan hidup dan sebagainya. Peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan penggalian potensi-potensi sosial ekonomi yang ada lebih diutamakan untuk mensukseskan target yang sudah ditetapkan oleh pihak tertentu (LSM, pemerintah dan pihak lainnya). Partisipasi dan usulan dari bawah pada umumnya kurang didengar, dan hanya sebatas persyaratan administrasi semata. Pihak yang didekati untuk memulai kegiatan CD itu antara lain elit masyarakat, aparat pemerintahan, dan pihak birokratis lainnya. CD biasanya bersifat jangka pendek, fisikal, dan kurang berdampak kepada keberlanjutan dan kesinambungan.

b. Community Orginizing (CO)

Pengorganisasian komunitas atau CO adalah pengembangan yang lebih mengutamakan pembangunan kesadaran kritis dan penggalian potensi pengetahuan lokal komunitas. CO mengutamakan pengembangan komunitas berdasarkan dialog atau musyawarah yang demokratis. Usulan komunitas merupakan sumber utama gagasan yang harus ditindaklanjuti secara kritis, sehingga partisipasi rakyat dalam

merencanakan, membuat keputusan dan melaksanakan program merupakan tonggak yang sangat penting. CO bergerak dengan cara menggalang masyarakat ke dalam suatu organisasi yang mampu menjangkau seluruh lapisan komunitas. Suara dan kepentingan rakyat lebih utama dari pada kepentingan kaum elit. CO juga memaklumi arti penting pembangunan sarana-sarana fisik yang dapat menunjang kemajuan komunitas, namun titik-tekan pembangunan itu ialah pengembangan kesadaran (*consciousness*) komunitas sehingga mampu mengelola potensi sumber daya mereka.

Secara umum, metode yang digunakan dalam pengorganisasian komunitas ialah penumbuhan kesadara kritis, partisipasi aktif, pendidikan berkelanjutan, pembentukan dan penguatan organisasi rakyat. Semua proses bertujuan untuk melakukan transformasi sistem sosial yang baik dan berdaya-guna tanpa ada tekanan dan unsur penindasan (*represif*). Tujuan pokok CO adalah membentuk suatu tatanan masyarakat yang beradab dan berkemanusiaan (*civil society*) yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis, adil, transparan, berkesehajaeraan ekonomis, politik dan budaya.

Menurut Wahyudi Sumpeno kunci keberhasilan dalam mendampingi dan mengorganisasi masyarakat terletak pada persiapan diri untuk terjun dan terlibat dalam berbagai aktivitas masyarakat (2009: 20). Sedangkan menurut Jo Hann Tan dan Roem Topatimasang, satu kunci keberhasilan proses pengorganisasian rakyat adalah

memfasilitasi mereka sampai akhirnya mereka dapat memiliki suatu pandangan dan pemahaman bersama mengenai keadaan dan masalah yang mereka hadapi ( 2004: 10).

## **2. Kajian Tentang Komunitas Waria**

### **a. Pengertian Komunitas dan Waria**

Menurut Larry Lyon (1987: 5), komunitas dirumuskan sebagai ”*komunitas adalah kelompok orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kepentigan bersama, saling berinteraksi satu dengan lainnya*”.

Menurut Denver (1991) komunitas adalah keseluruhan element masyarakat beserta kelembagaan yang ada didalamnya. Sedangkan menurut WHO (1974) komunitas adalah suatu pengelompokan sosial yang ditentukan oleh batas-batas geografi serta kesamaan nilai-nilai. Anggotanya saling mengenal dan berinteraksi. Komunitas berfungsi dalam struktur sosial tertentu serta menerapkan dan membentuk norma-norma tertentu.

Waria mengandung arti bahwa waria adalah pria yang bersifat dan bertingkah laku seperti wanita atau pria yang memiliki perasaan sebagai wanita atau dapat disebut wadam (hawa dan adam) yaitu orang benci (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005: 1269)

Pengertian waria atau wanita pria, atau dalam bahasa sehari-hari dikenal sebagai bencong adalah istilah bagi laki-laki yang menyerupai perilaku wanita. Dalam istilahnya waria adalah laki-laki yang berbusana

dan bertingkah laku sebagaimana layaknya wanita. Istilah ini awalnya muncul dari masyarakat Jawa Timur yang merupakan akronim dari “wanita tapi pria” pada tahun 1983-an paduan dari kata wanita pria.

Pada masyarakat Jawa Timur yang berkecimpung didunia seni *Warok* di Ponorogo, mereka dikenal amat sakti, jujur dan berani dan umumnya mereka memiliki beberapa ilmu yang menjadikan mereka sakti dan kebal dari senjata tajam. Agar dapat menjalankan ilmunya secara sempurna ada berbagai pengorbanan dan persyaratan yang harus dijalannya. Karena sering disebut sebagai pembawaan ilmu, setiap *warok* Ponorogo dipastikan memiliki geblak yang bertugas untuk membantu pekerjaan rumah *warok* hingga memberikan kebutuhan seksual sang *warok*. Kebutuhan seksual ini membuat warok selalu memilih geblakan lelaki muda yang berwajah cantik dan berkulit halus. Keadaan tersebut merupakan jalan keluar bagi setiap perguruan *warok* yang ingin mematangkan ilmunya karena larangan untuk menggauli perempuan. Perlakuan *warok* terhadap para geblak inilah yang dapat menjurus perilaku seksual geblak tersebut menjadi seorang waria, karena si *warok* sering kali memperlakukan geblakannya sebagaimana perempuan, baik dalam perilaku maupun dandanannya.

Menurut Kemala Atmojo ( 1986: 3 - 4) Banci, bencong, wadam, waria (wanita-pria) adalah beberapa sebutan yang biasa ditujukan untuk seorang laki-laki yang berdandan dan berperilaku sebagai wanita dan secara psikologis mereka merasa dirinya adalah seorang wanita.

Wadam (Wanita Adam atau Banci) orang yang mengalami kepuasan diri dengan cara bertingkah laku sebagai seorang yang berjenis kelamin lain dari jenis kelaminnya sendiri. Ada 2 jenis orang banci yaitu pertama banci yang eksibisionistik yaitu banci yang melakukan homo seksualitas dan yang kedua adalah banci yang tidak eksibisionistik yaitu banci yang tidak melakukan homoseksual (Suparlan dkk, 1983: 20).

Pendapat lain mengenai waria adalah kecenderungan seseorang yang tertarik dan menyukai sesama jenis. Waria juga diartikan sebagai individu-individu yang ikut serta dalam sebuah komunitas khusus yang para anggotanya memahami bahwa jenis kelamin sendiri itulah yang merupakan objek seksual yang paling menggairahkan (Pusat Informasi Psikologi).

Jadi kesimpulan yang dapat ditarik dari beberapa pendapat mengenai waria adalah seseorang yang memiliki ketertarikan untuk berpenampilan dan berperilaku seperti lawan jenisnya. Seorang laki-laki yang berdandan, berpenampilan dan berperilaku seperti seorang perempuan begitu juga sebaliknya. Komunitas waria adalah sebuah perkumpulan yang didalamnya anggotanya adalah para waria yang mempunyai nasib sama, saling mengenal dan saling berinteraksi dalam satu struktur sosial yang didalamnya terdapat norma-norma tertentu.

### **b. Motivasi Menjadi Waria**

Ismawan Nur Laksono (dalam Zunly Nadia, 2005: 39) mengatakan keinginan untuk menjadi perempuan pada waria bukan terletak pada cara berpakaian semata, tetapi juga pada sikap, perilaku dan penampilannya.

Keinginan ini relatif melekat dan berlangsung dengan sangat hebat dengan ciri-ciri kaum waria transeksual adalah sebagai berikut :

1. Identifikasi transeksual harus sudah menetap minimal 2 tahun dan merupakan gejala dari gangguan jiwa lain seperti skizofrenia atauberkaian dengan kelainan interseks, genetik atau kromosom.
2. Adanya hasrat untuk hidup dan diterima sebagai anggota dari lawanjenisnya, biasanya disertai perasaan risih dan ketidakserasan anatomitubunya
3. Adanya keinginan untuk mendapatkan terapi hormonal danpembedaan untuk membuat jenis kelamin yang diinginkan.

Bagi waria itu sendiri, apa yang menimpa mereka bukanlah sesuatu yang disebabkan faktor eksternal. Mereka lebih merasa bahwa apa yang terjadi pada dirinya adalah karena kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga sebagian besar mereka berpendapat bahwa transeksualisme sudah diperoleh semenjak dilahirkan (bakat). Bahkan, beberapa waria tegas-tegas tidak percaya kalau lingkungan bisa membentuk mereka menjadi transeksual (Kemala Atmaja, 1986: 52).

### c. Hubungan Waria dengan Masyarakat

Hidup sebagai waria adalah satu hasil akhir dari akumulasi konflik-konflik yang dialami semasa proses menjadi waria yang berlangsung dari masa anak-anak sampai dewasa. Namun demikian, hidup sebagai waria bukanlah suatu bentuk kehidupan yang tanpa kendala, karena tatanan sosial dan cultural belum sepenuhnya menempatkan waria sebagaimana

sejajar dengan jenis kelamin yang dibedakan secara diskrit, yakni laki-laki dan perempuan. Selama ini, waria dikonstruksikan oleh suatu tatanan sosial sebagai individu yang menyimpang. Dasar penyimpangan itu berakar dari suatu konteks dalam melihat jenis kelamin, yakni jenis kelamin yang dipandang secara biologis dan secara kultural.

Secara biologis, waria termasuk dalam kelamin laki-laki, namun mereka memiliki perilaku sebagaimana perempuan, dan mereka lebih suka menjadi perempuan. Akibat kondisi tersebut dunia waria memiliki dimensi kultural yang berbeda dengan laki-laki dan perempuan. Karena dua pandangan itu pula hidup sebagai waria banyak menghadapi kendala sosial dan kultural yang dialami oleh waria. Dalam kehidupan sosial, waria masih dipandang sebagai individu yang patologis sehingga ia perlu dikasihani disatu sisi, namun dicela di sisi lain. Kemudian secara kultural dunia waria juga belum sepenuhnya ditempatkan kedalam sistem pandangan dunia.

Didalam praktik kehidupannya sehari-hari, hidup sebagai waria berhadapan pula dengan persepsi-persepsi negatif sesama waria. Pertentangan ide dan pandangan antara waria yang berprofesi sebagai pelacur dengan waria yang telah mencapai sukses kerja, waria yang sukses dalam pekerjaannya mewakili kelas sosial yang lebih tinggi dibandingkan dengan waria yang bekerja disektor pelacuran. Disamping kendala-kendala yang tejadi dikehidupan antar waria, konteks keluarga juga menjadi bagian penting dalam permasalahan sorang waria. Persepsi orang tua tehadap

dunia waria lebih banyak dibingkai oleh dunia pelacuran jalan dan perilaku seks bebas sejenis. Selain itu, pemahaman agama didalam keluarga juga menjadi bagian tak terpisahkan dari ide-ide yang mendasari penolakan perilaku waria.

Didalam dunia kerja, tidak semua bidang pekerjaan dapat menerima kehadiran waria. Ada semacam ciri tertentu pada pekerjaan-pekerjaan yang dapat ditekuni oleh seorang waria secara total, artinya ketika didalam pekerjaan seorang waria tetap mempresentasikan dirinya sebagai seorang waria. Pekerjaan-pekerjaan tersebut seperti salon, berdagang dan beberapa jenis pekerjaan seni. Bagi mereka yang bekerja disektor ini hampir tidak mengalami hambatan apapun untuk tampil sebagai waria secara total.

Selain bagaimana lingkungan sosial menjadi satu konteks kendala bagi kehidupan waria, kedudukan penguasa pun memiliki arti sangat penting bagi dunia waria. Satu pandangan yang tertuang dalam Garis Kebijakan Departemen Sosial, yang memandang dunia waria sebagai satu dunia yang sepadan dengan dunia patologis, merupakan bukti bagaimana kebijakan-kebijakan justru bukan memberi tempat kepada waria, tetapi sebaliknya memandang dan mengucilkan mereka. Selain itu peraturan-peraturan daerah yang semakin memojokkan kehidupan kaum waria sebagai kaum yang termarjinalkan.

### **3. Kajian Tentang Hak Asasi Manusia**

#### **a. Pengertian Hak Asasi Manusia**

Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia merupakan anugerah dari Tuhan sejak manusia itu dilahirkan maka tidak seorangpun dapat mengambilnya atau melanggarinya. Kita harus menghargai anugerah ini dengan tidak membedakan manusia berdasarkan latar belakang, ras, etnik, agama, warna kulit, jenis kelamin, pekerjaan, budaya dan lain-lain. Namun perlu diingat bahwa dengan hak asasi manusia bukan berartin dapat berbuat semena-mena, karena manusia juga harus menghormati hak asasi manusia yang lain.

Menurut Teaching Human Rights yang diterbitkan oleh PBB, hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Hak hidup misalnya adalah klaim untuk memperoleh dan melakukan segala sesuatu yang dapat membuat seseorang tetap hidup, karena tanpa hak tersebut eksistensinya sebagai manusia akan hilang.

Menurut UU No.39 tahun 1999, HAM adalah Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dengan akal budi dan

nuraninya, manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perbuatannya. Disamping itu, untuk mengimbangi kebebasannya tersebut, manusia memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas semua tindakan yang dilakukannya. Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut Hak Asasi Manusia yang secara kodratnya melekat pada diri manusia sejak manusia lahir dalam kandungan yang membuat manusia sadar akan jati dirinya dan membuat manusia hidup bahagia. Setiap manusia dalam kenyataannya lahir dan hidup di masyarakat.

### **b. Jenis Hak Asasi Manusia**

Dalam Wikipedia ada 3 hak asasi manusia yang paling fundamental (pokok), yaitu :

- a. Hak Hidup (*life*)
- b. Hak Kebebasan (*liberty*)
- c. Hak Memiliki (*property*)

ketiga hak tersebut merupakan hak yang fundamental dalam kehidupan sehari-hari. Adapun macam-macam hak asasi manusia dapat digolongkan sebagai berikut :

- 1) Hak asasi pribadi, yaitu hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan pribadi manusia. Contohnya : hak beragama, hak menentukan jalan hidup, dan hak bicaara.
- 2) Hak asasi politik, yaitu yang berhubungan dengan kehidupan politik. Contohnya : hak mengeluarkan pendapat, ikut serta dalam pemilu, berorganisasi.

- 3) Hak asasi ekonomi, yaitu hak yang berhubungan dengan kegiatan perekonomian. Contohnya : hak memiliki barang, menjual barang, mendirikan perusahaan/berdagang, dan lain-lain.
  - 4) Hak asasi budaya, yaitu hak yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Contohnya : hak mendapat pendidikan, hak mendapat pekerjaan, hak mengembangkan seni budaya, dan lain-lain.
  - 5) Hak kesamaan kedudukan dalam hukum dah pemerintahan, yaitu hak yang berkaitan dengan kehidupan hukum dan pemerintahan. Contohnya : hak mendapat perlindungan hukum, hak membela agama, hak menjadi pejabat pemerintah, hak untuk diperlakukan secara adil, dan lain-lain.
  - 6) Hak untuk diperlakukan sama dalam tata cara pengadilan. Contohnya : dalam penyelidikan, dalam penahanan, dalam penyitaan, dan lain-lain
- Dalam perkembangan sejarah tampak hak asasi manusia memperoleh makna dan berkembang setelah kehidupan masyarakat semakin berkembang khususnya setelah terbentuk negara. Kenyataan tersebut mengakibatkan munculnya kesadaran akan perlunya hak asasi manusia dipertahankan terhadap bahaya-bahaya yang timbul akibat adanya negara. Didalam suatu negara pun, manusia memiliki hak-hak dasar atau hak asasi manusia yang diakui negara sebagai hak warga negara yang dimiliki oleh setiap warga negara. Seperti halnya dengan hak asasi manusia, hak warga negara juga dimiliki oleh setiap warga negara dan tidak dapat diganggu dan dilanggar oleh warga negara yang lain. Setiap

orang harus menghormati hak-hak sebagai warga negara yang dimiliki oleh setiap warga negara.

**c. Hak dan Kewajiban Waria sebagai Warga Negara**

**1) Hak sebagai seorang warga negara menurut Undang-undang Dasar 1945**

- a. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak : “Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” (pasal 27 ayat 2).
- b. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” (pasal 28A).
- c. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (pasal 28B ayat 1).
- d. Hak atas kelangsungan hidup. “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang”
- e. Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. (pasal 28C ayat 1)
- f. Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. (pasal 28C ayat 2).

- g. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum (pasal 28D ayat 1).
- h. Hak untuk mempunyai hak milik pribadi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani,hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (pasal 28I ayat 1).

**2) Kewajiban waria sebagai seorang warga negara menurut Undang-undang Dasar 1945**

- a. Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi: “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.
- b. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 menyatakan: “setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara”.
- c. Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1 mengatakan: “setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain”.
- d. Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28J ayat 2 menyatakan: “dalam menjalankan hak

dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

- e. Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.  
Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”.

Menurut Perkumpulan Keluarga Berencana (PKBI) DIY hak asasi yang dimiliki oleh waria dan pantas untuk diperjuangkan khususnya adalah hak-hak sebagai warga negara yang bertempat tinggal diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945.

#### **4. Kajian Tentang Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia**

Sebuah lembaga non pemerintah yang bergerak dalam bidang sosial. Perkumpulan ini berdiri dilandasi kepedulian terhadap keselamatan ibu dan anak. Gagasan ini muncul, karena para pendiri perkumpulan yaitu Dr.R Soeharto bersama kawan-kawannya pada saat itu (1957) melihat angka kematian ibu dan anak sangat tinggi. Kematian ibu cukup tinggi, pada umumnya karena pendarahan akibat seringnya melahirkan dan kematian juga tinggi antara lain karena proses kelahiran bayi yang kurang sehat dari akibat

kehamilan yang tidak sehat, kekurangan gizi dan kurangnya perawatan pada masa kehamilan. Untuk merealisasikan cita-cita yang luhur itu maka para pendiri perkumpulan sepakat untuk mendirikan satu lembaga dengan nama Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia.

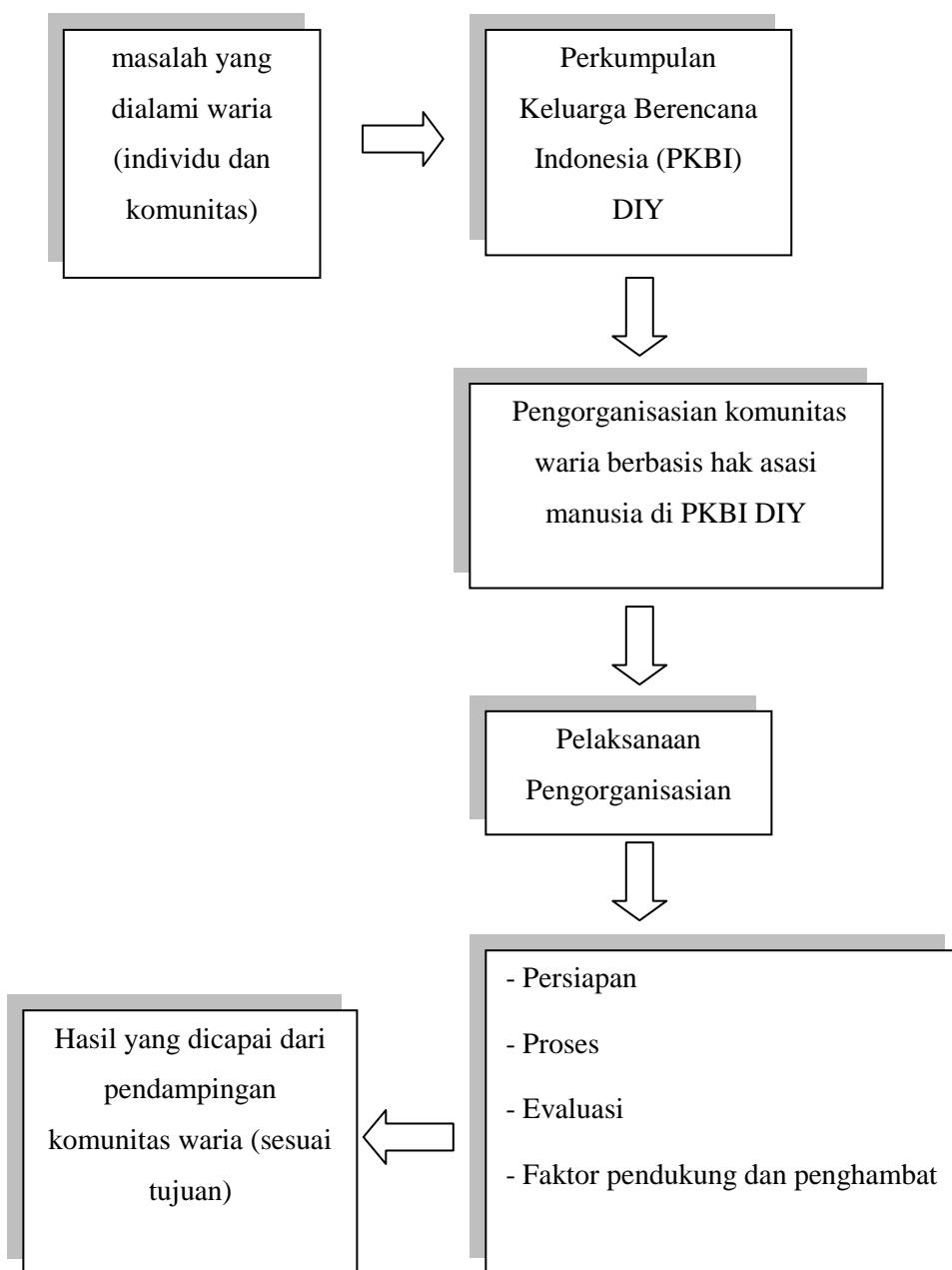
Kemudian pada tahun 1967 PKBI menjadi anggota Federasi Keluarga Berencana Internasional yaitu IPF (*International Planned Parenthood Federation*) yang berkantor pusat di London. PKBI juga mengembangkan program baik remaja maupun pasangan suami istri dan perempuan yang belum menikah. Setelah itu berkembang lagi dengan menjangkau komunitas seperti waria, gay, pembantu rumah tangga, pekerja seks, buruh gendong, tukang becak.

Organisasi non pemerintah bukan menjadi bagian pemerintah, birokrasi ataupun negara. Maka secara garis besar organisasi non pemerintah memiliki cirri sebagai berikut:

1. Organisasi non pemerintah bukan bagian dari pemerintah, birokrasi maupun negara.
2. Kegiatan dilakukan untuk kepentingan masyarakat umum, tidak hanya untuk kepentingan para anggota seperti yang dilakukan koperasi maupun organisasi profesi.
3. Dalam melakukan kegiatan tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan.

## B. Kerangka Berpikir

Penelitian ini dikembangkan dengan bagan kerangka berfikir sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Berpikir

Berdasarkan bagan kerangka berfikir diatas, maka penjelasan kerangka berfikir tersebut adalah sebagai berikut:

1. Masalah yang selalu dialami waria baik yang menyangkut masalah pribadi seperti kesehatan reproduksi, penyakit HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya sampai pada masalah mereka terhadap sosial tempat tinggal mereka. Masalah penolakan oleh keluarga mereka sendiri yang sangat menjadi beban mereka sampai pada penyalakan masyarakat tempat tinggal mereka dan bahkan lebih dari itu bentuk kekerasan, pelecehan seksual sampai pelecehan harga diri dan martabat sebagai makhluk hidup yang sering mereka alami. Hak-hak dasar sebagai manusia yang mereka miliki kerap dilanggar oleh orang lain dan itu perlu untuk diperjuangkan.
2. Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) DIY sebagai suatu organisasi non pemerintah yang berdiri karena dilandasi kepedulian terhadap kesehatan ibu dan anak serta berkembang menangani masalah-masalah kesejahteraan social yang lain. Visi PKBI DIY adalah terwujudnya masyarakat yang dapat memenuhi kesehatan reproduksi (kespro) dan seksual serta hak-hak kespro dan seksual yang berkesetaraan dan berkeadilan gender. Misi PKBI DIY adalah (1) memberdayakan anak dan remaja agar mampu mengambil keputusan dan berperilaku yang bertanggungjawab dalam hal kespro dan seksual serta hak-hak kespro dan seksual. (2) mendorong partisipasi masyarakat terutama masyarakat miskin dan marginal yang tidak terlayani untuk memperoleh akses informasi, pelayanan dan hak-hak kespro dan seksual yang berkualitas serta berkesetaraan gender. (3) berperan aktif

mengurangi prevalensi IMS dan menanggulangi HIV & AIDS serta mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap orang yang terinfeksi HIV dan orang dengan status AIDS. (4) memperjuangkan hak-hak kespro perempuan diaui dan dihargai terutama berkaitan dengan berbagai alternatif penanganan KTD. (5) mendapatkan dukungan dari pengambil kebijakan, *stake holder*, media dan masyarakat terhadap program kespro dan seksual serta hak-hak kespro dan seksual. (6) mempertahankan peran PKBI sebagai LSM pelopor, professional, kredibel, berkelanjutan dan mandiri dalam bidang kespro dan seksual dengan dukungan relawan dan staf yang professional.

3. Untuk menangani masalah tentang masalah kespro dan seksual yang berkesetaraan dan berkeadilan gender, PKBI memiliki beberapa program diantaranya yaitu program pendampingan dan perorganisasian komunitas yang dilakukan dalam proses hearing, audiensi dan lobby. PKBI berusaha menjadi fasilitator dan dinamisator untuk memperjuangkan kebijakan penanggulangan IMS, HIV dan AIDS yang merupakan kebutuhan baik komunitas maupun individual yang diabaikan oleh negara. Didalam pelaksanaannya terdapat faktor penghambat dan faktor pendorong yang mempengaruhi dalam proses pelaksanaan dan hasil yang ingin dicapai.
4. Dalam pelaksanaan pendampingan dan pengorganisasian komunitas waria tersebut akhirnya mereka bisa hidup dengan layak dan berdampingan secara apik dan bersosialisasi dengan masyarakat serta hak-hak dasar yang mereka miliki sebagai manusia dapat dihargai dan diakui oleh manusia yang lain.

Dalam hidup bernegara, mereka memiliki hak dasar sebagai warga negara yang tentunya mereka berhak mendapatkannya dari pemerintah.

### C. Pertanyaan Penelitian

Untuk mengarahkan penelitian yang dilaksanakan agar dapat memperoleh hasil yang optimal, maka perlu adanya pertanyaan penelitian antara lain:

1. Bagaimakah pengorganisasian komunitas waria berbasis hak asasi manusia yang dilaksanakan di Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) DIY?
2. Bagaimakah hasil yang dicapai dari pengorganisasian komunitas waria berbasis hak asasi manusia di Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) DIY tersebut?
3. Apa saja faktor pendukung dalam pelaksanaan pengorganisasian komunitas waria berbasis hak asasi manusia di Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) DIY?
4. Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan pengorganisasian komunitas waria berbasis hak asasi manusia di Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) DIY?

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Penelitian tentang Pengorganisasian Komunitas Waria Berbasis Hak Asasi Manusia di Persatuan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) DIY menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan didapat dari orang-orang atau perilaku yang diamati (Moleong, 2011: 4). Sukardi (2006: 12) menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif mengutamakan validitas yang pada umumnya mencakup pengamatan, mendengarkan pembicaraan atau pikiran mereka, dan melihat catatan dokumen mereka. Menurut Sugiyono (2011: 9) menulis sebagai berikut: metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Sesuai dengan kondisi di lapangan, peneliti lebih cenderung pada pendapat Moleong dan Sugiono karena penelitian kualitatif adalah peneliti sebagai instrumen peneliti, yang menghasilkan data diskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan, yang dihasilkan dari kegiatan pengamatan, mendengarkan pembicaraan atau pikiran yang diamati, dan melihat catatan dokumen yang diamati, dengan pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, yang

mengutamakan validitas serta penelitiannya lebih menekankan makna pada penelitian tersebut.

## **B. Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian mengenai Pengorganisasian Komunitas Waria Berbasis Hak Asasi Manusia di Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) DIY dengan alamat Jl. Taman Siswa Gang Basuki, Surokarsan MG/II 560 Yogyakarta.

Pemilihan tempat ini dengan pertimbangan bahwa:

1. PKBI DIY adalah lembaga non pemerintah yang peduli terhadap masalah yang dialami suatu komunitas khususnya komunitas waria.
2. Lokasi PKBI DIY mudah dijangkau oleh peneliti.
3. Para pengurus dan pengelola PKBI DIY sangat baik dan ramah dan terbuka sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan informasi atau data penelitian.

Pengambilan data akan dilaksanakan mulai bulan Februari sampai dengan bulan Mei 2013. Tahap-tahap yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Tahap pengumpulan data awal yaitu melakukan observasi awal untuk mengetahui susasana tempat, wawancara informal dengan pihak pengelola PKBI DIY.
2. Tahap penyusunan proposal. Dalam tahap ini dilakukan penyusunan proposal dari data-data yang telah dikumpulkan melalui tahap penyusunan data awal.
3. Tahap perijinan. Pada tahap ini dilakukan pengurusan ijin untuk penelitian ke PKBI DIY.

4. Tahap pengumpulan data dan analisis data. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan terhadap data-data yang sudah didapat dan dilakukan analisis data untuk pengorganisasian data , tabulasi data, presentasi data, interpretasi data dan penyimpulan data.
5. Tahap penyusunan laporan. Tahapan ini dilakukan untuk menyusun seluruh data dari hasil penelitian yang didapat dan selanjutnya disusun sebagai laporan pelaksanaan penelitian.

### **C. Sumber Data Penelitian**

Sumber penelitian adalah tempat, peristiwa, orang yang menjadi subjek penelitian. Subjek penelitian diperlukan sebagai pemberi keterangan mengenai data-data dan informasi-informasi yang menjadi sasaran penelitian. Yang menjadi subjek penelitian dalam penelitian Pengorganisasian Komunitas Waria di Persatuan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) DIY adalah pengelola PKBI DIY, Koordinator dan Relawan Divisi Pengorganisasian Waria, Ketua Komunitas Waria dan para waria. Maksud dari pemilihan subjek ini adalah untuk mendapatkan sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber sehingga data yang diperoleh diakui kebenarannya.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif meliputi teknik wawancara, observasi dan studi dokumentasi.

## 1. Wawancara

Untuk mencari suatu jawaban dalam penelitian, seorang peneliti harus mencari jawaban dengan beberapa cara, dan salah satunya yaitu dengan wawancara kepada narasumber yang berkaitan dengan penelitian. Wawancara tidak tersusun secara terstruktur menurut Sugiono (2011: 140) adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Wawancara menurut Moleong (2011: 186) adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan ini dilakukan dengan dua pihak, meliputi pewawancara yaitu orang yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yaitu orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan oleh pewawancara. Sedangkan wawancara menurut Sukardi (2006: 145) adalah proses bertemu muka antara peneliti dan responden yang direncanakan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan oleh peneliti.

Dengan melihat beberapa uraian di atas dapat dijelaskan bahwa wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara, seorang peneliti memberikan pertanyaan kepada narasumber, yang pertanyaan tersebut berkaitan dengan bahan penelitian, dengan harapan peneliti mendapatkan informasi yang dibutuhkannya. Wawancara dilakukan kepada narasumber yang meliputi pengelola PKBI DIY, Koordinator dan Relawan Divisi Pengorganisasian Waria, Ketua Komunitas Waria, dan para waria.

## 2. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpul data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik wawancara dan kuisioner. Dalam hal observasi penelitian kualitatif, menurut Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2011: 145) menyatakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Menurut Sukardi (2006: 166) seorang peneliti harus melakukan studi secara intensif melalui observasi dengan tujuan untuk mendapatkan atau mengetahui dan menganalisis secara intensif beragam fenomena dalam rangka untuk menarik kesimpulan. Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data obserfasi menurut Sugiyono (2011: 145-146) dibagi menjadi dua yang meliputi:

### a. Observasi Berperan serta (*Participat Observation* )

Dalam obserfasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.

### b. Observasi *Nonpartisipan*

Dalam observasi *nonpartisipan* seorang peneliti tidak terlibat dengan kegiatan sehari - hari orang yang sedang diamati, jadiseorang peneliti hanya sebagai pengamat orang yang sedang diamati.

Melihat beberapa uraian di atas dapat dijelaskan bahwa observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati data observasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi non partisipan karena cara observasi yang dimaksudkan disini adalah peneliti tidak ikut berpartisipasi secara

langsung dalam pelaksanaan pengorganisasian komunitas waria berbasis hak asasi manusia di Perkumpulan Keluarga Berencana (PKBI) DIY. Tetapi, peneliti melakukan observasi tentang pelaksanaan kegiatan pengorganisasian komunitas waria berbasis hak asasi manusia di Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) DIY.

### 3. Studi Dokumentasi

Studi Dokumentasi adalah teknik pengambilan data dengan merekam atau mengambil gambar (foto), atau dengan audio visual, yang dilakukan pada saat proses penelitian dilaksanakan. Foto dan audio visual menghasilkan data diskriptif yang cukup berharga dan dapat digunakan untuk menelaah segi-segi subyektif dan hasilnya dapat dianalisis secara induktif (Moleong, 2011: 160).

Menurut Sugiyono (2011: 138) dalam pengambilan data akan lebih baik apabila peneliti menggunakan alat bantu untuk mempermudah dan membantu dalam penelitiannya, alat yang dapat digunakan yaitu seperti tape recorder, kamera (foto) dan audio visual yang sangat berguna untuk pelaksanaan pengambilan data pada saat penelitian dilaksanakan. Sedangkan Sukardi (2006:128) menjelaskan bahwa audio dan video recorder merupakan alat pengumpul data yang mampu menangkap interaksi ucapan dan perkataan responden dengan teliti dan lengkap, dan apabila dapat dioperasionalkan dengan hati-hati dan benar, maka alat ini menjadi alat pengumpul data yang sangat penting dan dapat membantu dalam penelitian pada saat pengambilan data dilaksanakan. Dengan melihat beberapa uraian di atas dapat dijelaskan bahwa studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara merekam atau

mengabadikan penelitian dengan mempergunakan alat bantu seperti tape recorder, kamera dan audio visual dengan tujuan untuk mempermudah dan memperjelas data penelitian.

Studi dokumentasi dalam penelitian ini berhubungan dengan masalah penelitian untuk melengkapi data primer yang diperoleh dari hasil wawancara. Studi dokumentasi ini diambil dari data-data, catatan, gambar serta arsip yang berhubungan dengan pengorganisasian komunitas waria berbasis hak asasi manusia di Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) DIY. Studi dokumentasi ini dilaksanakan pada saat proses pembelajaran sedang berlangsung, yaitu dengan cara peneliti mengambil foto atau merekam proses pendampingan, yang dari hasil pengambilan data tersebut diharapkan dapat membantu dalam proses penelitian. Pengambilan foto dan audio visual menggunakan foto dan audio visual digital dengan tujuan, hasil penelitian dapat ditransfer atau dicopy di computer sehingga mempermudah peneliti untuk meneliti hasil penelitian. Apabila hasil penelitian telah dimasukan ke dalam komputer, maka foto dan audio visual digital kemudian dikosongkan kembali dan disiapkan untuk pengambilan foto dan audio visual penelitian berikutnya.

**Tabel 1. Teknik Pengumpulan Data**

No	Aspek	Sumber Data	Teknik
1.	Aspek fisik seperti gedung, arsip dan fasilitas	Pengelola	Dokumentasi dan observasi

No.	Aspek	Sumber Data	Teknik
2.	Pengorganisasian komunitas waria berbasis hak asasi manusia di PKBI DIY	Pengelola, kadiv waria, relawan , Ketua Komunitas waria, waria	Observasi, wawancara, dokumentasi
3.	Faktor Pendukung dan Penghambat pelaksanaan pengorganisasian	Pengelola, kadiv waria, relawan	Wawancara dan observasi

## E. Instrumen Penelitian

Penelitian kualitatif, yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri atau *human instrument*, yang berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya. Dalam hal instrument penelitian kualitatif, menurut Nasution dalam Sugiyono (2011: 223) menyatakan:

“Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain dari pada menjadikan manusia sebagai instrument peneliti utama. Alasannya ialah bahwa, segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satunya yang dapat mencapainya”.

Menurut Moleong (2011: 9) menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama. Peneliti sebagai instrument peneliti berfungsi dalam mengambil inisiatif yang berhubungan dengan penelitian. Inisiatif ini meliputi pencarian data, pembuat pertanyaan untuk tanya wawancara dan sebagai pengolah data. Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif instrument utamanya adalah peneliti itu sendiri.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Data penelitian kualitatif diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan yang bermacam-macam, data yang diperoleh pada umumnya adalah data kualitatif, sehingga teknik analisis data yang digunakan harus jelas dan sesuai dengan penelitian yang sedang dilakukan, dalam penelitian kualitatif pengolah data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yang digunakan dengan tujuan mendeskripsikan tentang data yang sedang dianalisis (Sugiyono, 2011: 243-245).

Teknik analisis data penelitian kualitatif, menurut Bogdan dalam Sugiyono (2011: 244) menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Teknik analisis data penelitian kualitatif, menurut Seiddel (1998) dalam Moleong (2011: 248) menyatakan bahwa teknik analisis data kualitatif meliputi berbagai macam kegiatan yang kegiatan tersebut meliputi :

“Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, kemudian data diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesiskan, membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya. Berpikir dengan jalan memebuat agar katagori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum”.

Melihat beberapa uraian di atas dapat dijelaskan bahwa teknik analisis data adalah proses menyusun dan menganalisis hasil wawancara, catatan lapangan, serta bahan-bahan lain, dengan tujuan peneliti dapat mengolah data dengan cara memilah-milahkan dan mangklasifikasikan data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yang digunakan dengan tujuan mendeskripsikan data yang sedang dianalisis.

Analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah mengacu pada konsep analitik Milles dan Huberman (1992: 16-20) tentang interaktif model yang menghasilkan analisa data kedalam tahapan-tahapan sebagai berikut:

### 1. Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua aspek yaitu deskripsi dan refleksi.

### 2. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemuatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstarakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan.

### 3. Penyajian Data

Merupakan hasil reduksi data yang disajikan dalam laporan secara sistematik yang mudah dibaca atau dipahami baik sebagai keseluruhan maupun bagian-bagiannya dalam konteks sebagai satu kesatuan.

### 4. Penarikan Kesimpulan

Merupakan tahapan dimana peneliti harus memaknai data yang terkumpul kemudian dibuat dalam bentuk pernyataan singkat dan mudah dipahami dengan mengacu pada masalah yang diteliti.

## G. Teknik Keabsahan Data

Penelitian kualitatif dalam uji keabsahan data meliputi uji validitas internal, validitas eksternal, reliabilitas, dan obyektivitas namun yang paling penting dalam penelitian kualitatif adalah uji kredibilitas. Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat dan *member check* (Sugiyono, 2011: 269-270).

Teknik pengujian keabsahan data menurut Moleong (2011: 324) menjelaskan bahwa untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan yang didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu, yang meliputi derajat kepercayaan, keteralihan, kebergantungan dan kepastian. Teknik pengujian keabsahan data menurut Sukardi (2006: 72-80) menjelaskan bahwa dalam analisis data sumber-sumber yang umum berupa catatan, kegiatan koding (pemberian kode), dan dokumen perlu dicermati untuk mendapatkan hubungan atau keterkaitan, sehingga dapat diarahkan sampai pada tingkat menarik kesimpulan.

Penjelasan dari rangkuman di atas menyatakan, bahwa teknik pengujian keabsahan data adalah proses pengujian keabsahan data dengan melihat atau meneliti data yang telah dianalisis, selain itu peneliti dapat melakukan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat dan *member check*, sehingga peneliti dapat menemukan hubungan atau keterkaitan data yang dapat diarahkan pada tingkat menarik sebuah kesimpulan, yang mempunyai drajt kepercayaan (*credibility*) dan kepastian (*confirmability*) dalam penelitian.

Sebelum peneliti melakukan pengujian keabsahan data, peneliti melakukan teknik analisis data, yaitu dengan cara data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan studi dokumentasi, diurutkan dan disusun sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah data deskriptif yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Dalam penelitian ini triangulasi data dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek informasi atau data yang diperoleh dari:

1. Wawancara dengan hasil observasi, demikian pula sebaliknya.
2. Membandingkan apa saja yg dikatakan pengelola PKBI DIY, Koordinator dan Relawan Divisi Pengorganisasian Waria, Ketua Komunitas Waria dan para waria.
3. Membandingkan hasil observasi, wawancara dan studi dokumentasi yang berkaitan dengan topik masalah.
4. Melakukan pengecekan data dengan pihak pengelola PKBI DIY.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Deskripsi Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) DIY**

###### **a. Lokasi dan keadaan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) DIY**

PKBI tingkat provinsi berlokasi di Jl.Tentara Rakyat Mataram Gang Kapas JTI/705 Badran, Yogyakarta. Sedangkan cabangnya ada di Youth Center PKBI di Jalan Taman Siswa Gang Basuki, Sukorasam MG/II 560, Yogyakarta. Di setiap kabupaten juga terdapat cabang PKBI seperti PKBI Cabang Kota Yogyakarta, PKBI Cabang Sleman, PKBI Cabang Kulon Progo, PKBI Cabang Bantul, PKBI Cabang Gunung Kidul. Setiap cabang per kabupaten harus melakukan koordinasi program dengan PKBI di Youth Centre.



*Gambar 2. PKBI DIY Badran*



*Gambar 3. Youth Center PKBI DIY*

**b. Sejarah singkat berdirinya Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) DIY**

Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) didirikan pada tanggal 23 Desember 1957 di Jakarta, sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Perkumpulan ini berdiri dilandasi kepedulian terhadap keselamatan ibu dan anak. Gagasan ini muncul, karena para pendiri perkumpulan yaitu Dr. R Soeharto (dokter pribadi Bung Karno) bersama kawan-kawannya pada saat itu (1957) melihat angka kematian ibu dan anak sangat tinggi.

Kematian ibu cukup tinggi, pada umumnya karena pendarahan akibat seringnya melahirkan dan kematian anak juga tinggi antara lain karena proses kelahiran bayi yang kurang sehat dari akibat kehamilan yang tidak sehat, kekurangan gizi dan kurangnya perawatan pada masa kehamilan. Untuk merealisasikan cita-cita yang luhur itu maka para pendiri perkumpulan sepakat mendirikan suatu Lembaga Swadaya

Masyarakat dengan nama Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI).

Kemudian pada tahun 1967 PKBI menjadi anggota Federasi Keluarga Berencana Internasional yaitu IPPF (International Planned Parenthood Federation) yang berkantor pusat di London. Tahun ini juga merupakan tahun berdirinya PKBI Propinsi DIY. Awalnya PKBI DIY hanya sebagai tempat pelatihan dari PKBI pusat tetapi dalam perkembangannya PKBI DIY mampu mengembangkan program baik remaja maupun para suami/istri, dan perempuan yang belum menikah. Setelah itu berkembang lagi dengan menjangkau komunitas seperti waria, gay, pembantu rumah tangga, pekerja seks, buruh gendong, tukang becak

**c. Visi dan Misi Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI)  
DIY**

**Visi:**

Terwujudnya masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhan Kesehatan Reproduksi (Kespro) dan Seksual serta hak-hak Kespro dan Seksual yang berkesetaraan dan berkeadilan gender

**Misi:**

1. Memberdayakan anak dan remaja agar mampu mengambil keputusan dan berperilaku bertanggungjawab dalam hal Kespro dan Seksual serta hak-hak Kespro dan Seksual.
2. Mendorong partisipasi masyarakat, terutama masyarakat miskin, marginal, tidak terlayani, untuk memperoleh akses, informasi,

pelayanan, dan hak-hak Kespro dan Seksual yang berkualitas serta berkesetaraan dan berkeadilan jender.

3. Berperan aktif dalam mengurangi prevalensi IMS dan menanggulangi HIV/AIDS, serta mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap ODHA dan OHIDA.
4. Memperjuangkan agar hak-hak reproduksi dan seksual perempuan diakui dan dihargai terutama berkaitan dengan berbagai alternatif penanganan kehamilan tidak diinginkan.
5. Mendapatkan dukungan dari pengambil kebijakan, stakeholder, media dan masyarakat terhadap program Kespro dan Seksual.
6. Mempertahankan peran PKBI sebagai LSM pelopor, profesional, kredibel, berkelanjutan dan mandiri dalam bidang Kespro dan Seksual serta hak-hak Kespro dan Seksual dengan dukungan relawan dan staf yang profesional.

**d. Fasilitas Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) DIY.**

Perkumpulan keluarga Berencana Indonesia (PKBI) DIY memiliki berbagai fasilitas dalam mendukung setiap program kerja yang diselenggarakan. Fasilitas yang ada antara lain yaitu gedung sekretariat (kantor), perpustakaan dengan buku berbagai jenis. Fasilitas yang ada di gedung sekretariat (kantor) Youth Centre PKBI terdiri dari ruang kerja dan komputer, klinik kespro remaja, ruang tamu, perpustakaan, dapur, gudang, kamar mandi, gazebo dan tempat parkir. Gazebo adalah bangunan

yang digunakan biasanya untuk pertemuan-pertemuan dan bagunan ini baru diresmikan beberapa bulan yang lalu.



*Gambar 4. Gazebo Youth Centre PKBI DIY*

Fasilitas pendukung lainnya yaitu televisi, telepon fax, telepon kantor, wifi (akses internet), komputer, printer, kipas angin, jam, dispenser, papan tulis, lemari buku, meja, kursi, buku-buku, alat tulis, perlengkapan dapur dan alat kebersihan.

**Tabel 2. Fasilitas yang ada di Youth Centre PKBI DIY**

No.	Fasilitas	Keterangan
1.	Tanah dan Gedung	Milik PKBI DIY
2.	Televisi, komputer, wifi	Milik PKBI DIY
3.	Jam, printer, telfon, fax, kipas	Milik PKBI DIY
4.	Alat tulis, buku-buku, rak buku	Milik PKBI DIY

No	Fasilitas	Keterangan
5.	Meja, kursi, papan tulis	Milik PKBI DIY
6.	Perlengkapan dapur, alat kebersihan. Perlengkapan kamar mandi	Milik PKBI DIY

Sumber: PKBI DIY

**e. Tenaga pengurus Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) DIY.**

Dibawah ini daftar tenaga karyawan atau staff yang ada di Youth Center PKBI DIY dilihat dari jabatan, pendidikan terakhir, usia dan jenis kelamin.

**Tabel 3. Tenaga Staff dan Karyawan di Youth Centre PKBI**

No.	Nama	Jabatan
1.	GT	Manajer Program Youth Center
2.	MY	Staff Keuangan Youth Center
3.	PJ	Staff Kerumahtanggan
4.	SL	Front Office
5.	SS	Koor. PSS
6.	PTFK	Koor. Divisi Penelitian dan Penerbitan
7.	RH	Koor. Divisi Perpustakaan
8.	SB	Koor. PPK
9.	FSC	Koor. Divisi Pengorg.Komunitas Gay
10.	AAN	Koor. Divisi Pengorg.Komunitas Waria

No	Nama	Jabatan
11.	AG	Koor. Divisi Pengorg.Komunitas Remaja Jalanan
12.	AGN	Koor. Divisi Pengorg.Komunitas Pekerja Seks
13.	MW	Koor. PPMP
14.	AAMO	Koor. Divisi Media
15.	MR	Koor. Divisi Diklat
16.	AAAA	Koor. Divisi Radio dan TV
17.	FPK	Koor. Lensa
18.	DI	Koor. Divisi Pengorg.Remaja Sekolah SMA
19.	APD	Koor. Divisi Pengorg.Komunitas Desa
20.	FIP	Koor. Divisi Konseling (Struktur ini sekarang diganti dengan “Konselor Remaja”)
21.	NWI	Koor. Divisi Pengorg.Remaja Sekolah SMP

Sumber: Data Primer PKBI DIY 2013

**f. Program Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) DIY.**

**1) Youth Centre**

Program ini dimulai pada tahun 2005 dengan melakukan program pendampingan untuk komunitas waria, pekerja seks, gay, remaja jalanan, remaja sekolah serta remaja kota dan desa. Dalam hal ini program pendampingan diatas diubah menjadi pengorganisasian, lebih aktif diarahkan pada kebijakan-kebijakan untuk memberikan hak pada komunitas. Program yang tergabung dalam Youth Centre antara lain:

a. Program Pengorganisasian Komunitas

Program ini merupakan program intervensi untuk pencegahan IMS, HIV dan AIDS. Sasaran program ini adalah komunitas gay, waria, pekerja seks laki-laki dan perempuan, remaja jalanan dari segala rentan usia, rendahnya akses terhadap informasi serta layanan kesehatan reproduksi dan seksual, serta subordinasi karena status gender, orientasi seksual dan pekerjaan. Dalam proses hearing, audiensi maupun lobby, komunitas selalu terlibat aktif untuk memperjuangkan kebijakan penanggulangan IMS, HIV dan AIDS di DIY karena apa yang diperjuangkan oleh PKBI DIY sebenarnya merupakan kebutuhan-kebutuhan komunitas yang selama ini diabaikan oleh negara.

b. Lentera Sahaja

Adalah program pencegahan dan perlindungan HIV dan AIDS, IMS dan KTD untuk remaja sekolah, kota dan desa. Sasaran program ini adalah remaja berusia 10-24 tahun yang rentan karena perilaku seksual berganti-ganti pasangan dan tidak menggunakan kondom, rendahnya akses terhadap pelayanan dan informasi kesehatan reproduksi/seksual dan subordinasi karena status sosial dan ekonomi. Proses hearing, audiensi dan lobbying yang dilakukan dalam upaya membangun jaringan yang bertujuan untuk membantu dalam

proses advokasi sudah dilaksanakan dengan fraksi-fraksi di DPRD dan Dinas Pendidikan dan Lembaga Agama untuk memperjuangkan agar pendidikan kesehatan reproduksi bisa diberikan disekolah. Program ini terdiri dari Divisi Konseling, Divisi Pengorganisasian Remaja Sekolah, dan Divisi Pengorganisasian Remaja Perkotaan dan Remaja Desa.

c. Pengembangan Media dan Pelatihan (PMP)

Merupakan program yang melakukan kerja-kerja kampanye, pendidikan, dan pelatihan. Kampanye dilakukan melalui talkshow, show rutin diRadio dan Televisi lokal. Leaflet, Booklet, Poster, Stiker, ILM dalam bentuk audio dan audio visual mengenai isu yang sedang diperjuangkan oleh PKBI DIY. Kerja pendidikan dan pelatihan dilakukan melalui ceramah dan pelatihan yang bertujuan untuk peningkatan pengetahuan dan kapasitas internal dan eksternal. Pelatihan dan ceramah didukung oleh fasilitator fasilitator yang ahli dalam bidang Advokasi, Kesehatan Reproduksi dan Seksual, Gender, HIV dan AIDS, dan pengorganisasian. Kampanye juga dilakukan dengan memanfaatkan moment-moment tertentu seperti malam renungan AIDS Nusantara, Internasional Youth Day, Internasional Day Againts Homophobia, Kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan (Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Hari AIDS Sedunia, dan Hari HAM

Sedunia). Program ini terdiri dari Divisi Media, Divisi Radio dan Tv, serta Divisi Pendidikan dan Pelatihan.

d. Pusat Study Seksualitas (PSS)

Ini merupakan program yang melakukan kerja-kerja riset dan data base PKBI DIY. Awalnya PSS menjadi ruang “pendalaman wacana” melalui diskusi-diskusi intrnal dan pengalaman PKBI DIY dalam perjuangan hak kesehatan reproduksi dan seksual yang berkeadilan gender. Dari wadah ini lah kemudian lahir PSS pada tahun 2000. Kemudian berdasarkan hasil refleksi pada tahun 2005, PSS diarahkan tidak saja untuk pengembangan wacana , tetapi lebih serius untuk penyediaan data, penelitian, dan penerbitan. Program ini terdiri dari Divisi Perpustakaan, Divisi Penelitian dan Penerbitan.

2) **Pengembangan Jaringan Pelayanan Kesehatan Reproduksi (PJPKR)**

a. Klinik Adi Warga

Ini merupakan klinik kesehatan reproduksi atau seksual untuk pasangan (suami istri), remaja dan perempuan. Layanan yang diberikan antara lain, Konsultasi Kesehatan Reproduksi, Konsultasi Ingin Anak, konsultassi KTD, konsultasi IMS, HIV AIDS, Pemeriksaan Ginekologi, Pemasangan alat kontrasepsi,

papsmear, USG, tes kehamilan, Voluntary counseling and testing/visiti (test HIV).

JENIS PELAYANAN	
NO.	JENIS LAYANAN
1.	KONSULTASI KESEHATAN REPRODUKSI & SEKSUAL
2.	KONSULTASI IMS, HIV / AIDS
3.	PASANG DAN LEVAS KONTRASEPSI
4.	PEMERIKSAAN KANDUNGAN
5.	PEMERIKSAAN UMUM
6.	PAP SMEAR
7.	TES IMS
8.	TES HIV
9.	USG
10.	SIRKUMSISI (SUNAT)

Gambar 5. Jenis Pelayanan di Klinik Adhiwarga

b. Klinik Griya Lentera

Klinik ini merupakan klinik kesehatan reproduksi atau seksual bagi komunitas untuk HIV dan AIDS, IMS , ISR (Inveksi Saluran Reproduksi), Papsmier, dan visiti.

c. Klinik Keliling

Klinik ini merupakan layanan kesehatan di DIY yang mengakses wilayah-wilayah yang jauh.

d. Klinik Bringharjo

Merupakan klinik kesehatan reproduksi atau seksual untuk buruh gendong di pasar Bringharjo.

e. Youth Clinik

Klinik ini merupakan layanan kesehatan reproduksi untuk remaja dengan konsep Youth Friendly.

**g. Struktur organisasi badan pelaksana Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) DIY**

Tenaga kepengurusan di Youth Center Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) DIY terdiri dari manajer program, staff dan relawan. Di PKBI tingkat provinsi terdapat Direktur Eksekutif Daerah dan Pengurus Harian Daerah. Sedangkan di PKBI kabupaten terdapat Direktur Eksekutif Cabang dan Pengurus Harian Cabang. Di PKBI cabang Yogyakarta berada di 2 tempat yaitu PKBI Badran yang didalamnya terdapat Direktur Eksekutif Daerah, HRD, Administrasi Keuangan, Manajer Program Klinik, Klinik Adhiwarga, Klinik Griya Lentera, Klinik Pasar Beringharjo. Sedangkan yang satu di Youth Center PKBI berada di daerah Taman Siswa yang didalamnya terdapat manajer program Youth Center. *Struktur organisasi terlampir.*

**h. Jaringan kerja sama**

Program kegiatan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) DIY mengembangkan kerjasama ditingkat lokal, nasional maupun internasional baik secara langsung ataupun jaringan. Kerjasama tersebut dengan organisasi pemerintahan maupun non pemerintahan (NGO) , jaringan penanganan korban tindak kekerasan, ajidamai, forum LSM, JPY, IWAYO dan banyak organisasi maupun komunitas sesuai dengan bidang program masing-masing.

### **i. Pendanaan**

Urusan mengenai anggaran masuk dan keluar dikelola dengan baik oleh manajemen keuangan. Dana masuk diperoleh dari donatur, funding (organisasi internasional) serta pemasukan dari klinik adiwarga yang ada di Badran.

### **j. IWAYO sebagai mitra strategis PKBI DIY**

IWAYO adalah kepanjangan dari Ikatan Waria Yogyakarta yaitu sebuah wadah perkumpulan seluruh waria yang ada di Yogyakarta. IWAYO sebagai salah satu lembaga non pemerintah yang bekerjasama dengan PKBI DIY dalam bidang pengorganisasian komunitas. IWAYO berdiri pada tahun 1982 tetapi sempat vacum hampir 10 tahun dan aktif kembali tahun 1992 dengan menggandeng PKBI DIY sebagai mitra strategis. IWAYO bertempat di Kepatehan, Keraton dengan anggota 10 komunitas dan didalamnya lebih dari 200 waria seluruh Yogyakarta.

## **2. Data Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **a. Pengorganisasian Komunitas Waria Berbasis Hak Asasi Manusia di Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) DIY.**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pengorganisasian komunitas waria sudah berjalan sejak tahun 2005. Yang melatar belakangi adanya kegiatan pengorganisasian ini adalah awalnya tentang masalah kesehatan terutama kesehatan reproduksi masyarakat. Orang awam sangat buta pengetahuan tentang kesehatan reproduksi mereka sehingga mereka sangat haus akan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi yang sangat

berguna bagi mereka. Selain masalah kesehatan reproduksi, PKBI juga melirik masalah tentang pelanggaran hak asasi manusia khususnya hak sebagai warga negara yang dialami oleh beberapa sebagian masyarakat. Sebagai kaum minoritas dan termajinalkan oleh masyarakat, hak-hak asasi mereka khususnya hak sebagai warga negara tidak mereka dapatkan layaknya sebagai warga negara. Berawal dari keprihatinan itu, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) DIY memberikan pendampingan dan menjangkau segala komunitas dari komunitas gay, komunitas remaja jalanan, komunitas pekerja seks dan komunitas waria dimana mereka menjadi komunitas yang termajinalkan. Mulai tahun 2005 istilah pendampingan berubah menjadi pengorganisasian. Bagi PKBI, pendampingan hanya merupakan upaya untuk mendampingi, mengawasi dan membimbing yang didalamnya hanya terdapat pendamping dan orang/komunitas yang didampingi.

Hal tersebut diungkapkan oleh mas “SL” selaku Koordinator program pengorganisasian komunitas, yaitu:

*“...Program pendampingan hanyalah ada istilah pendamping dan yang didampingi dan selamanya akan seperti itu tanpa ada perubahan pada orang/komunitas yang didampingi...”*

Ungkapan serupa oleh mbak “WR” selaku Koordinator divisi penelitian dan penerbitan, sebagai berikut:

*“...sejak tahun 2005 kami mengganti istilah pendampingan dengan istilah pengorganisasian, bagi kami tidaklah tepat jika menggunakan istilah pendampingan karena dalam kegiatan ini kami mencoba mengorganisasi mereka, meberdayakan mereka,*

*dan menjadikan mereka sebagai agen perubahan untuk dirinya maupun komunitasnya dan istilah yang kami gunakan sekarang adalah istilah pengorganisasian..”.*

Tujuan dilakukannya program pengorganisasian adalah memfasilitasi mereka sampai akhirnya mereka dapat memiliki suatu pandangan dan pemahaman bersama mengenai keadaan dan masalah yang mereka hadapi. Komunitas ini memang harus terus-menerus diajak berfikir kritis dan menganalisa secara kritis keadaan dan masalah mereka sendiri. Hanya dengan demikian mereka akan mampu memiliki wawasan baru, kepekaan dan kesadaran yang memungkinkan mereka memiliki keinginan untuk bertindak, melakukan sesuatu untuk merubah keadaan yang mereka alami. Tindakan mereka itu kemudian dinilai, direnungkan kembali, dikaji ulang untuk memperoleh wawasan baru lagi, pelajaran-pelajaran berharga yang akan menjaga arah tindakan-tindakan mereka berikutnya.

Kegiatan pelaksanaan pengorganisasian komunitas khususnya komunitas waria dilaksanakan berdasarkan *need assessment* dilapangan dan disesuaikan dengan kebutuhan komunitas. PKBI bekerjasama dengan berbagai lembaga baik lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah. Dari lembaga pemerintah, PKBI bekerjasama dengan Dinas Sosial, Disnakertrans dan PKBI hanya sebagai fasilitator komunitas untuk mengikuti kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Disnakertrans. Hasil yang ingin dicapai dari program pemberdayaan komunitas ini adalah menjadikan mereka mandiri, berdaya dan mampu

mengorganisasi dirinya sendiri maupun komunitas tentang masalah yang mereka hadapi serta penyelesaian yang harus mereka lakukan.

Hasil penelitian menunjukkan bentuk-bentuk pengorganisasian yang menjadi pola pengorganisasian di PKBI DIY dan semuanya bertujuan untuk menjadikan komunitas mandiri, berdaya , memiliki pemahaman dan kesdaran tentang masalah yang mereka hadapi dan mampu menyelesaikan masalah yang mereka hadapi.

Bentuk-bentuk pengorganisasian yang dilakukan PKBI DIY antara lain:

a. Outreach

Proses *outreaching* yang dilakukan PKBI DIY terhadap waria di wilayah DIY sebanyak kurang lebih 200 waria dan memiliki 10 komunitas yang tergabung dalam Ikatan Waria Yogyakarta (IWAYO).

*Daftar nama waria terlampir.*

*Outreaching* atau disebut juga dengan penjangkauan. Relawan (Community Organizer selanjutnya disingkat CO) dari divisi waria pergi berkunjung ke lokasi tempat tinggal dan atau lokasi kerja Mitra Strategis (komunitas Waria) sebanyak 10 kali setiap bulan. Adapun yang dilakukan CO yaitu pemetaan demografi, analisis sosial, pendekatan personal ke MS dan lingkungannya, sharing informasi dan pengetahuan, memberikan sosialisasi tentang pentingnya mereka memiliki/bergabung dalam sebuah komunitas. Titik berat kegiatan ini adalah MS pendatang baru dan remaja. Adapun dorongan yang

diberikan antara lain: perilaku safer sex, menggugah kesadaran kritis, melakukan advokasi, berjaringan, dll.

Pertemuan antara CO dengan MS dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 4. Pertemuan CO dengan MS bulan Juni 2013**

No.	Tanggal	CO	MS	Komunitas	Narasi
1.	2-06-2013	RZ	DN LL	BI	Materi yang dikonsultasikan masalah komunitas, sharing dan pelatihan yang diadakan oleh DINSOS.
2.	6-06-2013	FT	KL RN	Sidomulyo	Materi yang dikonsultasikan masalah personal tentang ada salah satu teman komunitas yang menderita TB karena terlalu banyak konsumsi narkoba serta info pelatihan tataboga dari DINSOS.
3.	8-06-2013	FT	YT VR	Badran	Materi yang dikonsultasikan masalah komunitas dan sharing persoalan tentang salah satu MS yang merasa kurang informasi tentang kegiatan yang dilakukan komunitas.
4.	11-06-2013	RZ	SL SD	BI	Materi obrolan tentang masalah personal, sharing dan membahas pergantian nama komunitas WIWBI.
5.	15-06-2013	FT	RL LR HN	Eben Ezer	Materi yang dikonsultasikan masalah komunitas, sharing tentang hasil pelatihan RENSTRA di Solo untuk pengembangan IWAYO.
6.	17-06-2013	RZ	SD EK	BI	Materi yang dikonsultasikan tentang pelatihan untuk acara JFW di Jogja Festival dan pembuatan KTA IWAYO.

No	Tanggal	CO	MS	Komunitas	Narasi
7.	18-06-2013	RZ	ST SL	Kotagede	Materi yang dikonsultasikan masalah personal dan sharing tentang pelatihan salon yang diadakan oleh DINSOS.
8.	20-06-2013	FT	TK	Badran	Membahas tentang kesehatan reproduksi dan seksual tentang pentingnya penggunaan kondom dengan tamu karena jika tidak sangat beresiko terkena IMS.
9.	22-06-2013	FT	YT VR	Badran	Materi yang dikonsultasikan tentang masalah komunitas yaitu tentang pelatihan ikut pawai FKY di Ndalem Notoprajan.
10.	23-06-2013	RZ	SL DN	BI	Materi yang dikonsultasikan masalah komunitas, sharing tentang persiapan pelaksanaan Pawai Anti Narkotika di Malioboro.

Sumber: Data PKBI 2013

Pertemuan yang diadakan untuk menjangkau waria ditempat mereka berada dilakukan se-*natural* mungkin bertujuan agar waria merasa nyaman untuk menyampaikan apa yang menjadi masalah mereka, sharing tentang masalah dan kegiatan yang mereka alami serta memiliki kepercayaan terhadap *community organizer* (CO). Selain menanamkan kepercayaan, kegiatan ini juga bertujuan membangun kesadaran kritis kepada mereka, pemahaman tentang masalah yang sebenarnya mereka hadapi. Dalam buku yang berjudul Mengorganisir Rakyat (Jo Hann Tan dan Roem Topatimasang: 2004) menyebutkan

langkah awal dalam sebuah perorganisasian yaitu melakukan pendekatan baik secara personal maupun komunitas.

Seperti yang diungkapkan mas “RZ” selaku relawan divisi pengorganisasian komunitas waria:

*“...kita pernah sampai ke Wonosari, menelusuri sampai ke desa-desa untuk menemukan waria yang belum mendapat akses atau belum bergabung menjadi anggota IWAYO..”*

Mz “AG” juga menambahkan dalam pembicaraannya mengenai *outreaching* yaitu dilakukan se-alamiah mungkin agar CO dapat melebur menjadi satu bersama komunitas.

Menurut “DN” seorang waria yang berasal dari Kulon Progo mengungkapkan:

*“...iya mbak, PKBI sudah seperti tempat kami curhat, tempat kami mencurahkan keluh keluh kesah juga kami merasa sangat terbantu dengan adanya PKBI karena setiap blan kami selalu mendapat info-info penting seperti acara-acara yang diadakan oleh pemerintah daerah,,,”*

Dalam pelaksanaan outreach ini, walaupun PKBI hanya memiliki relawan dua orang yaitu mas “RZ” dan mbak “FT” tapi kedua relawan memegang daerah masing-masing yang menjadi tanggung jawab mereka masing-masing.



Gambar 6. Warung makan yang dikelola WARKOP



Gambar 7. Peneliti dengan anggota WARKOP

Kulon Progo merupakan kabupaten paling barat dari provinsi Yogyakarta yang menjadikan akses ke kota menjadi sedikit lebih sulit. Gambar pertama dan kedua menunjukkan bahwa penjangkauan PKBI juga menjangkau di kabupaten yang letaknya cukup jauh. Gambar

pertama menunjukkan warung makan yang dikelola oleh Waria Kulon Progo (WARKOP). Warung makan tersebut merupakan hasil dari kerjasama dengan Pemda dan Bank Mandiri, melalui loby dari PKBI akhirnya WARKOP dipercaya untuk mengelola warung tersebut. Gambar kedua adalah gambar peneliti dengan anggota WARKOP saat kunjungan ke Kulon Progo bersama CO.

“TR” salah satu waria dari WARKOP mengungkapkan:

*“...kalau tidak ada PKBI, kami tidak bisa mendirikan warung ini. Kami sangat berterimakasih karena PKBI telah membantu kamu sehingga kami bisa mendapatkan bantuan untuk mendirikan warung ini...”.*

Konsep pengorganisasian di Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) DIY adalah dengan cara langkah awal yaitu dengan pendekatan terhadap komunitas. Pendekatan terhadap komunitas ini dilakukan dengan cara-cara informal karena terbukti cara-cara informal lebih efektif. Kegiatan yang dilakukan berupa pendekatan secara individual maupun komunal. Pendekatan secara individual dengan mendatangi tempat mereka tinggal, tempat mereka bekerja hanya untuk sekedar pendekatan. Pendekatan secara komunal yaitu dilakukan dengan mendatangi komunitas mereka secara rutin setiap bulan minimal 10 kali.

Tahapan awal proses pengorganisasian adalah melebur dengan komunitas dengan tujuan mendapatkan informasi awal, membangun kontak person, menjalin pertemanan, memberitahukan kedatangan,

terlibat sebagai pendengar, terlibat aktif dalam diskusi, ikut bekerja bersama-sama, monitoring dan evaluasi. Dalam menjalankan aktivitas pengorganisasian, prinsip yang harus dipegang dan dijadikan pedoman dalam berfikir dan berbuat bagi seorang pengorganisasi komunitas/masyarakat adalah:

- a. Membangun pertemanan/persahabatan dengan komunitas atau masyarakat
- b. Bersedia belajar dari kehidupan komunitas yang bersangkutan
- c. Membangun komunitas atau masyarakat dengan berangkat dari apa yang ada atau dimiliki komunita tersebut
- d. Tidak berkeinginan untuk menjadi pemimpin dan “tetua” dari komunita tersebut
- e. Mempercayai bahwa komunitas memiliki potensi dan kemampuan untuk membangun dirinya sendiri hingga tuntas.

Semua prinsip tersebut harus ada dalam proses *outreaching* ini. Seorang CO harus berpihak dan mementingkan komunitas, pendekatan yang dilakukan harus holistik tidak kasuistik, bersikap independen dan mengembangkan rasa empati.

Dalam Undang-undang Dasar 1945 tertuang dalam pasal 28C ayat 2 yaitu hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa serta negaranya. Pengorganisasian yang dilakukan PKBI yaitu dalam bentuk *outreaching* ata penjangkauan yang bertujuan menjangkau seluruh tempat agar

waria-waria yang belum terjangkau mau dan memiliki kesadaran tentang pentignya ikut dalam sebuah komunitas untuk memperjuangkan hak yang mereka miliki sebagai kaum minoritas.

**b. Assisting**

Assisting memiliki makna membantu komunitas untuk bertindak. CO mendampingi/menemani MS dan atau komunitas dalam mengakses layanan kesehatan dengan tujuan agar MS memahami alur administrasi akses layanan kesehatan untuk kemudian dapat mengakses sendiri di lain hari, memonitoring dan memastikan tidak ada perlakuan-perlakuan diskriminatif yang diterima MS.

Seperti yang diungkapkan mbak “FT” selaku relawan sebagai berikut:

*“...kita mendampingi mereka misalnya bagaimana mengakses jamkesmas, hak layanan kesehatan yang seharusnya mereka terima sebagai warga negara...”*

Hal serupa juga diungkapkan oleh “ST” selaku ketua komunitas IWAYO:

*“...kita selalu dibantu oleh PKBI dalam mengakses setiap layanan publik yang disediakan oleh pemerintah. Mereka membantu kita sampe kita bisa melakukannya sendiri mbak...”*

Selain di ranah akses layanan kesehatan, assisting juga dilakukan ketika MS menghadiri pertemuan dengan lembaga-lembaga pemerintah/non pemerintah (jaringan) baik ketika MS menjadi peserta maupun pembicara. Batasan kerja relawan pada assisting adalah menguatkan kepercayaan diri MS, memastikan tidak ada perlakuan

diskriminatif terhadap MS, memberdayakan MS agar di lain hari dapat melakukannya sendiri dan atau bersama komunitasnya.



*Gambar 8. Ketua IWAYO koordinasi dengan DINSOS*

Dalam mencapai tujuan dari assisting ini aktivitas yang dilakukan oleh PKBI dalam pelaksanaan pengorganisasian adalah:

- 1) Pendampingan akses layanan sosial bagi MS

Pendampingan terhadap mitra strategis (MS) bertujuan agar mereka mampu bertindak. Proses awal yang dilakukan adalah pendekatan baik secara fisik maupun emosional. Bertujuan memberikan pendalaman terhadap permasalahan yang mereka hadapi, membangun kesadaran kritis serta dapat bertindak menyelesaikan permasalahan.

Seperti yang diungkapkan mas “AG” yaitu:

*“PKBI mendampingi mereka untuk mengakses layanan sosial yang seharusnya mereka dapatkan sebagai warga negara. PKBI hanya mendampingi satu atau dua kali dan berharap mereka bias*

*mengakses layanan tersebut secara mandiri dikemudian hari”.*

Dalam Undang-undang tertuang bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan layanan sosial baik layanan pendidikan, layanan kesehatan maupun layanan lain yang diperuntukan buat publik. Disini PKBI membantu mereka mengakses layanan tersebut karena bagaimanapun juga mereka adalah warga negara yang tinggal di Indonesia dan menjadi tanggung jawab pemerintah. Dalam Pasal 28A berbunyi “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Dalam pasal ini memiliki makna bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk mempertahankan hidup. Hidup dalam sebuah negara itu memiliki masalah yang kompleks, mereka harus mendapatkan hak mereka tapi juga harus melakukan kewajiban yang ada.

## 2) Pendampingan pertemuan

Selain mengakses layanan sosial, PKBI juga membantu mendampingi mereka menghadiri pertemuan dengan lembaga-lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Disini PKBI membantu penguatan kepercayaan diri, memastikan tidak ada perlakuan diskriminatif dan memberdayakan mereka maupun komunitas agar mampu

mandiri dikemudian hari. Setiap orang berhak mengeluarkan pendapat dan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta diperlakukan sama dimata hukum (pasal 28D ayat 1). Dengan dasar itu mereka berani bersuara didepan publik, mereka mengeluarkan aspirasi mereka, pendapat mereka, pemikiran mereka.

Mbak “SL” salah satu anggota IWAYO mengungkapkan:

*“...iya mbak, setiap ada pertemuan seperti seminar-seminar gitu, dari PKBI baik mas “AG” atau mas “RZ” ikut mendampingi kami. Seperti besok mas “AG” juga ikut acara workshop yang diadakan oleh Dinsos..”*

### c. Pertemuan Rutin CBO (Community Based Organitation)

Wujud kegiatan ini adalah pertemuan rutin sekali per bulan. Pertemuan rutin ini di beberapa tempat dihadiri juga oleh pengurus kampung. Diskusi pada pertemuan ini difasilitasi oleh CO dan atau Peer Educator di organisasi komunitas tersebut. Agenda yang dibahas misalnya: kegiatan komunitas baik dalam konteks advokasi hak-hak dan juga yang bersifat cultural sebagaimana keseharian mereka sebagai warga masyarakat.



*Gambar 9. Pertemuan IWAYO dengan pengurus kampung*

Bentuk pendekatan komunitas waria agar mereka mampu menjalankan fungsi sosial dan hidup bersama berdampingan dimasyarakat adalah dengan cara pendekatan baik bisik maupun emosional terhadap masyarakat sekitar dimana mereka tinggal. PKBI bertindak sebagai fasilitator yang mengupayakan agar komunitas mampu berkounikasi bahkan berdiskusi dengan pihak pengurus desa dimana mereka tinggal. Konsep pengorganisasian yang dilaksanakan oleh PKBI adalah dengan cara mengembangkan kerjasama dengan pihak-pihak lain membangun kesadaran terkait supaya bersama-sama menyelesaikan masalah yang dihadapi waria baik secara individu maupun komunitas. PKBI mengupayakan pelayanan advokasi kebijakan untuk menghapuskan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap waria.

Pernyataan oleh Bu “ST” sebagai berikut:

*“...setiap sebulan sekali kami diupayakan oleh PKBI selalu bertemu dengan pengurus kampung tempat dimana kami tinggal, kami bekerja. Kami bertemu hanya untuk sekedar mendengarkan peraturan baru yang dibuat pengurus*

*kampung atau berdiskusi tentang masalah yang kami hadapi. PKBI mencoba membuat jalan agar kami bisa diterima di masyarakat... ”.*

Pertemuan dengan CBO secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 5. Pertemuan dengan CBO bulan Juni 2013**

Tanggal	Nama CBO	Lokasi	Narasi
19 Juni 2013	FKWS Bapak SPD Ketua Keamanan	Stasiun Tugu	<p>a. Himbauan dari bagian keamanan kampung bahwa diharapkan kepada seluruh teman-teman waria untuk sama-sama saling menjaga nama baik. Selain itu juga menginfokan kepada teman-teman MS bahwa ada beberapa waktu yang lalu ada teguran dari warga untuk mengurangi jam tamu malam. Jika ada tamu yang bermalam diharapkan untuk melapor kepada RT/RW setempat. Hal itu untuk menjaga nama baik teman-teman waria sendiri, jangan sampai hanya satu teman yang berbuat, semua teman waria terkena imbasnya. Oleh karena itu harapan dari ketua keamanan agar teman-teman waria dapat menjaga nama baik waria.</p> <p>b. Ketua Rt 16 Bpk. Supardi.</p>

			Himbauan dari bpk supardi agar teman-teman MS menjaga sikap, perilaku sesuai aturan yang telah disepakati bersama, apalagi mengingat bentar lagi akan datang bulan Ramadhan. Selain itu juga mengharapkan kepada teman-teman MS yang mempunyai identitas diri untuk selalu baru jangan sampai exp (habis masa berlaku), karena identitas sangat penting dan berguna untuk mempermudah segala kepengurusan jika adan event-event tertentu atau berbagai kegiatan. Pak supardi juga menginfokan bahwa dana kematian saat ini sudah turun, dan baru mulai turun 3 juni yang lalu.
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber: Data PKBI 2013

Selain pertemuan dengan CBO, beberapa langkah diupayakan oleh PKBI dalam menyelesaikan kasus yang terjadi terhadap waria yaitu dengan menjadi fasilitator agar waria mendapat bantuan hukum dari Lembaha Bantuan Hukum (LBH), mengadakan aksi, mengirim lobbying dengan pemerintah untuk mempengaruhi kebijakan secara langsung. PKBI juga melakukan aksi dan advokasi penhapuskan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap waria dengan

sosialisasi atau kampanye terhadap masyarakat. Program sosialisasi maupun diskusi dengan masyarakat sebagai media penyebaran gagasan gerakan penghapusan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap waria dan memberikan informasi kepada masyarakat luas serta membangun opini masyarakat tentang waria yang juga sebagai warga negara. Sosialisasi ini juga dapat menjadi media penyadaran kritis bagi masyarakat sehingga pada akhirnya dapat ikut terlibat dalam gerakan penghapusan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap waria.



Gambar 10. Aksi oleh waria dan masyarakat.

Untuk melancarkan aksinya, PKBI memanfaatkan berbagai cara dan media yaitu buku, brosur, siaran radio, web, surat kabar, dan perpustakaan. Kasus-kasus yang terjadi terhadap waria diketahui melalui media massa, masyarakat yang peduli terhadap nasib waria, maupun korban yang cerita langsung ke PKBI.

#### d. Pertemuan Rutin IWAYO

Pertemuan 3 bulan sekali yang dihadiri oleh seluruh elemen dan anggota IWAYO. Tujuan pertemuan ini adalah untuk mendiskusikan dan mengevaluasi apa yang telah dilakukan/dicapai oleh IWAYO. Tidak lupa juga digunakan untuk menerima saran dan kritik untuk proses perjuangan yang akan datang. PKBI sebagai mitra strategis dari IWAYO juga memfasilitasi capacity building dalam konteks organisasi melalui pertemuan ini. Capacity building dalam bentuk Workshop Pengorganisasian. Setiap tahun PKBI DIY memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan kepada komunitas sebagai sarana pemberdayaan diri. Pelatihan yang sudah diberikan antara lain: Pelatihan Peer Educator, Workshop Penulisan, Pelatihan Analisis Sosial, Pelatihan Advokasi, dll. Tahun ini divisi waria akan menyelenggarakan sebuah workshop tentang pengorganisasian.



*Gambar 11. Pertemuan rutin IWAYO*

Pertemuan yang diadakan tiga bulan sekali membahas tentang masalah komunitas dalam IWAYO, sebagai rinciannya peneliti melampirkan hasil pertemuan dari bulan Januari-Maret 2013.

Hal yang diungkapkan oleh ketua komunitas bu “ST” yaitu sebagai berikut:

*“...tiga bulan sekali kami berkumpul dari semua komunitas. Yang paling jauh ya yang dari Wates mbak, tapi walaupun jauh mereka selalu rutin ikut walaupun gak semuanya ikut tapi cukuplah untuk mewakili...”*

Juga diungkapkan oleh mbak “SL”:

*“...tiga bulan sekali kami kumpul mbak, kadang didampingi PKBI untuk sekedar diskusi dan penguatan organisasi tapi kadang kita juga melakukan pertemuan rutin intern komunitas mbak....”*

**e. Pertemuan IWAYO dengan masyarakat sekitar.**

Setahun sekali PKBI memfasilitasi IWAYO untuk mengadakan sebuah diskusi ataupun sekedar pertemuan sederhana dengan masyarakat yang berada di sekitar lokasi kerja dan domisili waria di Yogyakarta. Tujuan kegiatan ini adalah mengkomunikasikan perspektif serta kebutuhan/permasalahan yang dihadapi komunitas waria dan seperti apa penilaian masyarakat terhadap waria agar kedua pihak saling memahami kondisi dan situasi masing-masing. Selain itu, IWAYO difasilitasi oleh PKBI juga sering mengadakan bakti sosial dilingkungan sekitar dengan tujuan untuk lebih mendekatkan waria dengan masyarakat dan menjalin hubungan baik dengan masyarakat. Namun kegiatan pertemuan dengan masyarakat sekitar misalnya dengan

ormas ataupun organisasi pemerintahan tidak setiap tahun dilaksanakan oleh PKBI karena tergantung dari inisiatif masyarakat.



*Gambar 12. Bakti sosial dengan masyarakat sekitar kali code.*

Mas “AG” selaku Koordinator Program Pengorganisaian Komunitas Waria mengungkapkan:

*“... bentuk pengorganisaian yang kami lakukan adalah outreach (penjangkauan), assisting (pendampingan) dan pertemuan rutin CBO, pertemuan rutin IWAYO dan pertemuan IWAYO dengan masyarakat sekitar. Bentuk itu sudah menjadi pola pengorganisasian yang kami lakukan selama ini, tetapi pertemuan IWAYO dengan masyarakat tidak dapat setiap tahun kita lakukan karena tergantung dengan inisiatif masyarakat..”*

Dalam bukunya Agus Suradika (2005: 39) Fungsi Pekerjaan Sosial yang dilakukan oleh PKBI untuk mengorganisasi waria adalah yaitu:

1. Kuratif/rehabilitatif

Individu, kelompok dan masyarakat yang mengalami gangguan dan hambatan dalam menjalankan fungsi sosialnya.

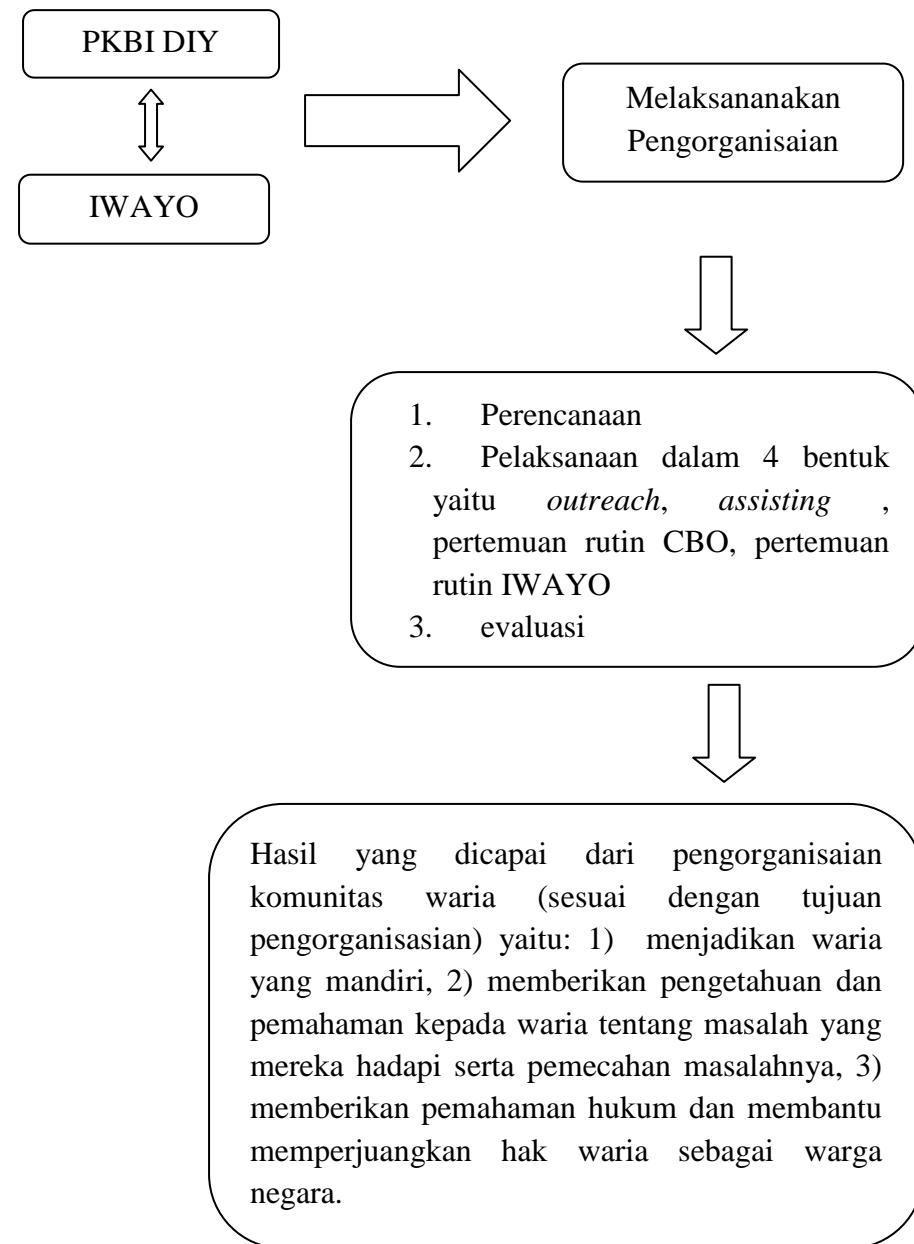
## 2. Preventif

Guna mencegah agar fungsi sosialnya tidak terganggu.

Seorang pengorganisir atau disebut *Community Organizer (CO)* adalah bisa dikategorikan sebagai seorang pekerja sosial yaitu suatu pelayanan sosial untuk membantu seseorang atau kelompok agar mampu memberdayakan dan mengembangkan diri sendiri maupun orang lain. Fungsi pekerjaan sosial yang telah disebutkan oleh Agus urandika tercermin dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh PKBI DIY. Fungsi kuratif/rehabilitatif yaitu tercermin dalam bentuk pertemuan rutin dengan CBO untuk membahas tentang peran dan fungsi waria dalam masyarakat agar mereka dapat hidup layaknya warga masyarakat yang lain. Selain untuk menjalankan fungsi sosialnya dimasyarakat, pengorganisasian yang dilakukan PKBI juga untuk peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan bagi waria.

Model yang dipakai dalam pelaksanaan pengorganisasian oleh PKBI DIY adalah model *Locality Development* yaitunlebih menekankan pada peran serta seluruh anggota komunitas waria baik secara individu maupun komunitas untuk mandiri. Prinsipnya adalah keterlibatan langsung waria, melayani diri sendiri maupun orang lain, membantu diri sendiri dalam penyelesaian masalah individu maupun komunitas dan mengembangkan keterampilan individu maupun komunitas. Peran *community organizer (CO)* adalah sebagai pendukung, fasilitator, dan pendidik.

Dari penjelasan mengenai hasil penelitian pengorganisasian komunitas waria berbasis hak asasi manusia di Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) DIY, peneliti dapat menggambarkan bagan Pengorganisasian Komunitas Waria Berbasis Hak Asasi Manusia di Perkumpulan Keluarga Indonesia (PKBI) DIY sebagai berikut:



.Gambar 13. Pengorganisaian Komunitas Waria di PKBI DIY

**b. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Pengorganisasian Komunitas Waria Berbasis Hak Asasi Manusia di Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) DIY**

Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) DIY sebagai salah satu lembaga non pemerintah yang peduli terhadap masalah kaum minoritas yang termarjinalkan dinegara ini khususnya waria. Berusaha untuk memperjuangkan hak-hak asasi khususnya hak sebagai warga negara bagi para waria dalam meningkatkan kesejahteraan mereka serta dapat hidup layak dimasyarakat dan dianggap selayaknya sebagai warga negara. Dalam pelaksanaan pengorganisasian yang dilakukan oleh PKBI tentunya ada faktor pendukung dan penghambatnya. Beberapa faktor pendukung diantaranya:

- 1) Adanya dukungan dari masyarakat, pemerintah maupun organisasi non pemerintah yang bergerak dalam bidang sosial lain. Adanya dukungan ini sangat membantu PKBI dalam upaya pengorganisasian komunitas waria berbasis hak asasi manusia.
- 2) Adanya tim yang solid dari pihak pengorganisir, yang dimaksud disini adalah dari pihak PKBI. Tim yang solid dan mampu bekerjasama dengan baik serta memiliki komitmen sangat penting dalam pelaksanaan sebuah pengorganisasian komunitas.
- 3) Hubungan yang baik yang terjalin antara pengorganisir dengan individu/komunitas yang diorganisasi sangatlah membantu dalam

keberhasilan pelaksanaan pengorganisasian. Seperti yang dikatakan oleh salah satu waria yaitu “DN” sebagai berikut:

*“...kami senang sekali, berterimkasih sekali ya mbak kepada PKBI, kami merasa ada tempat kami curhat, tempat kami mengadu jika kami ada masalah..”*

Seperti yang diungkapkan oleh mas “RZ” selaku relawan bahwa:

*“...salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan pengorganisasian ini adalah dukungan dari masyarakat, dari pak lurah serta komitmen dari kita dalam bidang ini...”*

Mas “AG” selaku koordinator divisi pengorganisasian komunitas waria menambahkan:

*“...tim yang mempunyai komitmen serta hubungan baik dengan para waria menjadi hal yang sangat mendukung bagi kami untuk melaksanakan pengorganisasian karena pendekatan kepada waria baik secara individual maupun komunitas itu adalah langkah awal kita untuk melakukan pengorganisasian..”*

Beberapa faktor pendukung yang telah dipaparkan diatas merupakan sebuah bukti bahwa pengorganisasian yang dilakukan oleh PKBI dapat diterima dimasyarakat dan di komunitas waria.

Selain beberapa faktor pendukung diatas, dalam pelaksanaan pengorganisasian juga ditemui banyak hambatan antara lain:

- 1) Kurangnya sumber daya manusia dari pihak pengorganisir. Dalam divisi pengorganisasian hanya terdiri dari 1 koordinator divisi dan 2 orang relawan yang membantu. Dengan hanya 3 Sumber daya manusia yang tersedia, mereka harus mampu menjangkau seluruh wilayah di DIY. Hal tersebut sedikit menyulitkan dalam pelaksanaan

pengorganisasian karena menyebabkan program kerja kurang berjalan secara maksimal.

Seperti yang dipaparkan oleh mas “AG” sebagai berikut:

*“...kurangnya SDM relawan di PKBI menyebabkan kita kesulitan untuk menjangkau daerah-daerah yang cukup jauh karena keterbatasan personil...”*

Hal serupa juga diungkapkan oleh mas “RZ” selaku relawan:

*“...karena relawan hanya ada 2 orang, setiap orang di beri tanggung jawab untuk mengkoordinir 2-3 wilayah yang menyebabkan kurang maksimalnya program kerja yang dilaksanakan..”*

- 2) Kurangnya antusias waria dalam mengikuti setiap kegiatan yang diselenggaran PKBI tidak bersifat seperti pelatihan keterampilan tetapi disini PKBI hanya sebagai fasilitator, dan juga hanya memberikan bantuan seperti memberikan sosialisasi, membantu memperjuangkan hak asasi mereka dan kegiatan yang bukan bersifat praktis. Selain itu kebijakan baru PKBI tidak memberikan uang transport kepada para waria yang datang untuk mengikuti kegiatan. Dari hal ini lah antusias waria untuk mengikuti kegiatan yang diadakan oleh PKBI kurang karena pertimbangan dengan pekerjaan yang harus mereka tinggalkan. Selaku ketua IWAYO, Ibu “ST” sangat paham dengan hal ini seperti yang dikatakannya sebagai berikut:

*“...kami tidak mempermasalahkan adanya kebijakan baru dari PKBI yaitu dengan tidak adanya pengganti uang transport untuk setiap kegiatan, tetapi PKBI pun harus memaklumi resiko dari kebijakan tersebut yaitu kami hanya mampu mengirimkan wakil-wakil kami saja untuk mengikuti kegiatan yang diadakan oleh PKBI...”*

3) Sebagian waria membutuhkan waktu lama agar bisa mandiri. Tidak memungkiri waria merupakan fenomena dalam masyarakat yang selalu mendapat perlakuan negatif di masyarakat sehingga itu berpengaruh terhadap kehidupan mereka baik dalam aspek pendidikan, kesehatan maupun ekonomi. Dalam aspek pendidikan tentunya diantara mereka mayoritas berpendidikan rendah dan secara otomatis itu berpengaruh terhadap cara pandang mereka, cara berfikir mereka dan daya tangkap mereka terhadap hal baru yang disampaikan oleh PKBI. Seperti yang diungkapkan oleh mbak “FT” selaku relawan sebagai berikut:

*“...hal yang sedikit menghambat dalam pelaksanaan pengorganisasian adalah daya pemahaman mereka terhadap sesuatu yang kami sampaikan, misalnya saja pendampingan yang kami lakukan agar mereka dapat mengakses layanan kesehatan yang seharusnya dapat mereka dapatkan bukan hanya dengan sekali atau du kali kami medampingi, tapi terkadang ada yang sampai sekarang kami harus mendampingi mereka untuk mengakses layanan tersebut karena mereka mengaku masih belum paham...”*

Hambatan-hambatan yang ditemui tidak membuat PKBI untuk berkecil hati tetapi menjadikan hambatan tersebut sebagai tantangan yang harus dihadapi dan dicari solusinya yaitu dengan jalan evaluasi setiap bulan, memperbanyak referensi, bertukar pengalaman dengan orang lain, pertemuan rutin dengan waria.

## **BAB V** **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengorganisasian komunitas waria di Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) DIY dilakukan dalam 4 bentuk yaitu outreach (penjangkauan), assisting (pendampingan), pertemuan rutin CBO, dan pertemuan rutin dengan IWAYO. *Outreaching* atau penjangkauan adalah kegiatan memberikan pelayanan kepada individu atau komunitas yang mungkin tidak memiliki akses ke layanan yang diberikan oleh PKBI DIY. Bentuk yang kedua adalah assisting yaitu membantu waria untuk mengakses layanan kesehatan, menemani waria menghadiri pertemuan dengan lembaga pemerintah/non pemerintah dengan batasan menguatkan kepercayaan diri waria, memastikan tidak ada perlakuan diskriminatif dan memberdayakan agar dilain hari dapat melakukannya sendiri. Pertemuan rutin dengan CBO dan IWAYO dilakukan dengan tujuan untuk membahas advokasi hak-hak, mengevaluasi kegiatan yang telah berjalan, merancang perjuangan untuk bulan berikutnya serta memfasilitasi *capacity building*.
2. Faktor pendukung dalam pelaksanaan pengorganisasian komunitas waria berbasis hak asasi manusia di Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) DIY adalah (a) adanya dukungan dari masyarakat luas, (b) tim yang

- solid dari pihak pengorganisir (PKBI) untuk membantu waria, (c) hubungan yang baik antara pengorganisir dengan waria.
3. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pengorganisasian komunitas waria berbasis hak asasi manusia di Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) DIY adalah (a) kurangnya sumber daya manusia dari pihak pengorganisir (PKBI), (b) kurangnya antusias waria dalam mengikuti setiap kegiatan, (c) sebagian waria membutuhkan waktu lama agar bisa mandiri.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini maka terdapat beberapa saran yang peneliti ajukan, diantaranya:

1. Bagi Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) DIY
  - a. Perlu adanya penambahan personil atau SDM dalam melaksanakan pengorganisasian agar program kerja dapat berjalan maksimal.
  - b. Perlu diadakan kegiatan yang bersifat praktis dan memberikan manfaat kepada waria secara langsung misalnya seperti pelatihan lifeskill dan
  - c. Perlu adanya penggantian uang transport setiap kali ada kegiatan walaupun tidak banyak hanya untuk menghargai kedatangan mereka.
2. Bagi IWAYO dan anggotanya

Sebagai kaum minoritas dan kaum yang termarjinalkan serta kaum yang kurang bisa diterima di masyarakat sudah selayaknya mereka memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih tentang masalah yang mereka hadapi agar mereka dapat hidup layak ditengah masyarakat.

3. Bagi Koordinator dan Relawan Divisi Pengorganisasian Komunitas Waria  
PKBI DIY

Melakukan pendekatan lebih agar *need assessment* benar-benar tepat dan program kerja bulanan dapat lebih maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanto & Rido Triawan. (2012). *Hak Kerja Waria Tanggung Jawab Negara*. Yogyakarta: Arus Pelangi.
- Atmojo, Kemala. (1986). *Kami Bukan Lelaki*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Atta Bangkit Pinuji. (2011). Studi Kasus Kehidupan Kaum Transeksual. *Skripsi*. Yogyakarta: FIP UNY.
- Denny Imam Azhari. (2012). *Pengorganisasian Komunitas dan Masyarakat*. Diakses dari <http://dennymamazhari.wordpress.com/2012/10/31/07-pengorganisasian-komunitas-dan-masyarakat/> pada tanggal 16 Maret 2013, Jam 15.00 WIB.
- Durand, V. Mark & David, H.B. (2007). *Intisari Psikologi Abnormal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fitri Nurjanah. (2013). Pemberdayaan Waria Pada Lembaga Pesantren Waria Senin-Kamis Al Fatah Di Yogyakarta. *Skripsi*. Yogyakarta: FIP UNY
- Kartono, Kartini. (1989). *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*. Bandung: Mandar Maju.
- Koeswinarno. (2004). *Hidup Sebagai Waria*. Yogyakarta: LKis Pelangi Aksara.
- Milles & Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UII Press.
- Moleong, Lexy J. (2011). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nadia, Zunly. (2005). *Waria, Laknat atau Kodrat?*. Yogyakarta: Pustaka Marwa.
- Nn. (2013). *FPI serang waria dalam pelatihan hukum dan ham*. Diakses dari <http://arihaz99.wordpress.com/2010/04/30/fpi-serang-warai-dalam-pelatihan-hukum-dan-ham/> pada tanggal 03 Agustus 2013, Jam 19.00 WIB.
- Nn. (2013). *Hak dan Kewajiban warga negara*. Diakses dari <http://nurulhaj19.wordpress.com/hak-dan-kewajiban-warga-negara-indonesia/> pada tanggal 15 Maret 2013, Jam 19.00 WIB.
- Nn. (2013). *Minoritas di tengah demokrasi*. Diaskses dari <http://www.demosindonesia.org/laporan-utama/3710-minoritas-di-tengah-demokrasi-dan-pluralitas-i-mempertanyakan-perlindungan-ham-untuk-kelompok-lgbt.html> pada tanggal 15 Februari 2013, Jam 14.00 WIB.

- Oetomo, Dede. (2003). *Memberi Suara pada yang Bisu*. Yogyakarta: Pustaka Marwa.
- Padmiati, Etty dan Sri Salmah. (2011). *Waria Antara Ada dan Tiada*. Yogyakarta: B2P3KS Press.
- Pardiman, S., Rachmanto Widjoprano & Y.B Suparlan. (1983). *Kamus Istilah Kesejahteraan Sosial*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pengarang.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta.
- Sukardi. (2006). *Penelitian kualitatif-naturalistik dalam pendidikan* . Yogyakarta: Usaha Keluarga.
- Sumpeno, Wahyudi. (2009). *Menjadi Fasilitator Genius*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Supratiknya, A. (1995). *Mengenal Perilaku Abnormal*. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara.
- Suradika, Agus dan Bambang Ipuyno Maskun. (2005). *Etika Profesi Pekerjaan Sosial*. BALATBANGSOS DEPSOS RI.
- Tan, Jo Hann & Roem Topatimasang. (2004). *Mengorganisir Rakyat: Refleksi Pengalaman Pengorganisasian Rakyat di Asia Tenggara*. Yogyakarta: SEAPCP, INSIST Press.
- Tim Penyusun. (2002). *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: CV Karindo.
- Tim Penyusun. (2003). *UU Tentang Perlindungan, Pengadilan dan Kesejahteraan Anak*. Jakarta: CV Tamita Utama.
- Tim Penyusun. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Tim Penyusun. (2010). *UU 1945 Amandemen Lengkap*. Yogyakarta: PT Aditya Pustaka.
- Wicaksono, Ahc. Wazir dan Taryono Darusman. (2001). *Pengalaman Belajar: Praktek Pengorganisasian Masyarakat di Simpul Belajar*. Bogor: Yayasan Puter. Diakses dari (<http://rumahiklim.org/wp-content/uploads/2011/08/Catatan-1-Pengalaman-Belajar-Praktek-Pengorganisasian-Masyarakat.pdf>) pada tanggal 16 Maret 2013, Jam 16.00 WIB.

# **LAMPIRAN**

Lampiran 1. Pedoman Observasi

**Tabel 6. Pedoman Observasi**

Hal	Deskripsi
Lokasi dan Keadaan Penelitian	
Letak dan Alamat	
Status Bangunan	
Kondisi Bangunan dan Fasilitas	
Profil, Visi dan Misi Lembaga	
Struktur Kepengurusan	
Keadaan Pengurus	
Jumlah	
Lulusan Pendidikan	
Alamat dan Tanggal Lahir	
Pendanaan	
Sumber dana	
Pengelolaan dana	
Program Pengorganisasian Komunitas Waria	
Sejarah	
Tujuan	
Sasaran	
Pelaksanaan Pengorganisasian Komunitas	

Waria	
Bentuk Pengorganisasian yang diberikan	
Manfaat Pengorganisasian	
Hasil dari Pengorganisasian	
Evaluasi Pengorganisasian	

Lampiran 2. Pedoman Dokumentasi

**PEDOMAN DOKUMENTASI**

1. Melalui Arsip Tertulis

- a. Sejarah berdirinya dan profil singkat Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) DIY.
- b. Visi dan Misi Berdirinya Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) DIY.
- c. Arsip data tentang fasilitas yang ada di Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) DIY.
- d. Arsip Data tentang struktur kepengurusan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) DIY.
- e. Arsip Data tentang waria dan komunitas waria binaan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) DIY.

2. Foto

- a. Gedung atau fisik Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) DIY.
- b. Fasilitas yang dimiliki serta pelaksanaan pendampingan di Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) DIY.

## Lampiran 3. Pedoman Wawancara

### **Pedoman Wawancara**

#### **Untuk Pengelola Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) DIY.**

##### **1. Identitas Diri**

- a. Nama Lengkap : (L/P)\*
- b. Jabatan :
- c. Usia :
- d. Agama :
- e. Pekerjaan :
- f. Pendidikan terakhir :
- g. Alamat :

##### **2. Identitas Diri Lembaga**

- a. Kapan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) DIY berdiri?
- b. Bagaimana sejarah berdirinya Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) DIY?
- c. Apa tujuan berdirinya Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) DIY?
- d. Kegiatan apa saja yang telah berjalan di Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) DIY?
- e. Bagaimana program-program dimunculkan dalam proses need assessment?

- f. Berapakah jumlah tenaga kerja dan bagaimana sistem rekrutmen tenaga kerjanya?
- g. Apa persyaratan menjadi pengurus/pengelola di Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) DIY?
- h. Adakah program peningkatan mutu untuk pengurus/pengelola yang diselenggarakan oleh PKBI DIY?
- i. Apakah program-program yang telah dilaksanakan semuanya berhasil?
- j. Jika berhasil, apa saja yang menjadi faktor pendukung dalam penyelenggaraan program ?
- k. Jika tidak, apakah yang menjadi penyebab atau kendala dalam pelaksanaan program?

### 3. Sarana dan Prasarana

- a. Dana
  - a) Berapa besar dana yang diperlukan untuk penyelenggaran setiap program khususnya untuk program pengorganisasian komunitas waria di Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) DIY?
  - b) Dari manakah sumber dana yang diperoleh?
  - c) Bagaimana pengelolaan dana tersebut?
- b. Tempat
  - a) Status tempat/gedung milik siapa?
  - b) Ada berapa gedung yang dimiliki?
  - c) Fasilitas apa saja yang ada dan paling menunjang juga paling dibutuhkan?

### 4. Program di Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) DIY.

- a. Program apa saja yang ada di PKBI DIY?
- b. Sejauh ini bagaimana pelaksanaan setiap program secara keseluruhan?
- c. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program secara keseluruhan

## **Pedoman Wawancara**

### **Untuk Koordinator dan Relawan Divisi Pengorganisasian Komunitas Waria di Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) DIY.**

#### **1. Identitas Diri**

- a. Nama Lengkap : (L/P)\*
- b. Jabatan :
- c. Usia :
- d. Agama :
- e. Pekerjaan :
- f. Pendidikan terakhir :
- g. Alamat :

#### **2. Pertanyaan**

- a. Apa yang melatarbelakangi anda untuk bergabung dengan PKBI?
- b. Sejak kapan anda mulai bergabung dengan PKBI?
- c. Dimana dilaksanakan kegiatan pengorganisasian bagi komunitas waria?
- d. Apa alasan memilih lokasi tersebut?
- e. Kapan waktu pelaksanaan pengorganisasian bagi komunitas waria dilakukan?
- f. Apa latar belakang dan tujuan dilakukan pengorganisasian tersebut?
- g. Bagaimana perencanaan, proses dan pelaksanaan kegiatan pengorganisasian tersebut?
- h. Bagaimana bentuk pengorganisasian yang dilaksanakan?
- i. Materi apa saja atau dalam bentuk apa pengorganisasian yang diberikan?

- j. Fasilitas apa saja yang menunjang dalam proses pengorganisasian tersebut?
  - k. Apakah ada materi/bentuk pendampingan yang bertujuan untuk memberdayakan baik secara individu maupun komunal?
  - l. (jika ada) bentuk pemberdayaan seperti apa yang diberikan?
  - m. Apa peran anda dalam pelaksanaan pengorganisasian tersebut?
  - n. Anda melakukannya sendiri atau dengan bantuan siapa anda melakukan pengorganisasian tersebut?
  - o. Bagaimana anda melakukan pengorganisasian tersebut?
  - p. Apakah anda menggunakan pedoman atau acuan dalam pelaksanaan pengorganisasian tersebut?
  - q. Kepada siapa semua kegiatan yang ada dilakukan untuk dipertanggungjawabkan? apakah ada sangsi untuk yang melakukan kesalahan dan bentuknya seperti apa?
  - r. Apakah ada evaluasi disetiap pengorganisasian yang dilakukan, oleh siapa dan bagaimana bentuknya?
  - s. Menurut anda, apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pengorganisasian yang telah dilaksanakan?
  - t. Apa tindak lanjut untuk program pengorganisasian tersebut?
3. Pendapat
- a. Bagaimana pendapat anda mengenai program pengorganisasian komunitas khususnya pengorganisasian komunitas di Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) DIY?

- b. Apa menurut anda program pengorganisasian yang telah dilaksanakan sudah efektif dan tepat sasaran dan berbasis hak asasi manusia?
- c. Bagaimana saran anda agar program pengorganisasian khususnya pengorganisasian komunitas waria di Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) DIY dapat berjalan secara efektif dan efisien?

## **Pedoman Wawancara**

### **Untuk Ketua Ikatan Waria Yogyakarta (IWAYO).**

#### **1. Identitas Diri**

- a. Nama Lengkap : (L/P)\*
- b. Nama Komunitas :
- c. Usia :
- d. Agama :
- e. Pekerjaan :
- f. Pendidikan terakhir :
- g. Alamat :

#### **2. Pertanyaan**

- a. Sejak kapan komunitas waria ini dibentuk?
- b. Apa yang melatar belakangi berdirinya komunitas waria ini?
- c. Berapa waria yang ada dalam komunitas ini?
- d. Sejak kapan komunitas ini bergabung dan menjadi salah satu komunitas yang menjadi mitra strategis dengan PKBI?
- e. Apa ada kasus yang dialami baik individu maupun komunal pada komunitas anda?
- f. (jika ada) kasus seperti apa yang komunitas anda alami?
- g. Apakah PKBI berperan dalam penyelesaian kasus tersebut?
- h. Menurut anda bagaimana pelayanan yg dilakukan PKBI?
- i. Bagaimana proses pengorganisasian berlangsung?

- j. Bagaimana tanggapan anda mengenai pengorganisasian yang telah dilaksanakan? apakah sudah berbaasis hak asasi manusia?
- k. Apakah anda ikut dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program pengorganisasian tersebut?
- l. Menurut anda apakah fasilitas yang ada di PKBI sudah menunjang dalam melakukan pelayanan sosial?
- m. Bagaimana evaluasi program pengorganisasian ini?
- n. Apa tindak lanjut dari program pengorganisasian ini?
- o. Apa harapan dan kritik anda untuk PKBI?

**Pedoman Wawancara**  
**Untuk anggota IWAYO sebagai Mitra Strategis Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) DIY.**

**1. Identitas Diri**

- a. Nama Lengkap : (L/P)\*
- b. Asal Komunitas :
- c. Usia :
- d. Agama :
- e. Pekerjaan :
- f. Pendidikan terakhir :
- g. Alamat :

**2. Pertanyaan**

- a. Sejak kapan anda merasa bahwa diri anda berbeda?
- b. Sejak kapan anda berani menampilkan diri anda sesungguhnya kepada masyarakat?
- c. Bagaimana hubungan anda dengan keluarga dan masyarakat sekitar anda tinggal setelah anda memutuskan untuk menjadi waria?
- d. Apakah anda merasa nyaman dan tenang dengan status anda sebagai waria?
- e. Apa pekerjaan anda sekarang dan bagaimana anda bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari?
- f. Sejak kapan anda menjadi mitra strategis PKBI DIY?
- g. Kasus/masalah apa yang pernah anda hadapi?
- h. Bagaimana tanggapan anda mengenai pengorganisasian yang telah dilaksanakan? apakah sudah berbasis hak asasi manusia?

- i. Apakah anda ikut dalam proses perencanaan dan evaluasi program pengorganisasian ini?
- j. Menurut anda bagaimana fasilitas yang dimiliki oleh PKBI untuk menunjang program pengorganisasian kepada awaria?
- k. Pengorganisasian/kegiatan seperti apa yang anda dapatkan disini?
- l. Menurut anda bagaimana respon PKBI menanggapi kasus anda?
- m. Apa harapan dan kritik anda pada PKBI?

## Lampiran 4. Catatan Lapangan

### **Catatan Lapangan I**

Hari, Tanggal : Rabu, 20 Februari 2013

Pukul : 10.00 - 11.00 WIB

Tempat : Youth Centre PKBI DIY

Kegiatan : Observasi awal

Deskripsi :

Pada hari ini peneliti datang ke kantor Youth Center PKBI DIY yang beralamat didaerah Sukorasan, Jalan Taman Siswa Gang Basuki, Yogyakarta dengan tujuan observasi awal untuk mengetahui dan mendapatkan informasi tentang Youth Center PKBI DIY dan program yang sedang berjalan/diselenggarakan. Ketika peneliti tiba disana, peneliti bertemu dengan “Sr” selaku salah satu staff yang bekerja dikantor tersebut. Peneliti menyapa, berkenalan dan mengutarakan maksud dan tujuannya datang kekantor Youth Center PKBI DIY. “Sr” menyambut dengan sangat ramah serta menjelaskan tentang prosedur penelitian yang ada disana.”Sr” memberikan selebaran yang isinya tentang prosedur yang harus ditempuh jika ingin melakukan penelitian dilembaga tersebut, peneliti membaca dan memahaminya dengan seksama. Peneliti melakukan kesepakatan dengan “Sr” jika hari berikutnya

akan kembali dengan membawa persyaratan yang telah diajukan oleh lembaga tersebut. Tidak lupa peneliti meminta kontak dari lembaga tersebut jika sewaktu-waktu membutuhkan informasi lebih lanjut. Setelah dirasa cukup, peneliti mohon pamit , menyampaikan terimakasih dan akan datang lagi untuk membawa persyaratan yang telah ditentukan.

## **Catatan Lapangan II**

Hari, Tanggal : Jum'at, 22 Februari 2013

Pukul : 13.00 - 14.00 WIB

Tempat : Youth Centre PKBI DIY

Kegiatan : Memenuhi Persyaratan Penelitian

Deskripsi :

Hari ini, peneliti kembali ke Youth Centre PKBI DIY dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan oleh PKBI. Hari ini peneliti kembali bertemu dengan "Sr" selaku front office dikantor. Peneliti menyapa mbak "Sr" dan beliau menyambutnya dengan ramah. Peneliti memberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan penelitian di PKBI, dan mbak "Sr" menerima dan meneliti ulang berkas yang sudah diberikan. Mbak "Sr" berkata bahwa peneliti juga bias melakukan konsultasi seputar skripsi dan masalah yang dibahas dengan pihak PKBI serta dapat meminjam buku-buku diperpustakaan sebagai referensi jika diperlukan. Peneliti diharuskan melakukan konsultasi dengan pihak PKBI sebelum terjun langsung ke lapangan. Setelah melakukan kesepakatan, dan dirasa sudah cukup informasi yang didapatkan, peneliti mohon pamit.

### **Catatan Lapangan III**

Hari, Tanggal : Kamis, 14 Maret 2013

Pukul : 11.00 - 13.00 WIB

Tempat : Youth Centre PKBI DIY

Kegiatan : Konsultasi Proposal Skripsi

Deskripsi :

Hari ini peneliti dating ke Youth Centre PKBI DIY dengan tujuan melakukan konsultasi proposal skripsi dengan mbak “Wr” selaku Koordinator Divisi Penelitian dan Penerbitan yang sebelumnya sudah janjian lewat telefon. Peneliti datang ke ruang kerja mbak “Wr” yang berada di perpustakaan PSS yang berada dibagian belakang kantor Youth Centre PKBI DIY. Peneliti menyapa mbak “Wr” dan beliau menyambut dengan ramah. Peneliti memberikan proposal yang telah dibuat, dan kemudian mbak wuri membacanya. Beberapa menit kemudian beliau memberikan beberapa masukan yang membangun untuk proposal tersebut, penelitian memperhatikan dengan seksama serta tidak lupa mencatatnya. Mbak “Wr” menyarankan untuk kembali dengan perbaikan proposal yang sudah direvisi. Setelah dirasa cukup, peneliti mohon pamit.

## **Catatan Lapangan IV**

Hari, Tanggal : Rabu, 20 Maret 2013

Pukul : 13.00 - 15.00 WIB

Tempat : Youth Centre PKBI DIY

Kegiatan : Konsultasi Proposal Skripsi

Deskripsi :

Pada hari ini peneliti datang kembali ke Youth Centre PKBI DIY untuk bertemu kembali dengan mbak “Wr” untuk mengkonsultasikan proposal skripsi yang sebelumnya juga telah dikonsultasikan ke dosen pembimbing baik dosen pembimbing pertama maupun dosen pembimbing yang kedua. Peneliti menemui mbak “Wr” di perpustakaan PSS, mbak “Wr” yang sudah mengetahui maksud kedatangan peneliti langsung meminta proposal yang sudah diperbaiki. Peneliti memberikannya dan kembali diteliti oleh mbak “Wr”. Beberapa menit kemudian mbak “Wr” kembali memberi sedikit masukan dan menyarankan peneliti untuk bertemu langsung dengan Koordinator Program Pengorganisasian dan Koordinator Divisi Pengorganisasian Komunitas Waria, selebihnya mbak “Wr” menyetujui isi proposal peneliti.

## **Catatan Lapangan V**

Hari, Tanggal : Selasa, 16 April 2013

Pukul : 10.00 - 11.00 WIB

Tempat : Youth Centre PKBI DIY

Kegiatan : Memberikan Surat Ijin Penelitian dari Walikota

Deskripsi :

Hari ini peneliti datang ke kantor Youth Centre PKBI DIY bukan untuk mengkonsultasikan proposal tetapi untuk memberikan surat ijin penelitian yang diperoleh dari Walikota Yogyakarta. Proposal skripsi telah disetujui oleh dosen pembimbing dan siap untuk ke lapangan untuk penelitian dan pengambilan data. Peneliti datang kekantor dan bertemu dengan mbak “Wr”. Peneliti menyampaikan maksud dan tujuannya datang ke PKBI dan menyerahkan surat ijin serta 1 bendel proposal yang telah disetujui. Mbak “Wr” menjelaskan bahwa peneliti sudah bias langsung terjun ke lapangan untuk melihat proses pelaksanaan pengorganisasian dan berperan serta dalam prose pengorganisasian. Peneliti menyampaikan terimakasih, dan setelah dirasa cukup peneliti mohon pamit.

## **Catatan Lapangan VI**

Hari, Tanggal : Selasa, 23 April 2013

Pukul : 11.00 - 12.00 WIB

Tempat : Youth Centre PKBI DIY

Kegiatan : Koordinasi dengan Koordinator Program

Deskripsi :

Hari selasa, 23 april peneliti datang ke Youth Centre PKBI untuk bertemu dengan coordinator program pengorganisasian yaitu Mas “SL” yang sudah janjian terlebih dahulu lewat sms. Mas “SL” adalah koordinator seluruh program pengorganisasian di PKBI meliputi pengorganisasian komunitas gay, pengorganisasian komunitas waria, pengorganisasian komunitas remaja jalanan, pengorganisasian komunitas pekerja seks. Peneliti datang langsung ke ruang kerja mas “SL” dan disambut dengan sangat ramah oleh mas “SL”. Setelah berbincang-bincang dan mengutarakan maksud kedatangan peneliti, mas “SL” memberikan saran agar peneliti menemui koordinator divisi pegorganisasian komunitas waria yang langsung berhubungan dengan waria yaitu mas “AG”. Sebelum berpamitan, peneliti tidak lupa meminta kontaknya mas “AG” agar mudah untuk melakukan koordinasi selanjutnya. Setelah semuanya dirasa cukup, peneliti mohon pamit.

## **Catatan Lapangan VII**

Hari, Tanggal : Kamis, 25 April 2013

Pukul : 15.00 - 16.00 WIB

Tempat : Youth Centre PKBI DIY

Kegiatan : Koordinasi dengan Koordinator Divisi

Deskripsi :

Setelah menghubungi lewat sms, peneliti janjian dengan mas “AG” untuk bertemu di PKBI hari ini. Peneliti datang ke ruang kerja mas “AG” dan disambut dengan ramah. Peneliti memperkenalkan diri serta mengutarakan maksud dan tujuannya datang ke PKBI. Mas “AG” mengerti dan paham apa yang harus dilakukan untuk membantu peneliti dalam proses penelitian karena beliau juga masih kuliah di perguruan tinggi yang sama dengan peneliti. Mas “AG” menyarankan agar peneliti datang langsung saat ada kegiatan pengorganisasian berlangsung. Mas “AG” akan menghubungi peneliti jika ada kegiatan-kegiatan. Peneliti sangat senang mendengar penjelasan dari mas “AG”. Mas “AG” juga memberitahu jika dalam pelaksanaan pengorganisasian, beliau dibantu oleh 2 relawan yaitu mbak “FT” dan mas “RZ”. Setelah merasa cukup peneliti mohon pamit.

## **Catatan Lapangan VIII**

Hari, Tanggal : Rabu, 01 Mei 2013

Pukul : 11.00 - 12.00 WIB

Tempat : Youth Centre PKBI DIY

Kegiatan : Observasi Pelaksanaan Pengorganisasian

Deskripsi :

Hari ini peneliti datang ke PKBI setelah mendapat sms dari mas “AG” untuk ke PKBI. Peneliti datang ke ruang kerja mas “AG” untuk membantu menentukan pembuatan kartu anggota IWAYO sebagai pengganti kartu identitas mereka (waria) guna memperoleh/mengakses layanan sosial misalnya layanan kesehatan yang berhak mereka dapatkan. Peneliti dimintauntuk memilih dan membantu mensosialisasikan kepada waria tentang kartu anggota IWAYO tersebut. Cara mensosialisasikan melalui pembuatan brosur, bulletin ataupun selebaran selainlewat media sosial. Pukul 12.00 peneliti mohon pamit karena sudah tidak ada lagi yang perlu dikerjakan.

## **Catatan Lapangan IX**

Hari, Tanggal : Jum'at, 03 Mei 2013

Pukul : 15.00 - 18.00 WIB

Tempat : PKBI Badran

Kegiatan : Observasi Pelaksanaan Pengorganisasian

Deskripsi :

Hari ini peneliti diajak oleh mas “AG” untuk membantu waria mengisi angket yang digunakan untuk memeriksa IMS atau penyakit seks menular. Peneliti bertemu dengan mas “AG” di PKBI Badran, disana terdapat klinik adhiwarga milik PKBI sebagai layanan kesehatan untuk masyarakat setempat. Pemasukan dari klinik inilah yang menjadi salah satu seumber dana untuk PKBI. Pukul 15.00 WIB peneliti datang untuk membantu mas “AG” mengkoordinir para waria. 10 waria hadir untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Peneliti membantu waria mengisi angket karena ditakutkan waria kurang paham dengan pertanyaan yang ada di angket tersebut. Setelah selesai pemeriksaan, peneliti mohon pamit dengan mas “AG” dan para waria.

## **Catatan Lapangan X**

Hari, Tanggal : Sabtu, 11 Mei 2013

Pukul : 15.00 - 17.00 WIB

Tempat : Kepatehan, Keraton

Kegiatan : Wawancara dengan Ketua Komunitas Waria

Deskripsi :

Hari ini peneliti bersama mas “AG” sudah janjian dengan bu “ST” selaku ketua ikatan waria Yogyakarta/IWAYO. Peneliti datang ke basecamp mereka di daerah kepatehan, keraton dekat dengan alun-alun kidul Yogyakarta. Peneliti datang bersam mas “AG” dan disambut dengan ramah oleh bu “ST”. Mas “AG” mengutarakan maksud kedatangannya bersama peneliti untuk melakukan wawancara mengenai pelaksanaan pengorganisasian komunitas waria yang dilakukan oleh PKBI serta respon mereka terhadap kegiatan yang diadakan oleh PKBI. Bu “ST” pun mengerti lalu mempersilahkan peneliti untuk memulai wawancara. Setelah selesai wawancara peneliti mengucapkan terimakasih dan pamit pulang bersama mas “AG”. Kesimpulan dari wawancara bersama bu “ST” adalah beliau mengatakan namakan komunitas sangat berterimakasih sekali dengan adanya kegiatan pengorganisasian yang dilakukan oleh PKBI DIY, tapi beliau juga minta maaf jika antusias waria kurang dalam mengikuti kegiatan

yang diadakan oleh PKBI karena banyak pertimbangan salah satunya pertimbangan pekerjaan yang harus mereka tinggalkan. Selebihnya bu “ST” sangat senang dengan kegiatan yang didakan oleh PKBI.

## **Catatan Lapangan XI**

Hari, Tanggal : Senin, 13 Mei 2013

Pukul : 14.00 - 18.00 WIB

Tempat : Wates, Kulon Progo

Kegiatan : Wawancara dengan Waria

Deskripsi :

Hari ini peneliti datang ke Wates, Kulon Progo menemui anggota WARKOP (Waria Kulon Progo) yang juga menjadi anggota IWAYO ditemani oleh mas “AG”. Waktu menyesuaikan dengan warianya karena mereka jika siang harus bekerja di warung makan yang mereka miliki dan jika malam mereka bekerja sebagai penyanyi dangdut. Tujuan peneliti datang untuk bertemu dengan “TR”, “DN” dan “SK”. Mereka bertiga anggota komunitas waria kulon progo. Sesampainya kami ditempat tujuan kami disambut sangat ramah oleh mereka. Ms “AG” mengutarakan kedatangan kami lalu mereka bertiga pun mengerti. Alasan pemilihan subjek di kulon progo adalah untuk mengetahui apakah PKBI telah menjangkau komunitas sampai sejauh ini di kulon progo dan apakah program PKBI telah berjalan secara maksimal.

Peneliti memberikan pertanyaan secara bergantian kepada mereka seputar pengorganisasian yang telah dilakukan oleh PKBI,

mbak “DN” mengungkapkan sangat senang dengan adanya PKBI karena mereka merasa sangat dibantu dan ada yang peduli terhadap mereka. Hal serupa juga diungkapkan oleh mbak “TR” yang merasa ada yang membela dan ikut memperjuangkan hak mereka. Mbak “SK” menambahkan jika PKBI sangat membantu mereka tapi mbak “SK” meminta maaf jika kadang tidak hadir dalam kegiatan yang didakan oleh PKBI karena pertimbangan pekerjaan yang harus mereka tinggalkan. Kesimpulan dari wawancara hari ini adalah waria merasa senang dengan kegiatan yang diadakan PKBI tapi mereka tidak antusias karena kegiatan yang dilakukan kurang memberikan manfaat kepada mereka secara langsung.

## **Catatan Lapangan XII**

Hari, Tanggal : Rabu, 15 Mei 2013

Pukul : 10.00 - 12.00 WIB

Tempat : Youth Centre PKBI DIY

Kegiatan : Wawancara dengan Pengelola Youth Centre PKBI

Deskripsi :

Hari ini peneliti datang ke PKBI untuk bertemu dengan mbak “WR” selaku koordinator divisi penelitian dan penerbitan. Peneliti sudah janjian lewat sms dan bertemu dengan mbak “WR” di Perpustakaan Pusat Studi Seksualitas, Youth Center PKBI. Peneliti disambut dengan ramah dan hangat oleh mbak “WR”, dan mbak “WR” pun sudah mengetahui tujuan peneliti datang yaitu untuk bertanya dan mengetahui informasi tentang kelembagaan PKBI. Peneliti mulai bertanya dan mbak “WR” langsung menjelaskan panjang lebar tentang profil PKBI, visi dan misi serta struktur kepengurusan yang ada di PKBI. Semua informasi telah lengkap, peneliti berterimakasih lalu mohon pamit.

### **Catatan Lapangan XIII**

Hari, Tanggal : Kamis, 16 Mei 2013

Pukul : 16.00 - 18.00 WIB

Tempat : Youth Centre PKBI DIY

Kegiatan : Wawancara dengan Koordinator Divisi

Deskripsi :

Hari ini peneliti datang ke PKBI setelah janjian terlebih dulu dengan mas “AG” lewat sms. Peneliti datang ke ruang kerja mas “AG” dan beliau sudah menunggu. Peneliti memberikan salam dan mengutarakan maksud dari kedatangannya ke PKBI. Mas “AG” sudah membatas sekilas pertanyaan yg diajukan oleh peneliti, lalu mas “AG” menjelaskan panjang lebar mengenai perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program yang dilakukan oleh PKBI. Mas “AG” menjelaskan perencanaan dilakukan rutin setiap bulan dan pelaksanaan pengorganisasian dalam 4 bentuk yaitu outreach, assisting dan organizing (pertemuan rutin CBO dan IWAYO). Evaluasi dilakukan setiap tanggal 26 setiap bulan.

## **Catatan Lapangan XIV**

Hari, Tanggal : Kamis, 16 Mei 2013

Pukul : 10.00 - 12.00 WIB

Tempat : Youth Centre PKBI DIY

Kegiatan : Wawancara dengan relawan

Deskripsi :

Hari ini peneliti sudah janjian lewat sms dengan mbak “FT” dan mas “RZ” selaku relawan yang membantu mas “AG” dalam pelaksanaan pengorganisasian komunitas waria di Yogyakarta. Peneliti membuat janji untuk bertemu di Youth Centre PKBI. Pukul 10.00 WIB peneliti datang namun mbak “FT” dan mas “RZ” belum datang, peneliti menunggu sebentar lalu beberapa menit kemudian mereka datang. Kami melakukan wawancara di perpustakaan pustaka studi seksualitas. Sebelumnya kami sudah saling mengenal saat peneliti datang untuk observasi pelaksanaan kegiatan pengorganisasian. Langsung saja peneliti memberikan pertanyaan seputar kegiatan pengorganisasian yang dilaksanakan dan bertanya apa saja yang menjadi faktor penghambat dan pendorong dalam pelaksanaan pengorganisasian. Mbak “FT” menjawab bahwa bentuk pengorganisasian ada 4 yaitu outreach, assisting dan organizing (pertemuan dengan CBO dan IWAYO). Begitu pula mas “RZ” menjawab dengan kata-kata serupa. Mas

“RZ” menambahkan faktor pendukung yaitu adanya dukungan dari masyarakat, juga rekan kerja yang solid tapi yang menjadi penghambat adalah kurangnya relawan dalam tim yang menyulitkan mereka dalam kegiatan penjangkauan. Menurut mbak “FT” yang menghambat pelaksanaan selain kurangnya relawan juga terletak pada waria dengan tingkat pemahaman yang kurang sehingga mereka membutuhkan waktu yang lamma untuk mampu mandiri. Selain itu, antusias saat mengikuti kegiatan kurang karena alasan tidak ada uang pengganti transport.

Kesimpulan dari wawancara hari ini adalah kegiatan pengorganisasian dilaksanakan dalam 4 bentuk yaitu outreach, assisting dan organizing (pertemuan dengan CBO dan IWAYO). Faktor pendukung berupa dukungan dari masyarakat dan tim yang solid. Faktor penghambat berupa kurangnya relawan, antusias waria kurang dan daya pemahaman waria kurang.

**Reduksi, Display dan Kesimpulan Hasil Wawancara Pengorganisasian  
Komunitas Waria Berbasis Hak Asasi Manusia Di Perkumpulan Keluarga  
Berencana Indonesia (PKBI) Daerah Istimewa Yogyakarta.**

---

---

**Bagaimana bentuk pengorganisasian komunitas waria yang dijalankan oleh PKBI DIY?**

- AG :”bentuk pengorganisasian yang kami lakukan ada 4 bentuk yaitu outreach/ penjangkauan, assisting/ pendampingan, pertemuan rutin dengan pengurus kampung dan pertemuan rutin dengan IWAYO sebulan sekali”
- RZ :”seperti yang telah dijelaskan sama mas angga, di PKBI ada 4 bentuk pengorganisasian terhadap komunitas waria yaitu meliputi outreach, assisting dan pertemuan dengan CBO, juga sama IWAYO”
- FT :“pengorganisasian kepada waria dilakukan dengan tiga pokok kegiatan yaitu outreach (penjangkauan), assisting (pendampingan), pertemuan rutin dengan masyarakat, sama sebulan sekali pertemuan dengan IWAYO”
- Kesimpulan :Bentuk pengorganisasian di Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) DIY ada 4 yaitu meliputi Outreach (penjangkauan), Assisting (pendampingan), pertemuan rutin dengan CBO(Community Based Organization) dan Pertemuan rutin dengan IWAYO (Ikatan Waria Yogyakarta).

**Bagaimana perencanaan kegiatan dilakukan?**

- AG :“perencanaan dilakukan berdasarkan evaluasi divisi dan feedback yang diberikan oleh komunitas. Ada pertemuan rutin internal divisi pengorganisasian komunitas waria tanpa melibatkan waria setiap tanggal 26 pada bulan tersebut”.
- RZ :“setiap divisi pengorganisasian komunitas di PKBI selalu ada pertemuan rutin setiap bulan tapi tanggalnya ditentukan oleh koordinator divisi yang bersangkutan yang bertujuan untuk update perkembangan, evaluasi serta perencanaan program kerja untuk bulan depan”.
- FT :“perencanaan dilakukan oleh pihak PKBI tanpa mengikuti sertakan waria melalui identifikasi kebutuhan”.
- Kesimpulan :Perencanaan dalam proses pengorganisasian berdasarkan feed back dari komunitas, identifikasi kebutuhan dan dilakukan rutin setiap bulan oleh staff dan relawan yang bersifat internal.

**Bagaimana pelaksanaan pengorganisasian komunitas waria berbasis hak asasi manusia di PKBI DIY?**

- AG :“pelaksanaan pengorganisasian dengan menjadikan waria sebagai mitra strategis PKBI. Waria yang menjadi mitra strategis adalah anggota dari IWAYO yaitu Ikatan Waria Yogyakarta yang menaungi seluruh komunitas waria yang ada di DIY. Kegiatan yang dilakukan tidak bersifat praktis tapi lebih kepada memberikan pemahaman kepada mereka tentang kesehatan reproduksi serta membantu mereka untuk mendapatkan hak yang selama ini tidak mereka dapatkan sebagai warga negara”.

RZ	:“pelaksanaan pengorganisasian seperti membantu membuatkan mereka kartu anggota IWAYO sebagai pengganti KTP agar bisa digunakan untuk mengakses layanan kesehatan dan berbagai layanan sosial lain yang berhak mereka dapatkan sebagai warga negara”.
FT	:“pelaksanaan berupa kegiatan-kegiatan dan pendampingan dan pengorgnisasian yang bertujuan menjadikan waria menjadi berdaya dan mampu mengakses apa yang menjadi haknya sebagai warga negara secara mandiri”.
Kesimpulan	: pelaksanaan kegiatan pengorganisasian bermitra dengan IWAYO dengan kegiatan-kegiatan seperti pembuatan kartu IWAYO sebagai pengganti kartu identitas mereka, sosialisasi pemahaman tentang kespro, membantu memperjuangkan hak mereka sebagai warga Negara, membantu mengakses apa yang menjadi hak mereka.
<b>Fasilitas dan pelayanan apa saja yang diberikan selama pengorganisasian berlangsung?</b>	
AG	:” membantu menyediakan tempat untuk pertemuan rutin IWAYO setiap bulan, selain itu juga membantu pendanaan IWAYO karena IWAYO tidak memiliki kas pemasukan tetap”.
FT	:“membantu mengakses dan memperjuangkan hak-hak sebagai warga negara, menjadi fasilitator dalam mengupayakan pemberdayaan untuk waria”.
Kesimpulan	:Fasilitas dan pelayanan yang diberikan kepada waria adalah pelayanan untuk membantu mereka memperjuangkan hak-hak asasi mereka terutama hak

sebagai warga negara, mengorganisir agar mereka mampu mandiri serta bantuan sebagai fasilitator.

**Bagaimana bentuk evaluasi kegiatan pengorganisasian dilakukan?**

- AG : "evalusi dari program kerja yang telah dilaksanakan setiap bulan dilakukan setiap tanggal 26 yang membahas tentang update perkembangan komunitas, evaluasi pelaksanaan kegiatan, laporan hasil kegiatan serta perencanaan program kerja untuk bulan depan".
- RZ : " kami selalu mengadakan evaluasi program kerja setiap bulan, tanggal ditentukan oleh koordinator divisi yaitu mas "AG" untuk membuat perbaikan pada perencanaan bulan berikutnya".
- FT : "evaluasi diadakan setiap bulan membahas tentang pelaksanaan program yang telah berjalan untuk mengevaluasi masalah dan solusi yang harus ditempuh".
- Kesimpulan : Evaluasi dilakukan setiap bulan, setiap tanggal 26 diikuti oleh relawan dan staff divisi yang bersangkutan. Evaluasi membahas update perkembangan komunitas, evaluasi pelaksanaan kegiatan, laporan hasil kegiatan.

**Apa tindak lanjut dari program pengorganisasian yang telah dilakukan?**

- AG : "tindak lanjut dari program ini adalah tetap melakukan pengawasan dan kontrol terhadap komunitas, serta tetap melakukan pertemuan rutin dengan mereka".
- FT : "PKBI akan mendampingi satu atau dua kali sampai waria secara individu maupun komunitas agar mampu mengorganisasi dirinya dan komunitas agar mandiri".
- Kesimpulan : Tindak lanjut program pengorganisasian komunitas waria adalah tetap ada pengawasan dan kontrol terhadap komunitas/individu.

**Apa saja faktor pendukung dalam pelaksanaan pengorganisasian komunitas waria?**

- AG :” faktor yang mendukung dalam pelaksanaan kegiatan pengorganisasian ini adalah tim yang solid dalam divisi pengorganisasian yaitu ditunjukkan mereka dalam komitmen mereka bergabung dengan PKBI.
- RZ :” banyak hal yang mendukung dalam pelaksanaan pengorganisasian yang dilakukan oleh PKBI antara dukungan dari masyarakat tempat waria tinggal, tim yang solid..”
- FT :” kalau menurut saya, kedekatan kami dengan para waria menjadi faktor pendukung untuk kami menganalisa kebutuhan, melaksanakan pengorganisasian sampai solusi yang harus diberikan dalam setiap permasalahan”.
- Kesimpulan : Faktor pendukung dalam pelaksanaan pengorganisasian adalah adanya dukungan dari masyarakat, tim yang solid dari pihak pengorganisir, hubungan yang baik antara pengorganisir dengan waria.

**Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan pengorganisasian komunitas waria?**

- AG :“yang menjadi masalah jika dilihat dari kelembagaan adalah kurangnya SDM yang ada disetiap divisi pengorganisasian sehingga program kerja penjangkauan kurang berjalan secara maksimal. Jika dilihat dari waria sebagai objek pengorganisasian adalah kurangnya kesadaran dan pengetahuan mereka tentang apa yang menjadi masalah bagi mereka. Mereka hanya berfikir bagaimana untuk hidup dan mencari penghasilan untuk bertahan hidup”.

- RZ : ”masalah banyak ditemui saat ada kegiatan tapi antusias dari waria kurang karena tidak adanya uang transport, kegiatan hanya bersifat teori yang tidak memberikan manfaat secara langsung bagi waria. Mereka masih memilih untuk mengerjakan sesuatu yang dapat menghasilkan uang untuk mereka hidup, untuk mereka makan. Itu masalah dari waria, kalau dari kelembagaan adalah kurangnya SDM relawan sehingga program kerja belum dapat bekerja secara maksimal”.
- FT : “karena rata-rata pendidikan terakhir waria rendah, daya tangkap mereka terhadap apa yang disampaikan kurang sehingga kadang butuh waktu lama agar mereka bisa mandiri. Selain itu dari pihak PKBI, relawan hanya sedikit jadi tidak semua komunitas bisa terjangkau”.
- Kesimpulan : Faktor penghambat dalam pelaksanaan pengorganisasian komunitas waria adalah kurangnya SDM dari pihak pengorganisir, tingkat pendidikan rendah mempengaruhi daya pemahaman mereka terhadap masalah yang mereka hadapi, mereka hanya memikirkan manfaat praktis yang memberikan manfaat langsung bagi mereka dibandingkan dengan manfaat jangka panjang, antusiasme dari waria kurang untuk mengikuti kegiatan pengorganisasian.

## Lampiran 6. Clipping Report



Lampiran 7. Nama MS Waria Dijangkau per Januari 2013

No	Nama	Komunitas
1.	YS	<b>Komunitas Waria Badran (KWB)</b>
2.	YR	Komunitas Waria Badran (KWB)
3.	WA	Komunitas Waria Badran (KWB)
4.	RT	Komunitas Waria Badran (KWB)
5.	AG	Komunitas Waria Badran (KWB)
6.	TK	Komunitas Waria Badran (KWB)
7.	PN	Komunitas Waria Badran (KWB)
8.	NT	Komunitas Waria Badran (KWB)
9.	EV	Komunitas Waria Badran (KWB)
10.	OK	Komunitas Waria Badran (KWB)
11.	YL	Komunitas Waria Badran (KWB)
12.	DN	Komunitas Waria Badran (KWB)
13.	NV	Komunitas Waria Badran (KWB)

No	Nama	Komunitas
1.	AR	<b>Wadah Inspirasi Waria Bank Indonesia (WIWBI)</b>
2.	AN	Wadah Inspirasi Waria Bank Indonesia (WIWBI)
3.	VK	Wadah Inspirasi Waria Bank Indonesia (WIWBI)
4.	YR	Wadah Inspirasi Waria Bank Indonesia (WIWBI)
5.	IK	Wadah Inspirasi Waria Bank Indonesia (WIWBI)
6.	HN	Wadah Inspirasi Waria Bank Indonesia (WIWBI)
7.	DN	Wadah Inspirasi Waria Bank Indonesia (WIWBI)
8.	MM	Wadah Inspirasi Waria Bank Indonesia (WIWBI)
9.	EK	Wadah Inspirasi Waria Bank Indonesia (WIWBI)
10.	LL	Wadah Inspirasi Waria Bank Indonesia (WIWBI)

11.	FS	Wadah Inspirasi Waria Bank Indonesia (WIWBI)
12.	FR	Wadah Inspirasi Waria Bank Indonesia (WIWBI)
13.	DT	Wadah Inspirasi Waria Bank Indonesia (WIWBI)
14.	SD	Wadah Inspirasi Waria Bank Indonesia (WIWBI)
15.	NK	Wadah Inspirasi Waria Bank Indonesia (WIWBI)
16.	BL	Wadah Inspirasi Waria Bank Indonesia (WIWBI)
17.	AT	Wadah Inspirasi Waria Bank Indonesia (WIWBI)
18.	IM	Wadah Inspirasi Waria Bank Indonesia (WIWBI)
19.	MS	Wadah Inspirasi Waria Bank Indonesia (WIWBI)
20.	IN	Wadah Inspirasi Waria Bank Indonesia (WIWBI)
21.	CC	Wadah Inspirasi Waria Bank Indonesia (WIWBI)
22.	KK	Wadah Inspirasi Waria Bank Indonesia (WIWBI)
23.	AV	Wadah Inspirasi Waria Bank Indonesia (WIWBI)
24.	AX	Wadah Inspirasi Waria Bank Indonesia (WIWBI)
25.	LD	Wadah Inspirasi Waria Bank Indonesia (WIWBI)
26.	NR	Wadah Inspirasi Waria Bank Indonesia (WIWBI)
27.	SK	Wadah Inspirasi Waria Bank Indonesia (WIWBI)
28.	DN	Wadah Inspirasi Waria Bank Indonesia (WIWBI)
29.	BJN	Wadah Inspirasi Waria Bank Indonesia (WIWBI)
30.	JS	Wadah Inspirasi Waria Bank Indonesia (WIWBI)
31.	RQ	Wadah Inspirasi Waria Bank Indonesia (WIWBI)
32.	BD	Wadah Inspirasi Waria Bank Indonesia (WIWBI)
33.	NT	Wadah Inspirasi Waria Bank Indonesia (WIWBI)

No	Nama	Komunitas
1.	SL	<b>Forum Komunikasi Waria Sidomulyo (FKWS)</b>
2.	CC	Forum Komunikasi Waria Sidomulyo (FKWS)
3.	MM	Forum Komunikasi Waria Sidomulyo (FKWS)

4.	EU	Forum Komunikasi Waria Sidomulyo (FKWS)
5.	TT	Forum Komunikasi Waria Sidomulyo (FKWS)
6.	BG	Forum Komunikasi Waria Sidomulyo (FKWS)
7.	AG	Forum Komunikasi Waria Sidomulyo (FKWS)
8.	SR	Forum Komunikasi Waria Sidomulyo (FKWS)
9.	PN	Forum Komunikasi Waria Sidomulyo (FKWS)
10.	TS	Forum Komunikasi Waria Sidomulyo (FKWS)
11.	TY	Forum Komunikasi Waria Sidomulyo (FKWS)
12.	ID	Forum Komunikasi Waria Sidomulyo (FKWS)
13.	ST	Forum Komunikasi Waria Sidomulyo (FKWS)
14.	NN	Forum Komunikasi Waria Sidomulyo (FKWS)
15.	EC	Forum Komunikasi Waria Sidomulyo (FKWS)
16.	VT	Forum Komunikasi Waria Sidomulyo (FKWS)
17.	RN	Forum Komunikasi Waria Sidomulyo (FKWS)
18.	IK	Forum Komunikasi Waria Sidomulyo (FKWS)
19.	KL	Forum Komunikasi Waria Sidomulyo (FKWS)
20.	HN	Forum Komunikasi Waria Sidomulyo (FKWS)
21.	ST	Forum Komunikasi Waria Sidomulyo (FKWS)

No	Nama	Komunitas
1.	TR	<b>Waria Kulon Progo (WARKOP)</b>
2.	DN	Waria Kulon Progo (WARKOP)
3.	SS	Waria Kulon Progo (WARKOP)
4.	EV	Waria Kulon Progo (WARKOP)
5.	IK	Waria Kulon Progo (WARKOP)
6.	SV	Waria Kulon Progo (WARKOP)

No	Nama	Komunitas
1.	IN	<b>Komunitas Waria Jalan Solo</b>
2.	VR	Komunitas Waria Jalan Solo
3.	JM	Komunitas Waria Jalan Solo
4.	EN	Komunitas Waria Jalan Solo
5.	RL	Komunitas Waria Jalan Solo
6.	AC	Komunitas Waria Jalan Solo
7.	ST	Komunitas Waria Jalan Solo
8.	SS	Komunitas Waria Jalan Solo
9.	EN	Komunitas Waria Jalan Solo
10.	TM	Komunitas Waria Jalan Solo
11.	DV	Komunitas Waria Jalan Solo

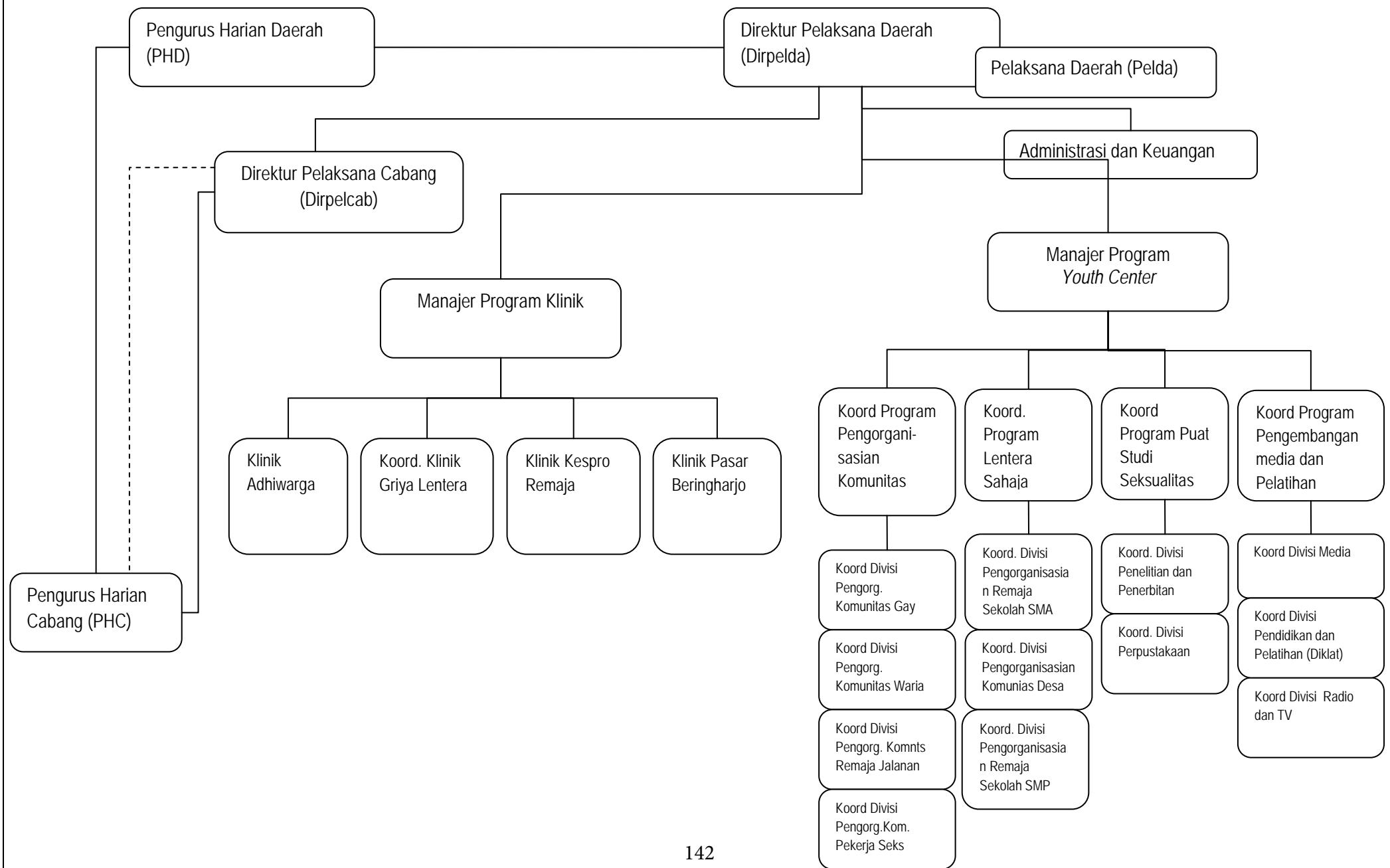
No	Nama	Komunitas
1.	SR	<b>Sanggar Seni dan Budaya Waria Yogyakarta (SSBWY)</b>
2.	TN	Sanggar Seni dan Budaya Waria Yogyakarta (SSBWY)
3.	SD	Sanggar Seni dan Budaya Waria Yogyakarta (SSBWY)
4.	MC	Sanggar Seni dan Budaya Waria Yogyakarta (SSBWY)
5.	PW	Sanggar Seni dan Budaya Waria Yogyakarta (SSBWY)
6.	BT	Sanggar Seni dan Budaya Waria Yogyakarta (SSBWY)
7.	NR	Sanggar Seni dan Budaya Waria Yogyakarta (SSBWY)
8.	MY	Sanggar Seni dan Budaya Waria Yogyakarta (SSBWY)
9.	TN	Sanggar Seni dan Budaya Waria Yogyakarta (SSBWY)
10.	PS	Sanggar Seni dan Budaya Waria Yogyakarta (SSBWY)
11.	SF	Sanggar Seni dan Budaya Waria Yogyakarta (SSBWY)
12.	NK	Sanggar Seni dan Budaya Waria Yogyakarta (SSBWY)
13.	AR	Sanggar Seni dan Budaya Waria Yogyakarta (SSBWY)
14.	YT	Sanggar Seni dan Budaya Waria Yogyakarta (SSBWY)
15.	EN	Sanggar Seni dan Budaya Waria Yogyakarta (SSBWY)

16.	AN	Sanggar Seni dan Budaya Waria Yogyakarta (SSBWY)
17.	AK	Sanggar Seni dan Budaya Waria Yogyakarta (SSBWY)
18.	MT	Sanggar Seni dan Budaya Waria Yogyakarta (SSBWY)
19.	OK	Sanggar Seni dan Budaya Waria Yogyakarta (SSBWY)
20.	HR	Sanggar Seni dan Budaya Waria Yogyakarta (SSBWY)
21.	MH	Sanggar Seni dan Budaya Waria Yogyakarta (SSBWY)
22.	NK	Sanggar Seni dan Budaya Waria Yogyakarta (SSBWY)

No	Nama	Komunitas
1.	MT	<b>Ikatan Waria Bantul (IWABA)</b>
2.	SF	Ikatan Waria Bantul (IWABA)
3.	RR	Ikatan Waria Bantul (IWABA)
4.	IM	Ikatan Waria Bantul (IWABA)
5.	EK	Ikatan Waria Bantul (IWABA)
6.	SV	Ikatan Waria Bantul (IWABA)

No	Nama	Komunitas
1.	AA	<b>Persatuan Waria Jombor</b>
2.	DR	Persatuan Waria Jombor
3.	WW	Persatuan Waria Jombor
4.	SP	Persatuan Waria Jombor

*Lampiran 8. Struktur Organisasi  
Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Daerah Istimewa Yogyakarta*



## Lampiran 9. LAPORAN TRIWULAN IWAYO

**DIVISI : Waria**  
**PROGRAM : PPK**

### KEGIATAN

Tujuan Khusus 1:
Kegiatan 1.1: Turun Lapangan
Waktu Pelaksaan: Jan feb mar Apr mei jun jul agt sep okt Nov Des
Output Kegiatan: CBO memiliki mekanisme internal yang mampu merespon kebutuhan serta permasalahan yang dihadapi, termasuk dalamnya mobilisasi sumber daya.
Gambaran Rencana Kegiatan: Pengorganisasian waria saat ini difokuskan pada penjangkauan MS baru dan MS remaja; rencana kegiatan dan penguatan organisasi titik komunitas dengan memaksimalkan peran para pengurus organisasi dan pengurus kampung; serta pengembangan IWAYO. Saat turlap, CO akan membahas tentang cara menguatkan IWAYO. Pertama dari sisi material, CO mendorong agar organisasi titik komunitas yang memiliki potensi sumber daya tidak sedikit untuk mengupayakan sharing dengan IWAYO. Untuk assisting, CO akan mengajak PE atau pengurus organisasi agar terlibat langsung dalam technical assisting sebagaimana skema pengalihan tanggung jawab dan peran. Jika MS yang sakit masih sanggup untuk mengikuti proses administrasi, maka ybs akan dilibatkan dan diberi pemahaman agar perlahan bisa mandiri.
Gambaran Kegiatan yang telah Selesai Dilaksanakan: Saat ini organisasi titik komunitas (Badran, Sidomulyo, BI) sedang merancang alur distribusi sumber daya yang ada di komunitas (misalnya: kas dari sumber internal yaitu anggota dan pendapatan lain dari pihak luar) agar dapat menguatkan IWAYO. Pengurus WIWBI merencanakan penguatan kapasitas bagi anggotanya pada topic gender dan seksualitas setelah melakukan observasi pada para anggotanya menemukan fakta bahwa belum ada pemahaman yang sama tentang konsep gender dan seksualitas yang semestinya disepakati untuk pegangan perjuangan identitas. Assiting dilakukan 1 kali kepada Nur dari Tungkak yang bergabung di SSBWY, keluhannya adalah gejala stroke namun pada pemeriksaan ternyata ada saraf wajah yang terjepit. MS sudah sembuh setelah menjalani 3 dari 12 terapi yang direkomendasikan RS Jogja. PE yang terlibat yaitu Shinta Ratri.
Kegiatan 1.2: Pertemuan rutin titik komunitas
Waktu Pelaksaan: Jan feb Mar Apr mei jun jul agt sep okt Nov Des
Output Kegiatan:
Gambaran Rencana Kegiatan: Pertemuan rutin di titik komunitas difokuskan untuk membahas permasalahan dan potensi yang akan dikembangkan di komunitas masing-masing. Pertemuan rutin juga akan digunakan untuk mendorong MS dari masing-masing titik untuk terlibat aktif di CBO baik dalam kegiatannya maupun kepengurusannya.
Gambaran Kegiatan yang telah Selesai Dilaksanakan: <b>Januari:</b>

**Notulensi Pertemuan Rutin**

**WARKOP**

**Januari 2013**

**Hari/Tanggal** : Jumat, 4 Januari 2013

**Tempat** : Alun-alun Wates

**Peserta** : Siska, Diana, Tiara, Ike, Didik

**Capaian :**

1. Keinginan soal rumah singgah ini sebenarnya seperti keinginan untuk mempunyai sebuah sekretariat organisasi WARKOP. Hanya kendalanya tidak mudah. Harus ada biaya sewa atau kontrak. Belum dipikirkan dengan matang apa gunanya sekretariat itu untuk komunitas waria. Wacana seperti ini sebaiknya melewati pembahasan di IWAYO supaya jelas latar belakang dan outputnya serta analisis seberapa jauh hal ini untuk dapat direalisasikan.
2. Identitas diri ini tinggal menunggu dari IWAYO karena pengurus IWAYO sudah akan membuat kartu anggota yang baru.
3. Grup dangdut komunitas bisa membantu komunitas untuk menjadi wadah kampanye dan menjalin hubungan dengan warga umum.

**Rekomendasi:**

Mendorong komunitas untuk hadir dalam pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh jaringan seperti IWAYO, supaya sama-sama tahu kebutuhannya. Selain itu penting untuk info dan acara yang diadakan.

**Notulensi Pertemuan Rutin**

**Forum Komunikasi Waria Sidomulyo**

**Januari 2013**

**Hari/Tanggal** : Minggu, 30 Desember 2012

**Tempat** : Balai RW Sidomulyo

**Peserta** : terlampir

**Capaian** :

1. Internal FKWS membahas beberapa hal yaitu terkait pemindahan lokasi lapangan untuk berlatih voli ke kelurahan Bener, Tegalrejo. Kini komunitas tidak lagi menggunakan lapangan voli yang lama dan pindah ke lapangan voli yang dibuatkan oleh kelurahan Bener. Lapangan yang baru ini lebih representative dan memungkinkan komunitas untuk berinteraksi lebih baik dengan warga sebagai sesama pengguna lapangan tersebut. Komunitas mengungkapkan rasa syukur

mereka di forum ini karena permintaan mereka terpenuhi yaitu diberi akses untuk mengembangkan minat dan kegiatan mereka.

2. Berlanjut membahas mengenai saldo kas FKWS per Desember 2012 sebesar Rp. 682.000.
3. Informasi dari pengurus kampung: peraturan bagi pengendara motor agar mematikan mesin motornya ketika melintas di wilayah RT 15 dan 16 selepas pukul 22.00 WIB.
4. Migrasi MS: **Yuli** dan **Cici** yang pindah dari komunitas Badran ke FKWS dan Jamilah dari Klitren ke FKWS.

**Rekomendasi:**

CO mendorong teman - teman MS agar lebih aktif dalam berorganisasi. Masih ada beberapa MS yang tidak menghadiri pertemuan dengan rutin karena alasan nyebong, sementara kesepakatan di FKWS sudah mengatur soal itu.

**Notulensi Pertemuan Rutin  
Wadah Inspirasi Waria Bank Indonesia  
Januari 2013**

**Hari/Tanggal** : Jumat, 11 Januari 2013  
**Tempat** : Rumah Arum  
**Peserta** : terlampir  
**Capaian** :

1. Pengurus WIWBI membahas beberapa hal terkait peran aktif teman-teman WIWBI yang dirasa masih kurang. Sejauh ini baru beberapa MS yang merupakan pengurus WIWBI yang aktif dalam berkegiatan dalam gerbong IWAYO. Sebut saja Erika, Arum, Dona, Fira, Sheila, Ika. Sisanya belum menunjukkan keterlibatan yang intens. Meskipun demikian, prosentase MS WIWBI yang berkegiatan sudah lebih banyak dibanding komunitas lain. Pengurus mendorong agar para anggotanya tidak segan untuk aktif di kegiatan yang ada di IWAYO maupun jaringan LGBT. Diharapkan dengan berperan aktif dalam setiap kegiatan IWAYO teman-teman bisa mendapatkan informasi dan pengetahuan yang dapat diaplikasikan dalam gerakan mereka. Anggota memberi feed back terhadap apa yang disampaikan oleh pengurus di depan. Kehendak untuk ikut berkegiatan sebenarnya sudah ada, hanya saja dari dulu faktor alokasi waktu yang belum bisa dikompromikan. Banyak anggota yang bekerja siang hari. Ijin untuk meninggalkan pekerjaan mereka sulit keluar sehingga partisipasi mereka minim. Sebagaimana diketahui bahwa anggota WIWBI tidak hanya sex worker tapi juga perias, karyawan toko, OP warnet, mahasiswa, dll. Diskusi berlanjut pada urgensi untuk regenerasi di tubuh WIWBI. Ada 5 remaja di dalamnya yang potensial untuk melanjutkan usaha-usaha generasi sebelumnya. Sayangnya remaja-remaja tersebut cenderung sibuk untuk aktifitas di siang hari. Pengurus menyampaikan bahwa mereka akan mempertimbangkan untuk mendahulukan anggota remaja dalam konteks capacity building.

2. Berlanjut membahas mengenai saldo kas WIWBI per Januari 2013 sebesar Rp. 205.000,00. Saldo iuran kebersihan toilet Rp 315.000,00
3. Opsi pemindahan tempat pertemuan rutin selain di rumah Arum yaitu di Gazebo PKBI atau di sekretariat PLU di Nagan Lor. Rumah Arum tidak selalu cukup untuk menampung jumlah anggota yang mencapai lebih dari 25 orang. Vina mengusulkan sesekali mengadakan pertemuan rutin di rumah makannya di depan XT Square. Permasalahan tempat tidak lagi menjadi hambatan dengan tersedianya banyak pilihan.
4. Anggota WIWBI sepakat untuk lebih aktif lagi dalam setiap kegiatan di WIWBI maupun di IWAYO. Mereka akan mengupayakan di antara padatnya jadwal kerja mereka masing-masing, tentunya tidak akan sesering anggota yang bekerja di malam hari.

### **Februari:**

#### **Notulensi Pertemuan Rutin**

#### **FKWS**

**Februari 2013**

**Hari/Tanggal :** Minggu, 17 Februari 2013

**Tempat :** Balai RW 04 Sidomulyo

**Peserta :** Supardi, Djumeno, Sheila, Anggun, Heni, Amoy, Cici, Weny, Dina, Jamilah, Bunga, Inka, Sarah, Bonur, Eli, Fani, Rina, Nining, Urmila, Tuti, Ajin, Sherly, Angga, Reza

#### **Capaian :**

1. Kesepakatan baru soal tertib kampung di Sidomulyo sudah disepakati bersama antara pengurus kampung dengan FKWS. Pasangan MS bisa tinggal bersama secara resmi di Sidomulyo.
2. Sudah ada klarifikasi terkait jamkesmas dari pengurus kampung ke komunitas. Pengurus kampung akan mengupayakan agar komunitas waria bisa mendapatkan jamkesmas, rencananya pengurus kampung akan menggunakan KTA IWAYO jika memungkinkan masuk dalam prosedur jamkesmas.

#### **Rekomendasi:**

1. Membantu PE untuk mendorong anggota yg belum rutin datang agar bisa meluangkan waktunya.
2. Koordinasi intensif dengan pengurus kampung terkait peluang kepemilikan jamkesmas bagi para anggota FKWS melalui KTA IWAYO.

**Notulensi Pertemuan Rutin**  
**WARKOP**  
**Februari 2013**

**Hari/Tanggal** : Sabtu, 2 Februari 2013

**Tempat** : Alun-alun Wates

**Peserta** : Siska, Diana, Tiara, Ike, Didik

**Capaian** :

Diskusi cara-cara penularan penyakit HIV dan AIDS bilamana berhubungan akan menggunakan kondom agar dapat terhindar dari penyakit menular itu. Kami ngobrol untuk mengulas lagi soal penularan virus HIV. Hubungan seks yang tidak aman bisa menjadi sebab orang tertular HIV maka itu komunitas yang bekerja di bidang itu harus waspada, selalu menggunakan kondom.

**Rekomendasi** :

Mendorong komunitas tetap melakukan hubungan sex yang aman.

**Notulensi Pertemuan Rutin**  
**WIWBI**  
**Februari 2013**

**Hari/Tanggal** : Minggu, 10 Februari 2013

**Tempat** : Rumah Arum

**Peserta** : Shandra, Anna, Hanna, Yorra, BJ, Meme, Dina, Avika, Safira, Dona, Ika, Jazzy, Oik, Arum, Erika, Renita, Angga.

**Capaian** :

1. Usulan untuk mengadakan capacity building dengan tema gender dan seksualitas merupakan hasil pemetaan komunitas sendiri dalam rangka penguatan dan dekonstruksi nilai-nilai yang ada di komunitas terkait pemahaman bersama pada topik gender dan seksualitas. Mereka yang sudah paham mengenai gender dan seksualitas sebagai sebuah konstruksi mencoba untuk menyalurkan kepada rekan-rekannya di WIWBI supaya memiliki pemahaman yang sama, agar pada proses gerakan ke depan bisa selaras.
2. Komunitas sudah hafal dengan oknum-oknum client yang acap kali melakukan kekerasan kepada komunitas. Ada langganan yang sering melanggar kesepakatan nominal transaksi. Untuk mengingatkan sesama teman biasanya digunakan bahasa dan isyarat tertentu. Sayangnya, para pelaku kekerasan tersebut sudah paham dengan simbol yang digunakan komunitas. Untuk itu perlu dirumuskan simbol baru yang fleksibel digunakan. Dalam artian tidak begitu mudah dibongkar oleh para pelaku kekerasan tersebut. Simbol ini nanti akan sangat berguna dalam membantu anggota baru saat bekerja. Pada pertemuan kali ini belum berhasil menciptakan simbol baru yang disepakati. Meskipun demikian, ada alternatif yang dilontarkan oleh

salah satu anggota, yaitu dengan memanggil nama kawannya ketika sedang ditawar oleh oknum tersebut.

3. Mengenai kebersihan pangkalan, secara organisasional sudah ada komitmen, tinggal aplikasi di lapangan. Ide untuk menyediakan bak sampah potensial untuk direspon lebih lanjut. Apabila berjalan maka kegiatan ini dapat menunjukkan sisi lain dari aktifitas nyebong komunitas sehingga dapat memberi kontribusi untuk upaya reduksi stigma (image yang melekat pada kawasan nyebong yaitu kumuh dan kotor).

**Rekomendasi:**

Capacity building penting untuk direspon sebagai pintu masuk untuk membahas hal yang lebih besar di organisasional WIWBI.

**Maret:**

**Notulensi Pertemuan Rutin**

**FKWS**

**Maret 2013**

**Hari/Tanggal** : Minggu, 24 Maret 2013

**Tempat** : Gazebo RW 04 Sidomulyo

**Peserta** : Supardi, Djumeno, Mulyono, Sheila, Anggun, Heni, Amoy, Cici, Weny, Dina, Jamilah, Bunga, Inka, Sarah, Bonur, Eli, Fani, Rina, Nining, Urmila, Tuti, Ajin, Sherly, Angga, Reza, Fitri, Ana, Kelly, Alexa

**Capaian :**

1. Komunitas mendapatkan surat keterangan tempat tinggal atau domisili yang diterbitkan oleh pengurus kampung dan dapat dijadikan pegangan jika sewaktu-waktu dibutuhkan agar tidak dikenai sanksi jika ada pemeriksaan oleh aparat saat komunitas sedang bekerja. Meskipun sebelumnya sudah ada KTA IWAYO, surat keterangan ini semakin memperkuat.
2. Positioning sidomulyo di antara komunitas yang lain makin diperjelas dengan statemen Sheila mengenai voli di FKWS. Organisasinya memang mengusung olahraga sebagai kegiatan pokok namun semua itu bermuara ke IWAYO, tidak untuk perjuangan sektoral.
3. Nalar mobilisasi sumber daya di komunitas sudah tumbuh, usulan dari pengurus FKWS untuk memaksimalkan penggunaan uang kas selain sebagai support akses yankes bisa menjadi entry point untuk melakukan pembahasan mobilisasi sumber daya di IWAYO.

**Rekomendasi:**

Assisting ke pengurus FKWS dalam mendorong anggotanya melakukan pemetaan dan atau analisis kebutuhan terkait mobilisasi sumber daya komunitas.

## Notulensi Pertemuan Rutin

### Komunitas Waria Badran

Maret 2013

**Hari/Tanggal** : Minggu, 24 Maret 2013

**Tempat** : kost Eva

**Peserta** : Fitri, Angga, Eva, Wulan, Pina, Nita, Yetti, Yuni Shara, Okky, Vera

#### **Capaian :**

1. Untuk pembahasan uang kas akan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya mengingat keputusan ini harus dihadiri seluruh anggota KWB. Agar semua hadir maka dilakukan pembagian peran. PE KWB seperti Yetti dan Yuni Shara akan mengajak dan mencari waktu di mana semua anggota bisa hadir. Pertemuan selanjutnya juga akan membahas fungsi lain dari uang kas selain support yankes dan solidaritas. Bisa saja menjadi sebuah praktik mobilisasi sumber daya yang bermuara ke IWAYO.
2. CO mengajak komunitas untuk merefleksikan meninggalnya beberapa waria di awal tahun 2013 ini. Ditambah lagi sekarang sedang ada MS di Jombor yang sakit (pecah pembuluh darah) yang opname di Panti Rapih. Mengapa kabar orang sakit selalu terlambat/diketahui setelah masuk ke kondisi kritis seperti Maya dan Heru/Yayuk Parabola. Komunitas mengungkapkan bahwa terkadang si sakit tidak mau mengungkapkan sakitnya ke kawan-kawan di komunitas karena khawatir akan dijudge sebagai ODHA, selain itu pada kasus tertentu seperti Ari Jaksa yang tidak mau orang lain tahu bahwa ia sakit karena enggan keluarganya tahu akan identitasnya sebagai waria. Ari jaksa berpikir bahwa ketika ia sakit maka akan banyak waria lain yang membezuk di rumah atau rumah sakit sehingga dapat menyebabkan identitasnya "bobor". Komunitas juga menyampaikan bahwa banyak sekali MS yang terbuka dan mau untuk mengakses layanan. Mereka yang demikian dapat teratasi dan bisa menjadi contoh bagi yang lain. Misalnya saja sejumlah nama di FKWS dan KWB yang kini sudah mandiri dalam mengakses.

#### **Rekomendasi:**

CO melakukan pendekatan kepada MS yang jarang hadir sekaligus assisting PE dalam melakukan pemetaan kebutuhan.

#### Kegiatan 1.3: Pertemuan Divisi Waria

Waktu Pelaksaan:	jan	feb	mar	apr	Mei	jun	Jul	agt	sep	okt	Nov	Des
------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Output Kegiatan: rencana kegiatan pengorganisasian waria

#### Gambaran Rencana Kegiatan:

Sebagai ruang konsolidasi, koordinasi, serta transfer informasi di titik komunitas. Dari semua hal yang ada di komunitas, divisi dan CO akan membuat rencana kegiatan pengorganisasian komunitas waria.

#### Gambaran Kegiatan yang telah Selesai Dilaksanakan:

**Maret:**

**Pertemuan Rutin Divisi Waria**

**Hari/tanggal :** Sabtu, 23 Maret 2013

**Waktu** : 17.00-20.00 WIB

**Lokasi** : Warung Kopi Lekker Je, Jl. Cik Ditiro, Terban

**Peserta** : Angga, Reza

**Pembahasan :**

1. Up date perkembangan pengorganisasian komunitas. FKWS sudah mendapatkan tempat latihan volley yang baru dan lebih nyaman digunakan, tempat tersebut dibuatkan oleh Kelurahan Bener untuk dipergunakan warga secara bergiliran. Pasangan MS kini bisa tinggal bersama di Sidomulyo seiring dengan ijin yang dikeluarkan secara resmi oleh pengurus kampung, syaratnya hanya fotokopi KTP-surat pernyataan-lapor di Balai RW. Selanjutnya pengurus kampung berupaya untuk memfasilitasi kebutuhan komunitas dalam memperoleh jamkesmas, rencananya akan masuk dengan sarana KTA terbitan IWAYO. Bagi MS pendatang baru yang belum memiliki KTA IWAYO akan dibuatkan Surat Keterangan Tempat Tinggal/SKTT yang berfungsi mirip dengan Kipem sebagai kartu identitas. KWB hingga sekarang sedang mengupayakan untuk mengumpulkan anggotanya pada pertemuan rutin guna membahas persoalan kas dan serkileran. Sementara itu di BI, pengurusnya merencanakan untuk mengadakan capacity building untuk anggotanya terutama yang remaja karena dari pengamatan yang dilakukan para remaja tersebut belum menemukan pemahaman issue gender dan seksualitas yang merata. Pengurus BI menilai ini penting karena berguna sebagai landasan berpikir dan bergerak dalam perjuangan identitas.
2. Assisting yang dilakukan sampai bulan Maret hanya sekali yaitu pada Nur Tungkak (SSBWY). Pada proses assisting mengakses rujukan puskesmas sempat ditemui kendala. Dokter di puskesmas Gedongtengen tidak menuliskan rujukan dan diagnosa yang komplit sehingga CO harus berulang kali ke puskesmas untuk mendapatkan rujukan yang kongkrit sebagaimana diminta oleh poli di RS Jogja. Proses di RS berlangsung lancar dan MS sudah mampu mengakses sendiri pada terapi ke-3 atau terakhir sebelum ia sembuh. Pada penggalian yang CO lakukan didapati MS kecanduan pada alcohol sampai pada penyumbatan saraf tersebut. Kemudian MS mendapatkan konseling dari dokter agar mengurangi konsumsi alkoholnya. CO mendorong MS agar dapat memenuhi anjuran dokter karena juga akan berdampak pada perilaku seks (MS bekerja sebagai sex worker).
3. CO menceritakan kendalanya dalam outreach. Saat ini CO juga bekerja di perusahaan pertambangan sebagai driver sehingga hanya bisa melakukan kerja-kerja pengorganisasian di sore dan malam hari, CO memiliki waktu libur di week end. Kesepakatan yang dihasilkan yaitu CO akan memaksimalkan koordinasi dengan MS atau pengurus organisasi lewat SMS atau telpon jika ada persoalan yang harus diselesaikan siang hari, kemudian datang ke MS atau lapangan pada malam hari. Kondisi tersebut sebenarnya bukan hambatan melainkan sebuah situasi yang harus diadaptasi sehingga dapat saling menyesuaikan dengan pekerjaan yang lainnya.
4. Divisi waria sepakat untuk mensupport/menyediakan jasa pemotretan kartu anggota IWAYO.

Selain meringankan komunitas juga sekalian untuk memperoleh data karena nanti pengolahan foto serta data diri akan dilakukan oleh divisi waria. Sekalipun ada MS yang sudah memiliki foto atau mengakses studio foto di luar, maka pengumpulan database akan dilakukan saat *scanning* foto. Metode pengumpulan database ini akan dishare dengan IWAYO supaya IWAYO juga memiliki database tersebut.

5. Rekomendasi untuk CO agar berdiskusi dengan pengurus-pengurus di FKWS dan KWB tentang pengelolaan kas komunitas. Muaranya adalah sharing sumber daya dengan IWAYO atau dalam kata lain penguatan IWAYO.



Nomor : IJN34.11/PL/2013

19 Februari 2013

Lamp :

Hal : Permohonan Ijin Observasi

Yth. : **Kepala PKBI**  
**Jl. Taman Siswa Gg Basuki, Sukorasan Mg/II 560 Yk**

Dengan hormat beritahukan, bahwa untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik yang ditetapkan oleh Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, maka mahasiswa sbb :

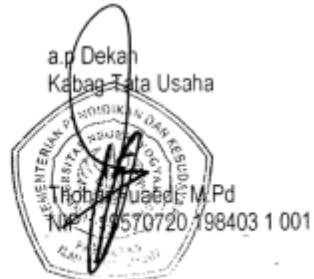
Nama : Sri Mulyani  
NIM : 09102244001  
Sem/Jurusan/Prodi : VIII / PLS

Diwajibkan melaksanakan kegiatan Observasi/praktek data tentang; **pola pendampingan komunitas waria** untuk memenuhi tugas mata kuliah: **Tugas Akhir Skripsi** dengan dosen pengampu **S.W. Septiarti, M.Si**

Sehubungan dengan itu perkenankanlah kami memintakan ijin mahasiswa tersebut diatas untuk melaksanakan kegiatan observasi pada instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik serta terkabulnya permohonan ini diucapkan terima kasih.

Tembusan :  
Ketua Jurusan PLS





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

Alamat : Karangmulyo, Yogyakarta 55281  
Telp.(0274) 586168 Hunting, Fax.(0274) 540611; Dekan Telp. (0274) 520094  
Tele.(0274) 586168 Psw. (221, 223, 224, 295, 344, 345, 366, 368, 369, 401, 402, 403, 417)



Certificate No. QSC 00587

No. : 2290 /UN34.11/PL/2013

10 April 2013

Lamp. : 1 (satu) Bendel Proposal

Hal : Permohonan izin Penelitian

Yth. Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  
Cq. Kepala Biro Administrasi Pembangunan  
Setda Provinsi DIY  
Kepatihan Danurejan  
Yogyakarta

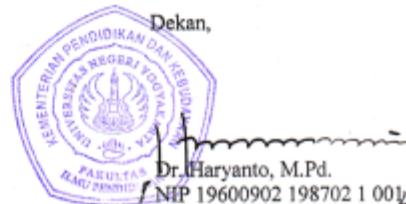
Diberitahukan dengan hormat, bahwa untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik yang ditetapkan oleh Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, mahasiswa berikut ini diwajibkan melaksanakan penelitian:

Nama : Sri Mulyani  
NIM : 09102244001  
Prodi/Jurusan : PLS/PLS  
Alamat : Ds. Karangrejo Rt.01/Rw.05 Kutoarjo, Purworejo, Jawa Tengah

Sehubungan dengan hal itu, perkenankanlah kami meminta izin mahasiswa tersebut melaksanakan kegiatan penelitian dengan ketentuan sebagai berikut:

Tujuan : Memperoleh data penelitian tugas akhir skripsi  
Lokasi : Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) DIY  
Subyek : Pengelola , Koordinator dan Relawan Divisi , Waria  
Obyek : Pengorganisasian Komunitas  
Waktu : April-Juni 2013  
Judul : Pengorganisasian Komunitas Waria Berbasis Hak Asasi Manusia di Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Daerah Istimewa Yogyakarta

Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami mengucapkan terima kasih.



Tembusan Yth:  
1. Rektor ( sebagai laporan)  
2. Wakil Dekan I FIP  
3. Ketua Jurusan PLS FIP  
4. Kabag TU  
5. Kasubbag Pendidikan FIP  
6. Mahasiswa yang bersangkutan  
Universitas Negeri Yogyakarta



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)  
YOGYAKARTA 55213

**SURAT KETERANGAN / IJIN**

070/3152/V/4/2013

Membaca Surat : Dekan Fak. Ilmu Pendidikan UNY Nomor : 2290/UN34.11/PL/2013  
Tanggal : 10 April 2013 Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;  
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.  
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DILIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama	:	SRI MULYANI	NIP/NIM	:	09102244001
Alamat	:	KARANGMALANG, YOGYAKARTA			
Judul	:	PENGORGANISASIAN KOMUNITAS WARIA BERBASIS HAK ASASI MANUSIA DI PERKUMPULAN KELUARGA BERENCANA INDONESIA (PKBI) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA			
Lokasi	:	YOGYAKARTA Kota/Kab. KOTA YOGYAKARTA			
Waktu	:	11 April 2013 s/d 11 Juli 2013			

**Dengan Ketentuan**

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan \*) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuh cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 12 April 2013

A.n Sekretaris Daerah

Asisten Pererekonomian dan Pembangunan

Ub.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan

SETDA 5/14

Hendar Sisowati, SH

2013

NIP. 19580130 198503 2 003

**Tembusan :**

1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Walikota Yogyakarta cq. Dinas Perizinan
3. Ka. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY
4. Ka. BKBN DIY
5. Dekan Fak. Ilmu Pendidikan UNY
6. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515866, 562682  
EMAIL : perizinan@jogjakota.go.id EMAIL INTRANET : perizinan@intra.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/1092  
2599/34

Dasar : Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta  
Nomor : 070/3152/V/4/2013 Tanggal : 12/04/2013

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah  
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;  
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;  
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;  
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;

Dijinkan Kepada : Nama : SRI MULYANI NO MHS / NIM : 09102244001  
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Ilmu Pendidikan - UNY  
Alamat : Kampus Karangmalang, Yogyakarta  
Penanggungjawab : S. W. Septiarti, M.Si.  
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal :  
PENGORGANISASIAN KOMUNITAS WARIA BERBASIS HAK  
ASASI MANUSIA DI PERKUMPULAN KELUARGA BERENCANA  
INDONESIA (PKBI) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta  
Waktu : 11/04/2013 Sampai 11/07/2013  
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan  
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)  
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat  
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah  
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhiinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas  
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan  
Pemegang Izin  
  
SRI MULYANI

Dikeluarkan di : Yogyakarta  
pada Tanggal : 15-4-2013

An. Kepala Dinas Perizinan  
Sekretaris  
  
ENY RETNOWATI, SH  
NIP. 196103031988032004

Tembusan Kepada :

- Yth. 1. Walikota Yogyakarta(sebagai laporan)
2. Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda Prop. DIY
3. Pimp. PKBI Kota Yogyakarta
4. Ybs.